



**PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	19
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	115
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	121
A. Capaian Kinerja Makro	121
B. Capaian Kinerja Penyelenggraan Urusan Pemerintahan	121
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	309
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
.....	365
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	365
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan (Penugasan)	370
1. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diterima	372
2. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan (Penugasan).....	379
 BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL (SPM)	380
 BAB V PENUTUP	499
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Indikator Kinerja Kunci Output	
2. Indikator Kinerja Kunci Outcome	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, segala rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 ini dapat disusun dan disampaikan tepat pada waktunya.

Laporan pertanggungjawaban ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah. Harapan kami, laporan ini selain bisa memberikan manfaat juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman penyusunan LPPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.7/9136/OTDA Tanggal 19 Desember 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri atas, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun dengan semangat Trus Karya Tataning Bumi serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kami sangat berharap bahwa kualitas dan kuantitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai maupun yang belum dalam proses pembangunan. Ini bisa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang sehingga Pemerintah Daerah bisa mengelola dengan lebih baik lagi untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2022 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun Kabupaten Jepara Trus Karya Tataning Bumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, Maret 2023

Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA., ATD., S.H., M.M

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

A. Penjelasan Umum.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 38); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

b. Data Geografis Wilayah Kab. Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Secara geograis, Kabupaten Jepara terletak berbatasan langsung dengan laut Jawa disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, sebelah barat berbatasan dengan laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Dengan geografis seperti itu, Kabupaten Jepara memiliki wilayah pantai yang cukup panjang. Secara Topografis, Kabupaten Jepara yang merupakan daerah kawasan utara Jawa ini dibagi dalam empat (4) wilayah yaitu : wilayah pantai di bagian tengah dan selatan, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari gunung Muria serta wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan rangkaian kepulauan Karimunjawa.

Dengan kontur wilayah tersebut, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), dengan daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0–2 m dpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0–1.301 m dpl yang merupakan perbukitan.

Tabel
Data Ketinggian dari Permukaan Air Laut
Kabupaten Jepara

No.	Nama Kecamatan	Ketinggian (meter)
1	Kedung	0 – 2
2	Pecangaan	2-17
3	Welahan	2 – 7
4	Mayong	13 - 438
5	Batealit	68 - 378
6	Jepara	0 – 50
7	Mlonggo	0 - 300
8	Bangsri	0 - 594
9	Keling	0 - 1.301
10	Karimunjawa	0 - 100
11	Tahunan	0 – 46
12	Nalumsari	13 - 736
13	Kalinyamatan	2 – 29
14	Kembang	0 - 1.000
15	Pakis Aji	0 - 1.000
16	Donorojo	0 - 619

Sumber : *Jepara Dalam Angka 2022*

Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 100.413.189 Ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling, yaitu 12.311,588 Ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370.001 Ha.

1. Letak Geografis.

Kabupaten Jepara secara geografis terletak pada posisi 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48, 02"

sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.

2. Luas Wilayah Kabupaten

Tabel Luas Wilayah Kab. Jepara per kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedung	47,087	4.787
2	Pecangaan	38,62	3.862
3	Welahan	30,43	3.043
4	Mayong	73,64	7.364
5	Batealit	100,28	10.028
6	Jepara	28,16	2.816
7	Mlonggo	49,51	4.951
8	Bangsri	94,63	9.463
9	Keling	126,31	12.663
10	Karimunjawa	48,47	4.847
11	Tahunan	44,46	4.446
12	Nalumsari	57,60	5.760
13	Kalinyamatan	26,08	2.608
14	Kembang	122,68	12.268
15	Pakis Aji	67,93	6.793
16	Donorojo	105,32	10.532

Sumber : *Jepara Dalam Angka 2022.*

Peta Wilayah Kabupaten Jepara



3. Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha . Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 hadan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut terbagi atas :

- lahan sawah/wilayah tak terbangun meliputi tambak, pertanian , kawasan perkebunan serta konservasi.
- bukan lahan sawah/tanah kering/*build up area* yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan industri, transportasi .

Lahan sebagaimana dimaksud adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dalam suatu sektor perekonomian. Penggunaan lahan akan cenderung berubah di masa yang akan datang dari lahan persawahan menjadi pemukiman, fasilitas umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya penambahan penduduk, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan tehnologi.

4. Iklim

Kabupaten Jepara sebagaimana daerah lainnya beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan musim hujan yang silih berganti sepanjang tahun. Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember – April dipengaruhi oleh musim barat sedang musim kemarau antara bulan Mei – Oktober dipengaruhi angin musim timur Besar rata-rata jumlah curah hujan tahunan wilayah Jepara utara adalah 2000-2.500 mm/tahun dan Jepara bagian selatan adalah 2.500-3000 mm/tahun , dengan jumlah hari hujan 102 hari. Suhu udara di Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 ° celcius dan tertinggi pada 33,71 ° celcius, dengan kelembaban udara rata –rata sekitar 84%.

c. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah tertentu. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu disebut dengan Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*). Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan dan pendidikan yang berwawasan gender. Berdasarkan jenis kelamin, dari total penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2022 yaitu 1.236.674 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 622.225 orang dan perempuan sebanyak 614.449 orang.

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEDUNG	40,696	39,999	80,695
2.	PECANGAAN	43,980	43,699	87,679
3.	WELAHAN	40,349	39,531	79,880
4.	MAYONG	47,629	47,281	94,910

5.	BATEALIT	44,389	43,652	88,041
6.	JEPARA	42,019	41,742	83,761
7.	MLONGGO	44,459	42,997	87,456
8.	BANGSRI	52,016	51,460	103,476
9.	KELING	33,415	33,581	66,996
10.	KARIMUNJAWA	5,312	5,062	10,374
11.	TAHUNAN	57,128	55,767	112,895
12.	NALUMSARI	39,858	39,789	79,647
13.	KALINYAMATAN	32,182	31,690	63,872
14.	KEMBANG	36,383	36,718	73,101
15.	PAKISAJI	31,646	30,847	62,493
16.	DONOROJO	30,764	30,634	61,398
JUMLAH		622,225	614,449	1,236,674
Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI s.d 31 Desember 2022				

**Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
Berdasarkan Kelompok Umur**

NO.	STRUKTUR USIA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4	45,581	42,600	88,181
2.	5-9	51,679	48,446	100,125
3.	10-14	53,267	50,339	103,606
4.	15-19	42,516	42,382	84,898
5.	20-24	50,988	49,497	100,485
6.	25-29	49,502	48,339	97,841
7.	30-34	47,101	45,284	92,385
8.	35-39	50,089	49,573	99,662

NO.	STRUKTUR USIA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
9.	40-44	48,971	48,061	97,032
10.	45-49	43,985	44,636	88,621
11.	50-54	39,090	39,649	78,739
12.	55-59	31,845	33,453	65,298
13.	60-64	25,480	26,108	51,588
14.	65-69	17,811	16,994	34,805
15.	70-74	11,358	12,510	23,868
16.	75+	12,962	16,578	29,540
Jumlah		622,225	614,449	1,236,674
Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI s.d 31 Desember 2022				

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Jepara

Secara administratif, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 Kelurahan, 4.766 RT dan 1.015 RW. Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km .

Jumlah Kecamatan dan Desa Kab. Jepara Tahun 2022

No.	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	33.20.03	Welahan	15		15
2.	33.20.12	Nalumsari	15		15
3.	33.20.04	Mayong	18		18
4.	33.20.13	Kalinyamatan	12		12
5.	33.20.02	Pecangaan	12		12
6.	33.20.05	Batealit	11		11
7.	33.20.11	Tahunan	15		15
8.	33.20.06	Jepara	5	11	16
9.	33.20.01	Kedung	18		18
10.	33.20.07	Mlonggo	8		8

No.	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
11.	33.20.15	Pakisaji	8		8
12.	33.20.08	Bangsri	12		12
13.	33.20.14	Kembang	11		11
14.	33.20.16	Donorojo	8		8
15.	33.20.09	Keling	12		12
16.	33.20.10	Karimunjawa	4		4
TOTAL			184	11	195

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Jepara memiliki 42 Perangkat Daerah dan 150 Unit Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 8.890 orang.

**Tabel Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah PNS
Kab Jepara Tahun 2022**

No.	Nama OPD	Tipe	Jumlah Unit Kerja
1.	Sekretariat Daerah	B	9
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	A	4
3.	Inspektorat	A	4
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	A	5
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A	5
6.	Badan Kepegawaian dan	B	4

No.	Nama OPD	Tipe	Jumlah Unit Kerja
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah raga	A	6
8.	Dinas Kesehatan	B	12
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A	5
10.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	C	3
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A	5
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	A	4
13.	Dinas Lingkungan Hidup	A	4
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A	5
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	4
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	A	3
17.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	A	5
18.	Dinas Perikanan	A	4
19.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	A	4
20.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A	4
21.	Dinas Perhubungan	A	4
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	B	3
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	A	4

No.	Nama OPD	Tipe	Jumlah Unit Kerja
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	A	4
25.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	3
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	1
27.	Kecamatan Kedung	A	2
28.	Kecamatan Pecangaan	A	2
29.	Kecamatan Kalinyamatan	A	2
30.	Kecamatan Welahan	A	2
31.	Kecamatan Mayong	A	2
32.	Kecamatan Nalumsari	A	2
33.	Kecamatan Batealit	A	2
34.	Kecamatan Tahunan	A	2
35.	Kecamatan Jepara	A	2
36.	Kecamatan Mlonggo	A	2
37.	Kecamatan Pakis Aji	A	2
38.	Kecamatan Bangsri	A	2
39.	Kecamatan Kembang	A	2
40.	Kecamatan Keling	A	2
41.	Kecamatan Donorojo	A	2
42.	Kecamatan Karimunjawa	A	2
T O T A L			150

Tabel Jumlah Pegawai Kabupaten Jepara Tahun 2022

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
1.	Sekretariat Daerah	111
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40
3.	Inspektorat	48
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	39
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	44

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
6.	Badan Kepegawaian Daerah	37
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah raga	5.658
8.	Dinas Kesehatan	1.053
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	113
10.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	27
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	31
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	22
13.	Dinas Lingkungan Hidup	64
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	42
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	28
17.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	134
18.	Dinas Perikanan	27
19.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	34
20.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	99
21.	Dinas Perhubungan	64
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	29
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	43
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	44
25.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	17
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11
27.	Kecamatan Kedung	22
28.	Kecamatan Pecangaan	26
29.	Kecamatan Kalinyamatan	22
30.	Kecamatan Welahan	27
31.	Kecamatan Mayong	27
32.	Kecamatan Nalumsari	33

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
33.	Kecamatan Batealit	23
34.	Kecamatan Tahunan	19
35.	Kecamatan Jepara	72
36.	Kecamatan Mlonggo	23
37.	Kecamatan Pakis Aji	18
38.	Kecamatan Bangsri	23
39.	Kecamatan Kembang	24
40.	Kecamatan Keling	21
41.	Kecamatan Donorojo	18
42.	Kecamatan Karimunjawa	26
43.	RSU RA Kartini	585
TOTAL		8890

Data bersumber dari BKD Kab. Jepara Tahun 2022.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 2.377.786.765.206,-** (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.326.866.035.422,-** (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau **97,86%** dengan rincian sebagai berikut:
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 tercapai sebesar **Rp. 427,510,460,021,-** atau **98,8%** dari target sebesar **Rp. 432.902.738.000,-** (naik sebesar **4,6%** dari penerimaan PAD pada tahun 2021 yang tercapai sebesar **Rp. 408,635,274,883,-**) yang terdiri dari :
 - Pajak Daerah tercapai sebesar **Rp. 178.236.117,668,-** atau **100,8%** dari target **Rp. 176.772.840.000,-.** (naik **4,6%** dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yang tercapai sebesar **Rp. 170.338.793.994,-**) .

- Retribusi Daerah tercapai sebesar **Rp. 20.808,059,031,-** atau **91,3%** dari target **Rp. 22.779.527.000,-**. (turun minus - **5,9 %** dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yang tercapai sebesar **Rp. 22.779.527.000,-**), penurunan disebabkan dengan adanya perubahan regulasi sehingga Pemkab. Jepara belum bisa memungut Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) sebelum ada Perda yang mengatur.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar **Rp. 12.923.366.443,-** atau **109,3%** dari target **Rp. 11.818.989.000,-**. berasal dari penerimaan deviden BUMD lembaga keuangan yaitu Bank Jateng, BPR Jepara Artha dan BPR BKK serta Perumda Aneka Usaha (turun sebesar minus - **19,1%** dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yang tercapai sebesar **Rp. 15.982.320.047,-** disebabkan pada tahun 2021 terdapat sharing AMU, dan cadangan laba tahun lalu Bank Jateng sebesar Rp. 5.276.000.000).
- Lain-lain PAD yang sah tercapai sebesar **Rp. 215,542,916,879,-** atau **97,3%** dari target **Rp. 221.531.382.000,-**. (naik **7,7%** dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yang tercapai sebesar **Rp. 200.204.606.067,-**) merupakan penerimaan dari penjualan kekayaan daerah yg tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, pengembalian lainnya serta pendapatan BLUD.

URAIAN PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	2.377.786.765.206	2.326.866.035.422
Pendapatan Asli Daerah	432.902.738.000	427.512.120.021
➤ Pajak daerah	176.772.840.000	178.236.117.668
➤ Retribusi Daerah	22.779.527.000	20.808.059.031
➤ Pengelolaan kekayaan daerah	11.818.989.000	12.923.366.443

yang dipisahkan		
➤ Lain-lain PAD yg sah	221.531.382.000	215.544.576.879
Pendapatan Transfer	1.935.584.027.206	1.896.873.915.401
➤ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.712.661.027.206	1.679.392.588.934
➤ Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.923.000.000	217.481.326.467
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	9.300.000.000	2.480.000.000
➤ Pendapatan Hibah	9.300.000.000	2.480.000.000

3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 sebesar **Rp. 2.621.977.599.331,-** (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.429.836.552.058,-**(Dua Triliun Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) **atau 92,67%** dengan rincian Belanja sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
BELANJA DAERAH	2.621.977.599.331	2.429.836.552.058
BELANJA OPERASI	1.965.118.267.147	1.789.590.720.906
➤ Belanja Pegawai	1.020.761.795.784	920.257.830.877
➤ Belanja Barang & Jasa	765.031.551.823	698.762.144.463
➤ Belanja Subsidi	874.086.000	784.544.800
➤ Belanja Hibah	120.118.723.540	113.201.705.766

➤ Belanja Bantuan Sosial	58.332.110.000	56.584.495.000
BELANJA MODAL	210.844.469.892	196.292.254.705
➤ Belanja Modal Tanah	2.615.000.000	2.355.744.990
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.177.401.427	57.598.156.217
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.182.464.313	61.485.231.280
➤ Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.783.448.140	66.722.091.115
➤ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.961.156.012	8.009.375.103
➤ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	125.000.000	121.656.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.966.752.792	2.255.150.051
➤ Belanja Tidak Terduga	3.966.752.792	2.255.150.051
BELANJA TRANSFER	442.048.109.500	441.698.426.396
➤ Belanja Bagi Hasil	24.128.873.400	23.822.590.296
➤ Belanja Bantuan Keuangan	417.919.236.100	417.875.836.100

4. Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2022

Total Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

❖ Penerimaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp. 269.190.834.125,-** (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar

Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan Realisasi sebesar **Rp. 269.190.834.125,-** (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) **atau 100%.**

❖ Pengeluaran Daerah dianggarkan sebesar **Rp 25.000.000.000,-** (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan realisasi **Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) atau 100%,** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN PEMBIAYAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	269.190.834.125	269.190.834.125
➤ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.190.834.125	269.190.834.125
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000
➤ Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000
➤ Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	244.190.834.125	244.190.834.125
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-	141.220.317.489

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 permasalahan strategis Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Derajat dan upaya pelayanan kesehatan belum optimal.

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jepara masih belum optimal pada Tahun 2020. Prevalensi Stunting pada Tahun 2020 masih sebesar 13,78% walaupun sudah di bawah capaian Provinsi Jateng sebesar 20%. Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS tahun sebesar 0,80 atau sejumlah 103. Kasus kematian Ibu juga masih tinggi, yaitu sebanyak 15 kasus di Tahun 2020. Rasio tenaga kesehatan belum memenuhi standar SNI dan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama juga masih belum ideal. Selain itu, adanya pandemi virus secara global yaitu Covid-19 pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2021 menimbulkan permasalahan daerah di bidang kesehatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Persebaran virus yang cepat dengan sarana dan prasarana kesehatan yang belum siap untuk menanggulangi virus tersebut menyebabkan masalah ini belum dapat ditangani secara optimal.

2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara.

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Jepara ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memiliki sarana pelengkap. Ruas jalan dengan kondisi baik baru mencapai 76,46% (666,848 km). Selain itu berkaitan dengan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama juga masih belum ideal, kondisi ini berdasarkan SNI 03-1733-2004 Jepara masih kekurangan + 19 Puskesmas yang tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk akses air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni serta penanganan sampah juga perlu didorong lebih baik. Karena hal tersebut mempengaruhi taraf kesehatan masyarakat.

3. Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya) tinggi.

Angka kemiskinan (P0) di Kabupaten Jepara mengalami fluktuatif setiap tahun dan masih perlu mendapatkan perhatian. Angka kemiskinan pada Tahun 2020 sebesar 7,17% naik dari Tahun 2019

yaitu sebesar 6,66%, namun demikian jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Jepara masih cukup besar (91.140 jiwa pada Tahun 2020) meskipun trennya fluktuatif setiap tahun. Di awal tahun 2020 dengan adanya bencana nasional mewabahnya Covid 19 di Indonesia, berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang diproyeksikan turun tajam di masa pandemi ini. Hal tersebut mengakibatkan naiknya angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran serta pertumbuhan ekonomi juga melambat. Dan jika tidak segera di tangani maka bisa berdampak sosial.

4. Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun IDG rendah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Jepara pada Tahun 2019 mencapai 90,91% naik dibandingkan Tahun 2018 sebesar 90,66%. Sementara itu, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara meningkat menjadi 50,62% pada Tahun 2018 dari sebelumnya 48,76 pada Tahun 2017, meskipun demikian IDG Kabupaten Jepara merupakan paling rendah di antara Kabupaten Pati, Kudus, Rembang dan Blora.

5. Pertumbuhan ekonomi melambat yang diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Pada Tahun 2020, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara melambat hingga mencapai -1,94 persen dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,02 persen sehingga tidak dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 7%. Kondisi ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia dari akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 yang menimbulkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara global.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 naik sebesar 3,73% dari tahun 2019 di angka 2,97% menjadi 6,7%. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin bertambah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja akibat dirumahkan, PHK ataupun terpaksa tidak bisa bekerja akibat pandemi Covid-19. Sampai dengan Agustus

tahun 2020 TPT Kabupaten Jepara masih dibawah TPT Nasional (7,1%) dan namun diatas Provinsi Jawa Tengah 6,48%.

6. Pelestarian lingkungan.

Usaha pelestarian lingkungan di Kabupaten Jepara hingga saat ini masih belum optimal disebabkan masih rendahnya cakupan pelaksanaan penjaringan kualitas air, udara dan tanah bahkan tahun 2020 naik dibanding tahun 2019. Indeks kualitas lingkungan hidup pada Tahun 2020 naik menjadi 66,89 dari sebelumnya 64,69. Permasalahan sampah juga masih perlu upaya dalam penanganan, karena baru 18,85% dari total produksi sampah di Jepara sebanyak 251.072 ton/tahun. Permasalahan tersebut dikhawatirkan mengakibatkan dampak negative pada daya dukung lingkungan dan umberdaya alam terhadap keberlanjutan pembangunan di Jepara. Akibat dari kurangnya memerhatikan keberlanjutan lingkungan semakin meningkatkan potensi bencana di Jepara. Kejadian bencana yang sering terjadi di Jepara adalah banjir, longsor, kekeringan dan puting beliung.

Berbagai permasalahan yang terkait pelestarian lingkungan ke depan harus ditangani antara lain belum optimalnya kegiatan konservasi rawan longsor dan wilayah potensi kekeringan, perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan juga perlu di intervensi, mitigasi bencana juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan koordinasi seluruh komponen masyarakat dalam pengurangan resiko bencana untuk perencanaan pembangunan yang memerhatikan pelestarian lingkungan.

7. Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan antara lain : belum optimalnya pelaksanaan manajemen ASN, pelayanan publik yang belum menjalankan standar pelayanan, belum optimalnya penataan kelembagaan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien, akuntabilitas kinerja pemerintahan juga belum optimal.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan disusun mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi kinerja yang setiap tahun selalu ada perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu Jepara berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Seperti moto Kabupaten Jepara yaitu ***"Trus Karya Tataning Bumi"*** yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

1. VISI

Visi yang diusung oleh Kabupaten Jepara adalah :
"Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan Berdayasaing"

2. MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan visi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 memuat visi misi dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun tersebut. Adapun program pembangunan daerah tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 untuk periode tahun 2017-2022. Periode Kepala Daerah ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2017-2022. Pemilihan kepala daerah periode berikutnya direncanakan pada tahun 2022. Akan tetapi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan periode perencanaan pasca selesainya RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sampai pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 menginstruksikan kepada Bupati/ Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Menindaklanjuti hal tersebut maka disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dengan memerhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, sebagai berikut:

Tabel Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
1.	URUSAN PENDIDIKAN					
1	Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal				31.381,17	Disdikpora
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	61,50		
		Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,95		
2	Program				50.303,78	Disdikpora

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Nilai Pemetaan Mutu SD Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	5,34		
		Nilai Pemetaan Mutu SMP Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	5,29		
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	109,50		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,30		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	nilai	7,30		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,80		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P paket B	%	91,00		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/P	%	85,00		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,05		
		Persentase SD dan SMP yang telah Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti	%	91,37		
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				29.132,06	Disdikpora
		Capaian Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SD	Nilai	4,50		
		Nilai Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SMP	Nilai	4,60		
		Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,00		
2.	URUSAN KESEHATAN					
4	Program				20.088,18	Dinkes

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Kefarmasian dan Alkes	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di puskesmas	%	90,00		
		Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memasarkan produk farmasi tanpa ijin edar	%	15,00		
		Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	%	80,00		
5	Program Kesehatan Masyarakat				3.275,55	Dinkes
		Proporsi Rumah Tangga berPHBS	%	85,00		
		Proporsi desa siaga aktif mandiri	%	17,00		
		Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan Keluarga Sehat	%	100,00		
		Persentase balita pendek (stunting)	%	20,00		
		Prevalensi anemia ibu hamil	%	21,00		
		Prevalensi anemia remaja putri	%	38,00		
		Persentase Desa melaksanakan STBM	%	100,00		
		Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	83,00		
		Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	%	70,00		
6	Program Pelayanan Kesehatan				248.892,29	Dinkes, RSUD
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	95,00		
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100,00		
		Cakupan kunjungan bayi	%	99,30		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	97,00		
		Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	94,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	%	100,00		
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	Angka	40,00		
		Case Notification Rate (CNR) TB Paru	%	90,00		
		Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	%	85,00		
		AFP Rate	Angka	2,50		
		Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS	%	1,25		
		Persentase ODHA yang mendapat akses ARV	%	65,00		
		Proporsi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di puskesmas	%	27,50		
		Persentase desa/kelurahan dengan Posbindu	%	100,00		
		Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan kesehatan	%	100,00		
		Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	%	75,00		
		Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi	%	90,00		
		Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin non kuota yang bermasalah kesehatan	%	100,00		
		BOR	%	80,20		
		Av-Los	Hari	5,90		
		TOI	Hari	1,40		
		BTO	Kali	49,50		
		NDR	0/00	21,30		
		IKM	Nilai	100,00		
7	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan				7.793,56	Dinkes
		Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	90,00		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK (Sistem Informasi	%	100,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Kesehatan)				
8	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan				282,38	Dinkes
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	%	90,00		
		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	75,00		
		Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1 : 5.000		
		Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Rasio	1 : 1.000		
		Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Rasio	1 : 855		
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
9	Program Infrastruktur Pedesaan				8.697,16	DPUPR
		Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	14,00		
10	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan				246.898,67	DPUPR
		Persentase jalan kabupaten rusak yang ditangani	% / tahun	5,73		
11	Program Penataan Ruang Daerah				6.009,19	DPUPR
		Persentase tataruang yang digunakan sebagaimana mestinya	%	100,00		
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				53.149,83	DPUPR
		Persentase bangunan pemkab yang dibangun & dipelihara	% / tahun	14		
13	Program Pengendalian Banjir				7.906,51	DPUPR
		Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	6,85		
		Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	94,16		
		Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	97,90		
		Persentase wilayah bebas banjir pedesaan	%	99,40		
14	Program Sumberdaya Air				20.895,77	DPUPR
		Rasio jaringan irigasi baik terhadap areal budidaya	rasio m/ha	10,83		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
15	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman				33.241,22	Disperkim
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	97,09		
		Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	%	100,00		
16	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh				39.566,81	Disperkim
		Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani	%	100,00		
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	% /tahun	3,94		
5.	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
17	Program Darurat Bencana Dan Logistik				1.157,74	BPBD
		Persentase bencana daerah yang tertangani	%	100,00		
18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				288,02	Bakesbangpol
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,12		
		Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	-		
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan				1.236,80	Bakesbangpol
		Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	100,00		
20	Program Pemeliharaan Ketentraman Dan Pencegahan Tindak Kriminal				1.267,30	Bakesbangpol
		Kasus Kriminalitas	Kasus	503		
		Jumlah kasus narkoba	Kasus	-		
21	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				11.664,36	BPBD, Satpol PP dan Damkar
		Persentase pengembangan desa siaga bencana	%	13,85		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	0,00596		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85,70		
		Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100,00		
		Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	-		
		Persentase bencana daerah yang tertangani	%			
22	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				429,21	Bakesbangpol
		Jumlah kasus narkoba	Kasus	7		
23	Program Pendidikan Politik Masyarakat				195,40	Bakesbangpol
		Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	%	80,00		
24	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.201,79	Bakesbangpol, Satpol PP dan Damkar
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,12		
		Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	rasio	-		
25	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan				3.394,15	Satpol PP dan Damkar
		Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	rasio	59,82		
26	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				1.603,89	Satpol PP dan Damkar
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	38,00		
27	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				1.101,26	BPBD
		Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	20,00		
6. URUSAN SOSIAL						
28	Program Pemberdayaan Sosial				2.810,47	Dinsospermad es
		Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	95,48		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	91,40		
		Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina	%	95,00		
29	Program Penanganan Bencana				209,19	Dinsospermad es
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00		
30	Program Penanganan Fakir Miskin				636,68	Dinsospermad es
		Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	%	100,00		
31	Program Penanganan Korban Perdagangan Orang				809,49	Dinsospermad es
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	97,44		
32	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				3.891,99	Dinsospermad es
		Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00		
		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	49,60		
		Persentase (%) anak terlantar yang di tangani	%	37,71		
33	Program				163,72	Dinsospermad

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100,00		es
		Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	61,17		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.	URUSAN TENAGA KERJA					
34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				1.722,49	Diskop UKM Nakertrans
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,00		
		AKAD (antar kerja antar daerah)	orang	14		
		AKAN (antar kerja antar negara)	orang	235		
35	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja				4.523,65	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	3,10		
		Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	3,30		
36	Program Perlindungan &Pengembangan Lembaga Ketnagakerjaan				683,35	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	60,00		
		Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100,00		
2.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
37	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender Dan Anak				2.936,35	DP3AP2KB
		Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	Skor	-		
		persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)	%	62,50		
		persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	%	28,21		
		persentase kelembagaan PUG aktif	%	100,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100,00		
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Per 1.000	0,07		
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	per 1.000	1,47		
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100,00		
		Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Per 1.000	0,82		
38	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan				2.304,18	DP3AP2KB
		persentase Perempuan Rentan yang dientaskan	%	72,41		
3.	URUSAN PANGAN					
39	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				4.891,87	DKPP
		Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr	2.460		
		Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	78		
		Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100,00		
		Penguatan cadangan pangan (beras)	%	45,00		
		Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP		
		Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	CV< 5%		
		Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecamatan	16		
		skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	93,00		
		Konsumsi energi dan protein per kapita				
		- Energi	kcal/kap/hari	2.125,00		
		- Protein	gr/kap/hari	57,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
4.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
40	Program Pengelolaan Limbah B3				152,05	DLH
		Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin	%	75,00		
41	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				3.789,27	DLH
		Persentase RTHK Publik	%	7,39		
42	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				17.262,19	DLH
		Persentase penanganan sampah	%	23,86		
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup				2.213,37	DLH
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%/tah un	60,00		
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%/tah un	16,49		
		Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%		-	
44	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat				142,32	DLH
		Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100,00		
45	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				2.477,38	DLH
		Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air.	%/tah un	1,52		
5.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
46	Program Penataan Administrasi Kependudukan				4.190,45	Disdukcapil
		Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	96,00		
		Persentase Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran	%	61,08		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		(0-60 hari)				
		Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun	%	86,79		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	65,78		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	15,01		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,50		
		Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian	%	48,99		
6.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
47	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan				1.313,95	Dinsosperma des
		Persentase BUMDES yang aktif	%	58,70		
48	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				2.999,92	Dinsosperma des
		Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	%	100,00		
		persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	-		
		persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	%	-		
49	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan				3.064,96	Dinsosperma des, Kecamatan
		PKK Aktif	%	100,00		
		Posyandu Aktif	%	100,00		
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	60,52		
50	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa				403,11	Dinsosperma des
		Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	%	100,00		
		LPM Berprestasi	%	35,00		
7.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
51	Program Keluarga Berencana				2.296,74	DP3AP2KB
		TFR (Total Fertility Rate)	nilai	2,30		
		Cakupan peserta KB aktif	%	73,3		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	per 1.000	31,41		
		Angka Dropout KB	%	19,91		
		persentase ketersediaan alokon	%	100,00		
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan	%	100,00		
		Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD)	rasio per desa	1,07		
		Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja	%	4,75		
		52	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri			
Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)	%			10,29		
53	Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.315,48	DP3AP2KB
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	%	75,09		
8.	URUSAN PERHUBUNGAN					
54	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan				46.253,07	DISHUB
		Persentase ketersediaan Rambu laut	%	73,00		
		Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	%	49,00		
		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	%	92,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
55	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan				3.388,50	DISHUB
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	49,00		
56	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas				1.123,85	DISHUB
		Persentase kecelakaan fatal	%	12,00		
57	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				960,08	DISHUB
		Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	83,00		
58	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				1.976,63	DISHUB
		Persentase ketersediaan angkutan darat;	%	6,18		
		Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan per 6 bulan);	Rasio	0,000136		
		Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	-		
59	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				4.659,19	DISHUB
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik;	%	98,00		
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik;	%	86,00		
9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
60	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				3.563,58	Diskominfo
		Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	%	100,00		
61	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa				6.074,46	Diskominfo
		Persentase updating website PD (%)	%	100,00		
		Persentase media informasi untuk masyarakat	%	100,00		
62	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan				84,71	Diskominfo
		persentase permohonan KIP yang	%	100,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Informasi Publik	ditindaklanjuti				
10.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
63	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				1.466,09	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,12		
		Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	-		
64	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				259,79	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,13		
65	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan				242,84	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	%	85,05		
66	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				1.074,16	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase UKM yang berdaya saing	%	3,41		
		Persentase OVOP yang berkembang	%	-		
67	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya Lokal				248,49	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase OVOP yang berkembang	%	2,30		
68	Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi				389,68	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)	%	61,63		
69	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi				547,81	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase koperasi aktif	%	85,06		
11.	URUSAN PENANAMAN MODAL					
70	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi				1.292,15	DPMPTSP
		Nilai Realisasi Investasi - PMDN	Rp	120.000.00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
				0.000		
		- PMA	US \$	72.000.000		
71	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah				79,07	DPMPTSP
		Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	orang	21.800		
12.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
72	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda				2.893,98	DISDIKPORA
		Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	4,00		
73	Progam Pengembangan Olahraga				4.487,21	DISDIKPORA
		Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	10		
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	65,00		
13.	URUSAN STATISTIK					
74	Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektoral				903,60	Diskominfo
		Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral	%	100,00		
14.	URUSAN PERSANDIAN					
75	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi				56,48	Diskominfo
		persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	100,00		
15.	URUSAN KEBUDAYAAN					
76	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				4.444,59	Disparbud
		Cakupan gelaran seni	%	100,00		
		Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar	%	100,00		
		Cakupan Organisasi Seni	%	66,60		
77	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan				1.920,15	Disparbud
		Misi Kesenian	%	100		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Budaya					
78	Program Pengembangan Nilai Budaya				779,36	Disparbud
		Cakupan gelaran seni	%	-		
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	66,67		
16. URUSAN PERPUSTAKAAN						
79	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi				649,46	Diskarpus
		Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka	%	49,00		
		Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	15		
80	Program Pengembangan Perpustakaan				1.722,49	Diskarpus
		Jumlah Perpustakaan:				
		· Daerah	unit	1		
		· Keliling	unit	8		
		· Lokasi sasaran keliling	lokasi	148		
		· Kecamatan	unit	10		
		· Desa	unit	80		
		· Masyarakat	unit	30		
		· Sekolah	unit	270		
		Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,60		
		Jumlah pustakawan berdasarkan tingkatan	orang	6		
		· Terampil	orang	5		
		· Ahli	orang	1		
17. URUSAN KEARSIPAN						
81	Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip				112,95	Diskarpus
		Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	buku	75		
		Jumlah masyarakat penqquna arsip statis	orang	290		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
82	Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN				1.219,86	Diskarpus
		Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	%	0,82		
		persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	83		
83	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				1.519,18	Diskarpus
		Jumlah arsip statis yang di selamatkan	dokumen	200.000		
URUSAN PILIHAN						
1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
84	Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan				4.641,55	Dinas Perikanan
		Persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas	%	34,04		
85	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				15.813,01	Dinas Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	Ton	26.185,00		
		persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	%	17,92		
86	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				40.668,89	Dinas Perikanan
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	10.004,85		
2.	URUSAN PARIWISATA					
87	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				29.220,19	Disparbud
		Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	5		
88	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				1.332,81	Disparbud
		Jumlah desa wisata	Desa	12		
89	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12.187,32	Disparbud
		Tingkat Pengeluaran Wisatawan.				
		- Wisman	Rp/hari	650.000,00		
		- Wisnus	Rp/	300.000,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
			hari			
		Rata-rata lama menginap				
		- Wisman	Malam	3		
		- Wisnus	Malam	2		
3.	URUSAN PERTANIAN					
90	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				1.730,40	DKPP
		Persentase kelompok tani yang berkualitas	%	Pemula : 30.18		
				Lanjutan : 45.98		
				Madya : 18.04		
				Utama : 5.80		
91	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak				440,51	DKPP
		Angka kesakitan / morbiditas ternak				
		- ternak besar (%)	%	1,10		
		- ternak kecil (%)	%	1,20		
		- ternak unggas (%)	%	1,40		
92	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan				3.067,72	DKPP
		Persentase pelaku usaha pertanian/kelompok tani yang sudah menerapkan teknologi	%	26,21		
93	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan				8.891,43	DKPP
		Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	625.651,13		
		Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama	ton	391.950,52		
		Jumlah produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	168.985,47		
		Jumlah produksi daging	kg	2.299.194		
		Jumlah produksi telur	kg	2.343.043,54		
		Jumlah produksi susu	lt	19.940,62		
4.	URUSAN PERDAGANGAN					
94	Program Peningkatan Efisiensi				575,00	Disperindag
		Persentase serapan resi gudang	%	9,67		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Perdagangan Dalam Negeri					
95	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				553,46	Disperindag
		Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%	83,33		
96	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor				4.589,98	Disperindag
		Nilai Ekspor	Juta US\$	250		
97	Program Peningkatan Sarana Perdagangan				68.298,05	Disperindag
		Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	42,86		
		Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%			
98	Program Standarisasi Alat Ukur					Disperindag
		persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%			
5.	URUSAN PERINDUSTRIAN					
99	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah				3.896,78	Disperindag
		Jumlah sentra industri yang berkembang	sentra	16		
100	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				790,65	Disperindag
		Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	unit/ta hun	120		
6.	URUSAN TRANSMIGRASI					
101	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				237,20	
		Jumlah transmigrasi umum	KK	5		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
102	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				6.144,55	Bappeda
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	75,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	-		
2.	KEUANGAN					
103	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				15.095,78	BPKAD
		Rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD	%	44,35		
		Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	14,56		
		Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	5,00		
		Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	93,00		
		Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	121,05		
		Peningkatan PAD	%	8,85		
		Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	18,93		
		Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	%	40,87		
		Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	78,00		
3.	KEPEGAWAIAN					
104	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				4.156,56	BKD
		Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	100,00		
		Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	%	100,00		
		Persentas kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	100,00		
105	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya				6.935,14	BKD, Setda
		Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan	%	65,06		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Aparatur	Pelatihan				
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	-		
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu	%	-		
4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
106	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian				6.858,16	Bappeda
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan	%	70,00		
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan	%	70,00		
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	70,00		
5.	FUNGSI LAIN					
	SEKRETARIAT DAERAH					
107	Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa				2.388,89	Setda
		persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100,00		
		persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	%	94,57		
108	Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah				1.157,74	Setda
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu	%	100,00		
		Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat	%	100,00		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
		ukuran				
109	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100,00	2.544,77	Setda
110	Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan	Nilai LPPD	opini	sangat memuaskan	1.827,53	Setda
111	Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum	persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	100,00	1.352,01	Setda
112	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100,00	2.552,67	Setda
113	Program Peningkatan Koordinasi dibidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bdkesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi & Pusat	%	100,00	10.092,09	Setda
114	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100,00	361,44	Setda
SEKRETARIAT DPRD						
115	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	35,00	24.849,02	Setwan

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	PENGAWASAN					
116	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan				700,19	Inspektorat
		Zona Integritas pada Kabupaten Jepara	Unit Pelayanan/PD	WBK : 1 WBBM : 1		
117	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan				401,44	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	level	4		
118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				2.814,73	Inspektorat, BKD, Setda
		Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	100,00		
		Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti	%	100,00		
		Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	100,00		
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	-		
	PEMERINTAHAN UMUM					
119	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				42,92	DPMPTSP
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00		
120	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				66.087,20	Semua PD
		Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00		
121	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				6.777,01	Setwan
		Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan	%	100,00		
		persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	-		
122	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala				8.335,72	Setda
		persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	12		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2022		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Daerah/Wakil Kepala Daerah					
124	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				4.378,61	Semua PD
		Persentase Serapan Anggaran	%	100,00		
		Nilai LPPD	opini	sangat memuaskan		
125	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10.211,44	Semua PD
		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	%	100,00		
	TOTAL				1.378.872,12	

Sumber: RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022

Tabel Kegiatan Pembangunan Daerah
dalam RKPDTahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	295.143.045.000	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	154.341.579.000	
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	8.510.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.220.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.400.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	7.290.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.007.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16.556.888.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.860.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	280.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.308.742.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.055.953.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	891.990.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	2.142.446.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	300.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	385.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	880.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5.285.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	857.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13.671.440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79.163.870.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	175.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.316.584.000	
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.190.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	2.940.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	500.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.248.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.905.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	330.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.110.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.121.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	330.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	21.581.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	368.635.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	350.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	970.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	920.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	625.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.792.668.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.289.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	37.601.728.000	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	342.348.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.591.752.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.788.604.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	250.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	300.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	20.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	375.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.293.424.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	410.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.230.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	52.883.154.000	
1	1	2	2.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.600.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	160.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	295.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.433.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	53.254.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	41.352.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	555.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.099.700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.705.000.000	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.325.000.000	
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	700.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	375.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.000.000	
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	380.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.100.000.000	
2	1	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	471.450.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	628.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	1	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000	
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	700.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	1	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	25.000.000	
2	1	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	25.000.000	
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	25.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	68.913.960.000	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.205.206.000	
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	21.585.206.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	200.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	180.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	190.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.699.868.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	6.050.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.569.209.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.300.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	497.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.416.459.000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	100.000.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Hamil		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.737.089.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	60.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	55.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.512.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.420.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.500.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.300.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	38.260.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	75.385.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	894.233.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46.956.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.753.990.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	15.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	940.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	13.152.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	70.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.019.491.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	211.991.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	145.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	500.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.160.714.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.364.036.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.833.377.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.147.620.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.591.298.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.231.929.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.955.495.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.079.784.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.604.457.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.185.353.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.044.312.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.932.372.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.988.796.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.254.794.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.261.603.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.800.826.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.223.882.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.632.697.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.191.281.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.647.769.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.418.396.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2.038.180.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	197.590.000	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	197.590.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.705.000	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	84.705.000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	651.788.000	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	35.656.000	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	35.656.000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	137.944.000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	40.206.000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	97.738.000	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	478.188.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	478.188.000	Dinas Kesehatan
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	578.433.000	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88.664.000	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88.664.000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	454.294.000	
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	454.294.000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	28.125.000	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	28.125.000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	7.350.000	
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	7.350.000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	370.000.000	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	80.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	200.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	90.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.160.714.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.345.000.000	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.216.350.000	
1	3	2	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	7.216.350.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.128.650.000	
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.955.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.958.650.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.215.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.660.440.000	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.660.440.000	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	328.260.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.832.180.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.989.560.000	
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.989.560.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	729.840.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.984.720.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	19.797.500.000	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.797.500.000	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	17.692.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.855.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.980.000.000	
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.980.000.000	
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.980.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	30.725.737.000	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	30.725.737.000	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	30.475.737.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.535.000.000	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.535.000.000	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.535.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	72.650.000.000	
1	3	1	2.01		Penyelenggaraan Jalan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		0			Kabupaten/Kota	72.650.000.000	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	29.795.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	8.030.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.425.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	4.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.250.000.000	
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	650.000.000	
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
1	3	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PERUMAHAN	2.758.933.000	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000	
1	4	2	2.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	25.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	580.000.000	
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	180.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000	
1	4	2	2.04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.738.933.000	
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.738.933.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	290.000.000	
1	4	2	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	290.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	34.635.000.000	
1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	90.000.000	
1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	90.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	300.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	34.245.000.000	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	30.600.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.600.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.845.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.088.480.000	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.088.480.000	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.088.480.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000	
1	4	6	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	100.000.000	
1	4	6	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.071.000.000	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	729.000.000	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	438.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	150.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	10.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	342.000.000	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	157.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	35.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	555.000.000	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	535.000.000	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	21.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	300.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	20.000.000	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	20.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	575.231.000	
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	30.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	408.431.000	
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	52.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	189.431.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	90.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	125.500.000	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	33.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	22.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11.300.000	
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	11.300.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.113.088.000	
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.113.088.000	
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.082.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30.588.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	30.000.000	
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000	
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.773.753.000	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	955.500.000	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	255.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	818.253.000	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	575.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	217.753.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.185.810.000	
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.185.810.000	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	380.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.555.810.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	320.000.000	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	245.000.000	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	245.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	75.000.000	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.000.000	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	1	3	2		PROGRAM PENATAAN DESA	916.640.000	
2	1	3	2	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	916.640.000	
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	916.640.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1	3	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.974.600.000	
2	1	3	4	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.974.600.000	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	65.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	134.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	480.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	40.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.665.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.030.800.000	
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.030.800.000	
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60.800.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	70.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	260.473.000	
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	81.883.000	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	58.283.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	23.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.590.000	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	178.590.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	386.170.000	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	52.190.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	52.190.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	333.980.000	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.030.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	323.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	28.765.000	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.765.000	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	28.765.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	244.904.000	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	164.904.000	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.705.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.199.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	19.245.000	
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.245.000	
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.245.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	84.403.500	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	20.355.000	
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	20.355.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	64.048.500	
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	14.444.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	49.604.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.779.739.500	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.445.253.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	197.372.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	95.113.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.152.768.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.119.389.000	
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	42.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.076.789.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.339.683.000	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.363.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.876.063.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.305.971.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	39.706.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	13.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	13.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	875.414.500	
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	33.519.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	790.528.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	51.367.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.225.831.000	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.178.068.000	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	147.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	594.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	155.318.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	47.763.000	
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	47.763.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	740.000.000	
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	130.000.000	
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	610.000.000	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	430.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	900.000.000	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	870.000.000	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	670.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80.000.000	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	2	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.118.000.000	
3	2	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	470.000.000	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	345.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.648.000.000	
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	260.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	880.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	508.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.100.000.000	
3	2	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	60.000.000	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	4.920.000.000	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	2.100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tani		
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.370.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	120.000.000	
3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	250.000.000	
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	90.000.000	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	150.000.000	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	150.000.000	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	985.000.000	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	985.000.000	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	425.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	480.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	1	1	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	425.000.000	
2	1	1	2	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	265.000.000	
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	2	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	160.000.000	
2	11	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	
2	1	1	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.380.146.000	
2	1	1	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.380.146.000	
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	344.401.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.008.745.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	27.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	
2	1	1	5	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	50.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100.000.000	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000	
2	11	0	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	75.000.000	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.074.863.000	
2	11	1	2.01		Pengelolaan Sampah	20.074.863.000	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18.625.863.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.449.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	57.700.000	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	57.700.000	
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	57.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	1	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	330.000.000	
2	1	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	320.000.000	
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	320.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	10.000.000	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	205.000.000	
2	1	2	3.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	195.000.000	
2	12	3	3.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	120.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	3.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	75.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	3.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.000.000	
2	12	3	3.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	10.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	595.000.000	
2	1	2	4.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	475.000.000	
2	12	4	4.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	475.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	4.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120.000.000	
2	12	4	4.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	50.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	4.03	8	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	70.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	40.000.000	
2	1	2	5.01		Penyusunan Profil Kependudukan	40.000.000	
2	12	5	5.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	20.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.771.239.000	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.545.851.000	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.195.851.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	350.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	200.000.000	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	500.388.000	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.388.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	325.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	300.000.000	
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000	
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	40.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	40.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.859.086.000	
2	15	3	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	484.086.000	
2	15	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	484.086.000	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	
2	15	3	2.07	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4.200.000.000	
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.400.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	650.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	150.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.500.000.000	
2	15	4	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	2.500.000.000	
2	15	4	2.01	1	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	2.500.000.000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	430.000.000	
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	430.000.000	
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	200.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	230.000.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	1 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	1 6	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.544.700.000	
2	1 6	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.544.700.000	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	268.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	179.100.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	55.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	880.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	81.600.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	81.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.837.500.000	
2	1 6	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	710.000.000	
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	710.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.127.500.000	
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	85.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	35.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	35.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	45.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1.892.500.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	2 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	2 0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	2	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	26.045.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	128.065.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	24.370.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	21.520.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	12.500.000	
2	2	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000	
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	75.000.000	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	75.000.000	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	75.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.527.595.000	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.475.595.000	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.475.595.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.000.000	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000	
2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	20.000.000	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	194.478.750	
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	78.125.000	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	13.125.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	27.353.750	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	10.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	17.353.750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	57.000.000	
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	17.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	25.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110.799.500	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	48.435.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kabupaten/Kota		
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	16.315.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	6.120.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	26.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	62.364.500	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.875.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	13.070.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	34.419.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	20.000.000	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	38.500.000	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	38.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	301.165.000	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.165.000	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	301.165.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	119.000.000	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	119.000.000	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	32.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	75.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.457.774.000	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.457.774.000	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.457.774.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	38.393.750	
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.393.750	
3	32	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.403.750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.990.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PELAYANAN DASAR		
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	297.000.000	
2	1	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	247.000.000	
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	247.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	150.000.000	
2	1	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	85.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	80.000.000	
2	1	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	80.000.000	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	418.962.000	
2	1	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	418.962.000	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	117.982.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	259.676.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	41.304.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.000.000	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.450.000.000	
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000.000	
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	945.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	420.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	35.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2	22	2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	20.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	30.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	40.000.000	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	40.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	150.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	22	5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	2	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000	
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	50.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	2	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	675.200.000	
2	2	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	675.200.000	
2	22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	225.200.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	6	2.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	375.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	75.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	2	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	2	6	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	80.531.152.000	
3	2	6	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.700.000.000	
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	6	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	
3	26	2	2.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	6	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	77.431.152.000	
3	26	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	64.881.152.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.100.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	900.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	6	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.165.200.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	2	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.165.200.000	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	420.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	25.200.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	2	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.020.000.000	
3	2	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.020.000.000	
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	470.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	540.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	10.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	2	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	2	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	590.000.000	
2	2	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	200.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	2 3	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	20.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	15.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	2 4	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	295.000.000	
2	2 4	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	134.030.000	
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	104.030.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	30.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2 4	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	23.970.000	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	23.970.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2 4	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	137.000.000	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	64.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	73.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	2 4	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	15.000.000	
2	2 4	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	15.000.000	
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	15.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	2 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	2 5	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.425.040.000	
3	2 5	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	155.040.000	
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	155.040.000	Dinas Perikanan
3	2 5	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.680.000.000	
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.680.000.000	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	2	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	590.000.000	
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	590.000.000	Dinas Perikanan
3	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.552.520.000	
3	2	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.620.000.000	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1.125.000.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	495.000.000	Dinas Perikanan
3	2	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.932.520.000	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.934.765.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	742.755.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50.000.000	Dinas Perikanan
3	2	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	482.000.000	
3	2	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	345.000.000	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	345.000.000	Dinas Perikanan
3	2	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	137.000.000	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	137.000.000	Dinas Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	3	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.452.520.000	
3	3	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.452.520.000	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	250.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.202.520.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	220.000.000	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	120.000.000	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	300.000.000	
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	150.000.000	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	150.000.000	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	450.000.000	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	450.000.000	
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	370.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	3	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.477.399.000	
3	3	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.477.399.000	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.377.399.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.000.000	
3	3	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	359.850.000	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	219.850.000	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	15.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	24.850.000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	180.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	140.000.000	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	140.000.000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.545.568.000	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.545.568.000	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.626.481.000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	21.869.087.000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.050.000.000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	930.000.000	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	930.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	150.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	650.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	130.000.000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.108.358.000	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	830.000.000	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	80.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	550.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	200.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.278.358.000	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3.128.358.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50.000.000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	355.000.000	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	355.000.000	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	85.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	170.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100.000.000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	797.900.000	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	797.900.000	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	370.400.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	260.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	167.500.000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	2				SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.521.551.000	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.462.136.000	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.033.693.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.890.460.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	2.062.435.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	182.040.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	293.508.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.127.264.000	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	406.874.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	248.294.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	617.922.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	248.294.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	605.880.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.475.000.000	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.500.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.500.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.500.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.500.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	475.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.303.782.800	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	2.037.904.800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	583.678.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	288.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.200.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.745.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	150.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	2.545.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	635.150.000	
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	635.150.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	2.773.218.200	
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	120.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.448.380.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.204.838.200	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	1				PERENCANAAN		
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	889.020.000	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	610.000.000	
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	115.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65.000.000	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	214.020.000	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84.020.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.094.230.000	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	501.424.000	
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	351.424.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	380.000.000	
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	279.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	101.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	212.806.000	
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	212.806.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.290.000.000	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	75.000.000	
5	5	2	2.01	7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	325.000.000	
5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	175.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	350.000.000	
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	540.000.000	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	160.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	165.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	180.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	2				KEUANGAN		
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	479.152.458.400	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.885.505.000	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	110.559.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.025.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	122.005.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	92.575.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	53.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	544.650.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	372.135.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	380.556.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	15.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.087.584.200	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	216.424.200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	183.080.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	558.080.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	383.600.000	
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	18.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	45.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	20.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	475.795.769.200	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	436.666.895.800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	24.128.873.400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.762.760.000	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.762.760.000	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	56.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	56.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	102.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.090.900.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	30.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	137.860.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.439.564.200	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.439.564.200	
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	309.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	797.939.200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	2.903.984.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	264.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	163.941.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	3				KEPEGAWAIAN		
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.740.000.000	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.870.000.000	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.500.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	140.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	70.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	35.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	55.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	650.000.000	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	70.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	550.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	85.000.000	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	50.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135.000.000	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	15.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	90.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.746.839.000	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	1.080.000.000	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	600.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	480.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.666.839.000	
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	307.411.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.359.428.000	Badan Kepegawaian Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	1				INSPEKTORAT DAERAH		
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	685.000.000	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	635.000.000	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	360.000.000	Inspektorat
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	100.000.000	Inspektorat
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	175.000.000	Inspektorat
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	50.000.000	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50.000.000	Inspektorat
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	845.618.000	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	345.618.000	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	345.618.000	Inspektorat
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	500.000.000	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	Inspektorat
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	350.000.000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.000.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.000.000	Kecamatan Kedung
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.750.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.750.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.750.000	Kecamatan Kedung
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.500.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.500.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.500.000	Kecamatan Kedung
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.000.000	Kecamatan Kedung
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.500.000	Kecamatan Kedung
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	Kecamatan Kedung
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.000.000	Kecamatan Kedung
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.500.000	Kecamatan Kedung
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.580.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.580.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.580.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.000.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pemberdayaan Desa	33.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.000.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.500.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.500.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.500.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	67.750.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.750.000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.500.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.750.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.250.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.500.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.750.000	Kecamatan Pecangaan
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	Kecamatan Pecangaan
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.750.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.750.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.750.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.204.500	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.204.500	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.204.500	Kecamatan Kalinyamatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.500.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.500.000	Kecamatan Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.395.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.395.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.820.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.075.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.500.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan PELAYANAN PUBLIK	2.120.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.120.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.120.000	Kecamatan Welahan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.360.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.360.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.360.000	Kecamatan Welahan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.160.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.160.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.160.000	Kecamatan Welahan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.945.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.945.000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.180.000	Kecamatan Welahan
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.200.000	Kecamatan Welahan
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.600.000	Kecamatan Welahan
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.120.000	Kecamatan Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.845.000	Kecamatan Welahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.000.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.000.000	Kecamatan Mayong
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.510.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.510.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.510.000	Kecamatan Mayong
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.875.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.875.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.875.000	Kecamatan Mayong
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.860.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.860.000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.330.000	Kecamatan Mayong
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.410.000	Kecamatan Mayong
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.580.000	Kecamatan Mayong
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.330.000	Kecamatan Mayong
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.210.000	Kecamatan Mayong
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.309.000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10.000.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	Kecamatan Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.309.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.309.000	Kecamatan Nalumsari
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.450.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.450.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.450.000	Kecamatan Nalumsari
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	Kecamatan Nalumsari
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.077.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.077.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.077.000	Kecamatan Nalumsari
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.000.000	Kecamatan Batealit
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.000.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.000.000	Kecamatan Batealit
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	Kecamatan Batealit
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	Kecamatan Batealit
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	Kecamatan Batealit
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.000.000	Kecamatan Batealit
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000	Kecamatan Batealit
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.150.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.150.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.150.000	Kecamatan Tahunan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.681.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.681.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.681.000	Kecamatan Tahunan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.609.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.609.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.609.000	Kecamatan Tahunan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.457.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.457.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.480.000	Kecamatan Tahunan
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.584.000	Kecamatan Tahunan
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.660.000	Kecamatan Tahunan
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.282.000	Kecamatan Tahunan
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.451.000	Kecamatan Tahunan
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000	Kecamatan Jepara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.618.400.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.000.000	Kecamatan Jepara
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.573.400.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	38.500.000	Kecamatan Jepara
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	550.000.000	Kecamatan Jepara
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	984.900.000	Kecamatan Jepara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	Kecamatan Jepara
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72.500.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.500.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000	Kecamatan Jepara
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	Kecamatan Jepara
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	Kecamatan Jepara
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.500.000	Kecamatan Jepara
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.000.000	Kecamatan Mlonggo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.000.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.000.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.000.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.000.000	Kecamatan Mlonggo
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.358.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.358.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.358.000	Kecamatan Pakisaji
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.000.000	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.395.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.395.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.500.000	Kecamatan Pakisaji
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.500.000	Kecamatan Pakisaji
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.395.000	Kecamatan Pakisaji
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.800.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.800.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17.800.000	Kecamatan Bangsri
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.130.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.130.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.130.000	Kecamatan Bangsri
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.610.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.610.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.610.000	Kecamatan Bangsri
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	70.125.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.125.000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.325.000	Kecamatan Bangsri
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.790.000	Kecamatan Bangsri
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.070.000	Kecamatan Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.180.000	Kecamatan Bangsri
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.760.000	Kecamatan Bangsri
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.930.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.930.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.930.000	Kecamatan Kembang
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	Kecamatan Kembang
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.065.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.065.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.065.000	Kecamatan Kembang
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.101.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.101.000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.535.000	Kecamatan Kembang
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.695.000	Kecamatan Kembang
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.640.000	Kecamatan Kembang
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.535.000	Kecamatan Kembang
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.696.000	Kecamatan Kembang
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.780.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.780.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.780.000	Kecamatan Keling
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.386.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.386.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.386.000	Kecamatan Keling
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.418.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.418.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.418.000	Kecamatan Keling
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.094.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.094.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.950.000	Kecamatan Keling
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.916.000	Kecamatan Keling
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.390.000	Kecamatan Keling
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6.838.000	Kecamatan Keling
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.200.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.200.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.200.000	Kecamatan Donorojo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.214.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.360.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.360.000	Kecamatan Donorojo
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.854.000	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.854.000	Kecamatan Donorojo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	6.080.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					UMUM		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.080.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.080.000	Kecamatan Donorojo
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.362.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.362.000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.740.000	Kecamatan Donorojo
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.292.000	Kecamatan Donorojo
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.090.000	Kecamatan Donorojo
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.480.000	Kecamatan Donorojo
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.760.000	Kecamatan Donorojo
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1				KECAMATAN		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	762.120.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	762.120.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	762.120.000	Kecamatan Karimunjawa
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.171.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.171.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.171.000	Kecamatan Karimunjawa
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.908.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.908.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.908.000	Kecamatan Karimunjawa
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.633.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.633.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.050.000	Kecamatan Karimunjawa
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.640.000	Kecamatan Karimunjawa
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.943.000	Kecamatan Karimunjawa
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.364.393.190	
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	230.000.000	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	230.000.000	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	230.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.523.669.190	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.523.669.190	
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.523.669.190	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	105.000.000	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	105.000.000	
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	105.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	237.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	237.000.000	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	237.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	250.000.000	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	250.000.000	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL						2.753.450.538.684	

Data Bersumber dari Bappeda Kabupaten Jepara.

C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar Belakang

Salah satu tugas Pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat itu sendiri.

Disamping itu fungsinya komponen mempercepat kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat daya saing daerah terhadap produk-produk yang dihasilkan serta birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, transparan dan akuntabel. Oleh karenanya dalam rangka

mencapai arah yang jelas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dengan jelas dan tegas terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, sehingga pada masing-masing tingkatan pemerintahan, sehingga pada masing-masing tingkatan pemerintahan dapat dengan terus melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, tidak terkecuali dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Tramtibum dan Linmas
6. Urusan Sosial

2. Dasar Hukum

Agar supaya pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat mudah untuk dievaluasi, maka perlu peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 8 ayat (2);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial;

- e. Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal PUPR;
- f. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan;
- g. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah kabupaten / Kota;
- h. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota;
- i. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- j. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/868/Bangda tanggal 13 Februari 2018 tentang Pelaksanaan SPM;
- m. Peraturan Bupati Jepara Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jepara Tahun 2022

3. Kebijakan Umum

Bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Jepara harus ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian agar kegiatan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar bagi masyarakat terakomodir dalam program-program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Langkah-langkah adaptif yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Organisasi Perangkat Daerah sebagai pendukung Penerapan Standar

Pelayanan Minimal, terutama yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Jepara, meliputi :

a. Pendataan / Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui jumlah dan identitas lengkap warga masyarakat yang berhak memperoleh barang / jasa terhadap kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah Perangkat Daerah melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dimaksudkan agar diketahui selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang / jasa serta sarana dan atau prasarana atas dasar jumlah warga masyarakat penerima pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan standar biaya yang berlaku.

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Setelah dilakukan pengumpulan data terhadap kebutuhan pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasarnya serta sudah diketahui dari penghitungan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, maka tahap selanjutnya adalah Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai penghitungan yang telah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, oleh karena itu Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan harus memastikan bahwa program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan bahwa anggaran program dan kegiatan terhadap pemenuhan pelayanan dasar sudah masuk dalam APBD.

4. Arah dan Kebijakan

Guna memastikan komitmen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jepara, langkah selanjutnya adalah mengawal program dan kebijakan yang telah masuk pada RKPD untuk dibahas bersama DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam satu tahun anggaran yang akan datang. Komitmen dari anggota DPRD terutama yang ada di Badan Anggaran sangat menentukan sekali atas realisasi terhadap rencana pemenuhan pelayanan dasar. Apabila dalam pembahasan KUA PPAS dapat disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jepara maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dalam RAPBD Kabupaten Jepara. Didalam pemenuhan kebutuhan jenis pelayanan dasar masyarakat yang diukur dari capaian masing-masing indikator, maka untuk mewujudkannya setiap tahun pada APBD harus melaksanakan kegiatan pada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang telah di SPM-kan sesuai kemampuan anggaran daerah, dan kegiatan-kegiatan tersebut mendasarkan pada program yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Secara umum pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Jepara telah berjalan dengan baik dan telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian dan non kementerian terkait.

5. Landasan Penyusunan.

Karena PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum diberlakukan secara penuh terhadap penyusunan laporan SPM tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, maka berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se Jawa Tengah dengan Pemprov Jawa Tengah Cq. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu untuk mengetahui capaian program pada masing-masing indikator RPJMD dan RPD perlu adanya pembandingan dua tahun anggaran sebelumnya sehingga dapat ditentukan target dan capaian untuk Standar Pelayanan Minimal selanjutnya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Capaian Kinerja Makro

Indikator kinerja makro yang memuat Indeks Pembangunan manusia sampai dengan Rasio Gini, data yang disajikan adalah tahun 2021 dan tahun 2022 yang diambil berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Jepara.

Tabel 1.19
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,36	73,15
2	Angka Kemiskinan	7,44	6,88
3	Angka Pengangguran	4,23	4,10
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,63*	5,95**
5	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah)	26,96*	29,34**
6	Ketimpangan Pendapatan	0,329	0,342

Data BPS Kabupaten Jepara Tahun 2023
*Angka Sementara.
**Angka sangat Sementara.

II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).

❖ Urusan Pendidikan.

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Untuk urusan pendidikan capaian kinerjanya diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci keluaran, yaitu :

1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta).

Di Kabupaten Jepara, pada tahun 2022 dari 958 PAUD yang ada, 524 unit PAUD sudah terakreditasi atau capaian kinerjanya sebesar 53.31%.

2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.

Di sepanjang tahun 2022, dari 45.113 peserta didik PAUD, baik negeri maupun swasta semuanya sudah menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa).

Dari 45.113 siswa PAUD (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 332 yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa) di sepanjang tahun 2022 0,74%.

4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak 2.949 orang.

5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta).

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara memiliki 3.179 orang pendidik.

6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.

Pendidik pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada tahun 2022 sebanyak 1.830 orang pendidik dari 3.179 orang pendidik yang ada. .

7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Dari 873 orang kepala sekolah PAUD di Kabupaten Jepara, jumlah Kepala Sekolah yang memiliki ijazah sebanyak 679 orang 77,78%

8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi.

Sampai dengan tahun 2022, SD dan SMP negeri di Kabupaten Jepara yang terakreditasi sebanyak 689 unit dari 698 unit SD dan SMP yang ada.

9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.

Dari 77.099 peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang ada di Jepara sudah seluruhnya menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.

10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah. Dari 26.868 peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, seluruhnya sudah mendapat perlengkapan dasar dari Pemkab Jepara.

11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.

Dari 77.099 siswa yang ada di Kabupaten Jepara, sebanyak 30.692 siswa yang bebas biaya pendidikan atau capaiannya sebesar 39,81%.

12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara terdapat 26.868 siswa SMP. Pada tahun yang sama terdapat 13.181 siswa yang bebas biaya pendidikan atau sebesar 49,06%.

13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).

Kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Jepara sebanyak 5.169 orang.

14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).

Kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 2.643 orang.

15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.

Pada tahun 2022 terdapat 4.835 orang pendidik pada jenjang Sekolah Dasar.

16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).

Pada tahun 2022 terdapat 2.303 orang pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, baik negeri maupun swasta.

17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).

Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 2.396 orang.

18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).

Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 594 orang.

19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).

Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 781 orang.

20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).

Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 431 orang.

21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat.
Tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara sebanyak 4.576 orang.
22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.
Tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak 1.533 orang.
23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara dari 409 orang kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta), yang sudah memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 373 orang sebesar 91,20%
24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara dari 91 orang kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta), yang sudah memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 55 orang. Capaian 50,05%

25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.
Dari 801 orang tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) ada 607 orang yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau capaiannya sebesar 75,78%.
26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.
Dari 313 orang tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) ada 227 orang yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau capaiannya sebesar 72,52%.
27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).
Di tahun 2022, dari 16 PKBM yang ada di Jepara ada 10 unit PKBM yang sudah terakreditasi atau capainya sebesar 62,50%.
28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah.
Dari 1.621 peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sudah seluruhnya menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah atau capaiannya sebesar 100%..
29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.
Dari 1.621 siswa paket A dan B yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2022, sejumlah 1.295 peserta didik menerima pembebasan biaya pendidikan atau 79,89%.
30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).
Kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak 151 orang.

31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) di kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 82 orang.

32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebanyak 34 orang.

33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Di tahun 2022, ada 1 kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1.

Sedangkan kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sebanyak 1 orang pada tahun 2022

❖ **Kesehatan**

Memiliki luas wilayah 100.413.189 Ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Wilayah Jepara memiliki kontur tanah yang beragam, termasuk wilayah perairan atau kepulauan yang terletak cukup jauh dari ibukota kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup padat, masalah kesehatan sudah tentu menjadi masalah yang cukup serius bagi Kabupaten Jepara. Memiliki 1 rumah sakit negeri dan beberapa rumah sakit swasta dan klinik kesehatan dengan tenaga medis yang tersedia,

diharapkan mampu mendorong terciptanya kesehatan yang baik bagi masyarakat. Untuk Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Dengan dukungan anggaran serta pegawai, baik PNS maupun THL yang bertugas di berbagai tempat seperti di Puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Jepara, diharapkan mampu melayani kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat Jepara.

Untuk urusan kesehatan capaian kinerjanya diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci Keluaran, yaitu :

1. Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.
Sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Jepara memiliki 6 rumah sakit rujukan.
2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.
Akreditasi rumah sakit diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu sebuah rumah sakit dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan. Bagi rumah sakit sendiri, akreditasi bisa menjadi cara untuk mengukur kinerja rumah sakit. Di Kabupaten Jepara, sampai dengan tahun 2022 ada 6 unit rumah sakit yang sedang dipersiapkan akreditasinya.
3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.
Dukungan logistic kesehatan yang tersedia bagi ibu hamil terdiri dari 4.986 paket dengan rincian 1.500 leaflet gizi ibu hamil, 136 foam OVM , 3.350 susu ibu hamil dan buku KIA
4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal
Sampai dengan tahun 2022, ada 204 dokter dan 559 bidan yang menangani pelayanan antenatal.
5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.
Kabupaten Jepara pada tahun 2022 menyiapkan dukungan logistik yang disediakan untuk pelayanan persalinan sebanyak 1.620 dengan rincian sebagai berikut : 120 paket PMT ibu nifas, 1.500 leaflet ibu menyusui
6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat).

- Untuk jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sebanyak 204 Dokter PONE: 599 bidan di puskesmas dan RS
7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir.
- Dukungan logistik yang disediakan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir tersedia 114 Form OVP.
8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar.
- Sedangkan untuk SDM yang ada sebanyak 204 Dokter dan 599 bidan.
9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk kesehatan balita.
- Untuk kepentingan kesehatan balita, Pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan dukungan logistik sebanyak 10.863 terdiri dari 1.133 Posyandu, 9.730 sachet formula 100
10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
- SDM yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sebanyak 204 dokter 559 bidan 5.752 kader posyandu
11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk anak usia pendidikan dasar.
- Untuk tahun 2022 sebanyak 22 paket alat pemeriksa hb remaja putri buku rapor kesehatan
12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.
- SDM yang menangani kesehatan anak usia dasar yaitu 1.101 orang terdiri dari 755 Guru UKS SD/MI; 210 Guru UKS SMP/MTs, dan 136 SMA, SMK, M
13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- Logistik yang disediakan untuk kategori ini yaitu : 174 Posbindu Kit.

14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Pada tahun 2022 Untuk mendukung kesehatan penduduk usia 15-59 tahun, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki 1.022 orang terdiri dari, 22 programer PTM Puskesmas, 1.000 kader Posbindu.
15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki 549 paket terdiri dari, 313 Posyandu lansia, 74 Lansia Kit, 22 Puskesmas Santun Lansia, Buku Panduan Caregiver bagi Lansia. 140 buku panduan caregiver bagi lansia
16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar.
Tersedia Dokter sebanyak 22 orang dokter puskesmas, 22 Programmer Lansia (Perawat/Bidan).
17. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita hipertensi yang tersedia sesuai standar.
Ada 174 Posbindu kit yang disediakan bagi penderita hipertensi pada tahun 2022
18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar.
Ada 22 programer PTM Puskesmas dan 1.000 kader Posbindu. Dengan jumlah paket 1.022
19. Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita DM yang tersedia.
Ada 174 Posbindu yang melayani penderita Diabetes Melitus (DM) 10.254 terdiri dari 174 posbindu kit , 10.080 dus tes gula darah
20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar
Ada 22 programer PTM Puskesmas dan 1.000 kader Posbindu.

21. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita ODGJ berat yang tersedia tahun 2022 sebanyak 29 buku pedoman kesehatan jiwa
22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ berat sesuai standar.
Sedangkan pada tahun 2022 SDM yang bertugas melayani penderita ODGJ berat yaitu sebanyak 3 tenaga kesehatan , 2 perawat dan 1 dokter terlatih.
23. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita TBC yang tersedia sesuai standar pada tahun 2022
Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para penderita penyakit TBC, telah disediakan logistic kesehatan sebanyak 14.057 paket berupa : FDC Kat I = 350 paket Kombipak = 24 paket, FDC Anak = 150 paket, pot sputum = 8.000 buah, kaca slide= 54 buah, reagen Zn= 135 paket catridge TCM= 5.344 tes
24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar.
Untuk mendukung logistic kesehatan yang sudah disediakan, 25 dokter TB terlatih 20, 25 perawat TB terlatih, 25 Laborat TB Terlatih
25. Jumlah dukungan logistik kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.
Pada tahun 2022 disediakan 24.325 rapid HIV dan 1.125 rapid 2 HIV.
26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.
Terdapat 2 dokter, 2 perawat, 2 rekam medis, 2 apoteker, 2 ATLM, 1 Bidan.

❖ **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Jepara berada dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu terkait perijinan.

Capaian kinerja urusan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kunci Output sebagai berikut :

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab (ha).
Di Kabupaten Jepara memiliki 97 kewenangan atas kawasan permukiman rawan banjir.
2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab (m).
Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten Jepara sepanjang 13.050 meter.
3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai kewenangan kab (ha).
Di Kabupaten Jepara memiliki 700 Ha luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten.
4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di Wilayah Sungai kewenangan kab (m).
Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi ada 2.040 M yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kewenangan kab.
Di tahun 2022, Kabupaten Jepara telah memiliki Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten yaitu Keputusan Bupati Jepara No. 520/421 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Jepara.
6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten.
Di tahun 2022, Kabupaten Jepara telah memiliki Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten Wilayah Sungai

Kewenangan kabupaten yaitu Keputusan Bupati Jepara No. 520/421 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Jepara.

7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten.

Kabupaten Jepara telah memiliki prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten yaitu berupa Penguat tebing sepanjang 4 yaitu bangunanperkuatan tebing, tanggul sungai, pintu air, dan pompa air

8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik.

Dari total panjang jaringan irigasi primer yaitu 10.596 meter, yang dalam kondisi baik sepanjang 4.238,4 meter atau 40%.

9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik.

Dari total panjang jaringan irigasi sekunder yaitu 1.249.933 meter, yang dalam kondisi baik sepanjang 568.992,12 meter atau 45,52%.

10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik.

Pada tahun 2022, dari seluruh jaringan irigasi tersier yaitu sepanjang 13.810 meter, yang dalam kondisi baik sebesar 4.143 meter atau 0,30%.

11. Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara sudah memiliki dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten, Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana induk sistem penyediaan air minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040.

12. Tersusun dan ditetapkan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara telah menetapkan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten.

13. Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaran SPAM

Di Kabupaten Jepara ada 1 (satu) buah BUMD yang menyelenggarakan SPAM yaitu PDAM.

14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM.
Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM yaitu sebanyak 8 izin.
15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.
Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara melakukan kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain tentang rencana induk sistem penyediaan air minum kab. Jepara tahun 2020-2040
16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S.
Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 terdapat 299.371 rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S.
17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.
Sampai dengan tahun 2022, ada 300 unit rumah yang menggunakan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.
18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T.
Sedangkan rumah yang menggunakan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T sebanyak 299.671 unit rumah.
19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja.
Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022, rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja sebanyak 193 rumah.

20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.
Di Kabupaten Jepara, sebanyak 193 rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.
21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik kabupaten jepara tahun 2021 sebanyak 193.
22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar.
Dari 402.129 rumah di wilayah pengembang SPALD S yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk sebanyak 299.371. rumah dengan capaian 74,45%.
23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman.
Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T sebanyak 193 rumah dari total 402.129 rumah di wilayah pengembangan SPALD T. 0,048%
24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman.
Dari total rumah di wilayah pengembangan SPALD T yaitu 402.129 rumah, sebanyak 300 rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T
25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat
Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat sebanyak 299.371 rumah, dari 402.129 rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S.
26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia sebanyak 193 sedangkan yang dibutuhkan 402.129 dengan capaian 0,048%
27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja
Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia pada tahun 2022 sebesar 16,61%
28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD.
Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD sebanyak 300 rumah dari total 300 rumah yang dilayani dengan SPALD-T di Kabupaten Jepara

dengan capaian 100%

29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja.

Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot pada tahun 2022 dalam wilayah pengembangan SPADLD-S sebesar 0,064%.

30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi.

Dari 43 bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang ada di Jepara hanya 11 yang baik dan fungsi 25,58%

31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan sebanyak 918 izin.

32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung.

Tahun 2022, Kabupaten Jepara telah memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung yaitu Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011

33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara telah memiliki Keputusan Bupati tentang penetapan tim ahli bangunan gedung

34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan.

Pada tahun 2022 Kabupaten Jepara memiliki 36 bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan.

35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten.

Pada tahun 2022 Jepara memiliki 163 bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten.

36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten.

- Ada 163 bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2022
37. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/dirawat.
Sampai dengan tahun 2022, di Kabupaten Jepara ada 163 bangunan yang dipelihara.
38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten.
Jalan kewenangan kabupaten yang ditetapkan kepala daerah dalam SK adalah sepanjang 872.142 kilometer.
39. Panjang jalan yang dibangun
Pada tahun 2022, panjang jalan yang dibangun adalah 15.818,3 kilometer.
40. Panjang jembatan yg dibangun
Tahun 2022, pembangunan jembatan di kabupaten jepara mencapai 16,0 meter.
41. Panjang jalan yang ditingkatkan.
Ada 31,310,4 kilometer jalan yang ditingkatkan sepanjang tahun 2022.
42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan.
Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan adalah 16,0 meter.
43. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi.
Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 15,492,1 kilometer.
44. Panjang jembatan yang direhabilitasi.
Jembatan yang direhabilitasi pada tahun 2022 sepanjang 23,6 meter
45. Panjang jalan yang dipelihara.
Sedangkan jalan yang dilakukan pemeliharaannya sepanjang 31.172,3 kilometer.
46. Panjang jembatan yang dipelihara.
Pada tahun 2022 Panjang jembatan yang dipelihara sepanjang 19,8 meter
47. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten.

Tahun 2022, tidak ada Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten Jepara.

48. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten.

Ada pada tahun 2022 ada 73 tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten Jepara.

49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten.

Ada 27 orang tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten Jepara.

50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir.

ada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir, terdapat pada SK Kepala DPUPR Nomor 061 tahun 2022

51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBD

Pada tahun 2022 1.154 paket data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBD yaitu Potensi Pasar Jasa Konstruksi/RUP 2022

52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN.

Pada tahun 2022 Ada 13 paket data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN yaitu Potensi Pasar Jasa Konstruksi/RUP 2022

53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya.

Pada tahun 2022 tersedia 23 paket data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari pendanaan lainnya.

54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.

Pada tahun 2022 tersedia 1.190 paket data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.

55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten.

Kabupaten Jepara memiliki data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten yaitu Perbup SOTK.

56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.

Tidak tersedia data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.

57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.

Di Kabupaten Jepara tidak tersedia data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.

58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota.

Pada tahun 2022 Di Kabupaten Jepara tersedia 46 data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota.

59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.

Tahun 2022 di Kabupaten Jepara tidak tersedia data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.

60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

Tidak tersedia data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Tidak tersedia data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Untuk data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya di Kabupaten Jepara tersedia dan di kabupaten jepara tidak terjadi kecelakaan kontruksi.

63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Untuk data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak tersedia.

64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten.

Pada tahun 2022 Badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten Jepara sebanyak 570

65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten.

Pada tahun 2022 tidak ada perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten Jepara.

66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten.

Pada tahun 2022 ada 277 badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten Jepara.

67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.

Pada tahun 2022 tidak ada badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten Jepara.

68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

Pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui tidak ada

69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Tahun 2022 tidak ada pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Tidak ada pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi

usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya.
Pada tahun 2022, ada 178 kawasan rawan bencana dan direncanakan penanganannya.
2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam.
Rumah yang terkena bencana alam sebanyak 34 unit rumah.
3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.
Ada 34 orang yang rumahnya terkena bencana alam pada tahun 2022.
4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi.
Dari 34 rumah yang terkena bencana alam, seluruhnya sudah direhabilitasi sesuai rencana aksi.
5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi.
Dari 34 rumah yang terkena bencana alam, seluruhnya sudah dibangun kembali sesuai rencana aksi.
6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi.
Pada tahun 2022 tidak ada
7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
Terkait dengan bencana alam yang terjadi, di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jepara tidak menyiapkan rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana.
8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi.
Seluruh korban bencana alam yaitu sebanyak 34 orang telah terfasilitasi.

9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.

Pada tahun 2022, luasan dan lokasi pencadangan lahan pada tahun 2022 tidak ada atau 0

10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM.

Di tahun 2022, rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada

11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM.

Rumah tangga yang menerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada

12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM.

Rumah tangga yang menerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada kegiatannya

13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.

Sedangkan rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2022 tidak ada kegiatannya

14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.

Pada tahun 2022, rumah tangga penerima layanan mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2022 tidak ada kegiatannya

15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah
Pada tahun 2022 tidak ada kegiatan Pengadaan tanah untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintahan
16. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha.
Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 67,73 ha
17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH
Peningkatan RTLH sebanyak 14,464 unit.
18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh.
Penanganan infrastruktur kawasan kumuh seluas 87,07 hektar.
19. Jumlah rumah di kabupaten.
Jumlah rumah di Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2022 adalah 305.625 rumah.
20. Jumlah unit PK RTLH.
Sedangkan Rumah Tidak Layak Huni, adalah 14.646 unit rumah.
21. Jumlah rumah tidak layak huni.
Pada tahun 2022, di Kabupaten Jepara masih terdapat 46.547 unit rumah yang tidak layak huni.
22. Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun).
Rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun) sepanjang tahun 2022 tidak ada.
23. Rasio rumah dan KK
Jumlah KK yang ada yaitu 410.013, sedangkan total rumah yang ada di Jepara yaitu 305.625 unit atau 134%.
24. Jumlah rumah pembangunan baru.
pembangunan baru sepanjang tahun 2022 sebanyak 71
25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU
Pada tahun 2022 perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 12 perumahan.
26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum.
Sampai tahun 2022, di Kabupaten Jepara ada 1.178 rumah yang sudah terfasilitasi air minum.
27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan.

Sebanyak 1.178

28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site).

Rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) sebanyak 1.178 rumah.

29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH

Perumahan yang terfasilitasi RTNH pada tahun 2022 sejumlah 12 unit

30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU.

Rumah yang terfasilitasi akses PJU tidak ada

31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi.

Pengembang yang tersertifikasi pada tahun 2022 sebanyak 12

32. Jumlah pengembang yang teregistrasi

Pengembang yang teregistrasi sebanyak 12 pada tahun 2022

33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.

Pada tahun 2022, jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan sebanyak 12

❖ **Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan branded Kota Ukir, Kabupaten Jepara menjadi daerah yang sangat terbuka bagi banyak investor dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dengan kontur tanah yang beragam, Kabupaten Jepara memiliki potensi resiko bencana yang cukup tinggi, terutama longsor dan banjir. Untuk urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan yang ditangani.
Sepanjang tahun 2022, pelanggaran dan pengaduan trantibum sebanyak 21 dan yang ditangani oleh Satpol PP dan Damkar sebanyak 10 kali
2. Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan
Untuk mendukung kinerja Pemkab dalam urusan ini, sebanyak 2.170 orang Satlinmas yang telah dilantik dan dikukuhkan.
3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.
Sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Jepara telah memiliki 8 Perda yang telah ditegakkan.
4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS
Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 3 orang Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS.
5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum
Untuk membantu pelaksanaan dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum, Satpol PP dan Damkar didukung dengan 5 Standar Operasional Pelayanan (SOP).
6. Tersedianya sarana prasarana minimal
Dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum, Satpol PP dan Damkar didukung dengan sarana prasarana minimal.
7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal
Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2022 belum melaksanakan Kajian Resiko Bencana (KRB)
8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
IKK ini diukur melalui jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis

ancaman bencana yaitu sebanyak 1.235.018 jiwa dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana yaitu 1.235.018 jiwa sehingga capaian kinerjanya adalah 100% karena di Kabupaten Jepara informasi kebencanaan dilakukan melalui berbagai cara. Selain melalui sosialisasi tatap muka, informasi juga disampaikan melalui radio Kartini (milik Pemkab) juga melalui media sosial yang dikelola oleh Pemkab Jepara.

9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah / legal kabupaten jepara tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
10. Persentase penyelesaian dokumen rekon sampai dinyatakan sah kabupaten jepara tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan
Dari 71.473 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, sebanyak 320 orang yang telah mengikuti pelatihan.
12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan
Dari 71.473 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, sebanyak 320 orang yang telah mengikuti pelatihan.
13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Dari 1.235.018 jiwa warga negara yang berada di kawasan rawan bencana seluruhnya mendapat layanan pusdalops, jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.
14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan.
Dari 1.235.018 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana seluruhnya sudah mendapatkan peralatan perlindungan, Jadi capaian kinerja IKK ini adalah 100%.
15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.
Pada tahun 2022, tidak ada penetapan status KLB.

16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.
- Dari total 2 seluruh penetapan kejadian Luar biasa yang ada di Jepara, semuanya telah memenuhi kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan darurat bencana. Capaian kinerjanya adalah 100%
17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana
- Pada BPBD kab Jepara tahun 2022 terdapat 869 orang petugas dalam penanganan darurat yang terdiri dari PNS BPBD, Tenaga Harian Lepas dan relawan. Semuanya aktif dalam setiap penanganan darurat bencana yang terjadi.
18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.
- Sepanjang tahun 2022 perkiraan korban keseluruhan bencana 3.160 orang korban dalam kejadian bencana yang seluruhnya berhasil di cari, ditolong dan di evakuasi. Dengan capaian 100%
19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten.
- layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia atau operasi darurat non kebakaran yang ditangani Satpol PP dan Damkar pada tahun 2022 sebanyak 484 layanan.
20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan.
- Guna mendukung upaya penyelamatan kebakaran, kabupaten Jepara memiliki 3 Pos sektor Damkar dengan sarana dan prasarana lengkap.
21. Tersedianya aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan.

Untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara di bidang penyelamatan kebakaran, ada 26 aparaturnya yang selama 24 jam berjaga secara bergantian.

22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa.

Sedangkan untuk Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa, di Kabupaten Jepara belum memiliki.

23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

Kabupaten Jepara memiliki 28 jenis sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

24. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran, Kabupaten Jepara memiliki 28 aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi pemadam.

25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Jepara belum memiliki relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

26. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran.

Sepanjang tahun 2022, Kabupaten Jepara melalui Satpol PP dan Damkar tidak menyelenggarakan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran.

❖ Sosial

Kehidupan sosial masyarakat selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Dalam proses perubahan ini

seringkali muncul berbagai masalah sosial yang bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kriminal serta permasalahan-permasalahan lain kerap kali menjadi masalah berat bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jepara. Kondisi-kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik tentu akan menjadi polemik dan permasalahan serius bagi pemerintah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terus berupaya dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Keberhasilan urusan sosial diukur dengan indikator kinerja kunci (output) sebagai berikut :

1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki
Untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan 2 (dua) jenis layanan pengaduan yaitu secara online dan offline yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM
Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM yang terdata sebanyak 2.483 anak.
3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk
Untuk tahun 2022, Tim Reaksi Cepat belum terbentuk.
4. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau.
Sebanyak 621 orang penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng dapat dijangkau oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2022.
5. Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.

Untuk fasilitas kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai akses khusus layanan kedaruratan hanya memiliki 2 (dua) unit. Kedepannya diharapkan fasilitas-fasilitas tersebut akan meningkat.

6. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi. Pada tahun 2022, sebanyak 343 Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng mendapatkan paket permakanan sesuai standar gizi yang diberikan oleh Pemkab Jepara.
7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.
Sampai dengan tahun 2022, Kabupaten Jepara memiliki 1 (satu) buah shelter atau rumah singgah yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara.
8. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang.
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang sebanyak 28 orang.
9. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu.
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu sebanyak 266 orang.
10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter
Alat bantu yang disediakan di rumah singgah/shelter pada tahun 2022 ada 9 paket
11. Jumlah paket perbekalan yang tersedia.
Untuk paket perbekalan, pada tahun 2022 belum tersedia.
12. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.
Sepanjang tahun 2022 terdapat 28 Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.

13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter.
Untuk tenaga kesehatan yang dipersiapkan di rumah singgah/shelter, belum tersedia.
14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan.
Pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan sebanyak 50 orang.
15. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/pusat kesejahteraan sosial.
Sebanyak 45 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/pusat kesejahteraan sosial selama tahun 2022.
16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.
Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat sepanjang tahun 2022 sebanyak 5 paket.
17. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
Bagi warga masyarakat, kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting untuk bermacam-macam kepentingan. Karena itulah Pemkab Jepara melalui Dinsospermasdes memberikan fasilitas bagi Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Sepanjang tahun 2022, kabupaten jepara tidak ada penyandang distabilitas terlantar lanjut usia terlantar gepeng.
18. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Setiap warga Negara memiliki hak untuk memperoleh akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Pada tahun 2022, tidak ada penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses dasar tersebut.

19. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

Sebanyak 7 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga pada tahun 2022

20. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.

Sepanjang tahun 2022, 7 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng berhasil direunifikasikan dengan keluarganya.

21. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk.

Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk ada 20 orang.

22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan.

Pada tahun 2022 ada 450 orang yang mendapatkan makanan.

23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang.

Untuk korban bencana sebanyak 57 paket sandang.

24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki.

Kabupaten Jepara tidak memiliki penampungan pengungsi.

25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan.

Untuk kelompok rentan, belum ada paket permakanan khusus.

26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial.

Untuk pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana blm ada.

27. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial sebanyak 32 orang.

❖ **Tenaga Kerja.**

Pada saat pertambahan penduduk semakin meningkat maka persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi masalah yang cukup pelik bagi Negara. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat serta penyerapan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi maupun jenjang pendidikan tentu menjadi kendala tersendiri. Di Kabupaten Jepara urusan tenaga kerja ditangani oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Diskop UKM Nakertrans terus berupaya mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Tingkat keberhasilan urusan tenaga kerja diukur melalui indikator kinerja output sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki perencanaan tenaga kerja pada tahun 2022
2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.
Untuk akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja, pada tahun 2022 sebesar 97,33%
3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.
Tahun 2022, sebanyak 2 perusahaan
4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster.
Pada tahun 2022 penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi sebanyak 14. Sedangkan keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2022 sebanyak 9, sehingga capaiannya sebesar 155,56%.
5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.
Dari 5 orang instruktur yang ada di Kabupaten Jepara ada 9 yang telah bersertifikat kompetensi atau 56%.
6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.

Dari 211 peserta pelatihan, instruktur yang tersedia sebanyak 9 orang atau 4,27%.

7. Persentase LPK yang terakreditasi.

Dari 31 LPK yang ada di Jepara, baru ada 8 LPK yang terakreditasi pada tahun 2022 atau 26%.

8. Persentase LPK yang memiliki perizinan.

Dari 31 LPK yang ada di Jepara, tidak ada LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022 atau 0,00%.

9. Jumlah penganggur yang dilatih.

Jumlah penganggur yang dilatih pada tahun 2022 sebanyak 731 orang.

10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan.

Dari 211 orang yang dilatih pada tahun 2022, semua lulusannya bersertifikat pelatihan. 100%

11. Persentase penyerapan lulusan.

Dari 79 orang yang lulus pada tahun 2022, yang sudah bekerja sebanyak 45 orang atau 57%.

12. Lulusan bersertifikat kompetensi.

Tahun 2022 jumlah lulusan bersertifikat tahun 2022 sebanyak 34 dan yang lulus pelatihan bersertifikat sebanyak 34 sebanyak 100%.

13. Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan.

Dari 290 calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang terdaftar 100% mendapatkan pelatihan.

14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI).

Pada tahun 2022 terdapat 80 orang Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI).

15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.

Dari 339 perusahaan yang ada di Jepara, baru 226 perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas atau 56,6 %.

16. Data tingkat produktivitas total.

Tingkat produktivitas total di tahun 2021 adalah 4,63%

17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).

Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 terdapat 399 perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang. Dari jumlah tersebut, baru 156 perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan.

18. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB.

Dari 15 perusahaan yang memiliki Serikat pekerja/Serikat Buruh, ada 67% perusahaan yang telah memiliki PKB atau sebanyak 10 perusahaan

19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan.

Pada tahun 2022 ada 39 perusahaan.

20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.

Dari 69 perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB), semuanya sudah menyusun struktur dan skala upah. 100%

21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 2.078 perusahaan wajib lapor, hanya 2.058 sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih.

Sepanjang tahun 2022, dari 399 perusahaan yang ada di Kabupaten Jepara, terdapat 83 perusahaan yang berselisih atau sekitar 11.15%.

23. Jumlah mogok kerja.

- Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pemogokan kerja.
24. Jumlah penutupan perusahaan.
Penutupan perusahaan tidak ada pada tahun 2022
25. Jumlah perselisihan kepentingan.
Sedangkan untuk perselisihan kepentingan terdapat 66 perselisihan di tahun 2022
26. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan.
Sementara itu untuk perselisihan antar SP/SB tidak ada.
27. Jumlah perselisihan PHK.
Terkait dengan perselisihan PHK, sepanjang tahun 2022 terdapat 58 perselisihan.
28. Jumlah Pekerja yang ter-PHK.
Pekerja yang terkena PHK sebanyak 238 orang.
29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite.
Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite ada 88 perselisihan.
30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan.
Kabupaten Jepara terdapat 1 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan.
31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
Dari 124 kasus perselisihan yang terjadi, terdapat 121 perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2022, terdapat 9.476 lowongan kerja yang tersedia.
33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten.
Sedangkan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 17.094 orang.
34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten.
Di tahun 2022 terdapat 43 Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten Jepara.
35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam kabupaten.

Tidak ada Tenaga Kerja Khusus terdaftar di Kabupaten Jepara di tahun 2022

36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Terdapat 2 orang pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Kabupaten Jepara.

37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten.

Pada tahun 2022 tidak terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal di Kabupaten Jepara.

38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten.

Sepanjang tahun 2022, ada 3.153 perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Jepara.

39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).

Di tahun 2022, tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) sebanyak 9.174 orang.

40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.

Dari 80 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) semuanya sudah mendapatkan sosialisasi di tahun 2022. capaian 100%

41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.

Terdapat 290 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.

42. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangan.

Pada tahun 2022 tidak ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangannya.

43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.

Dari 290 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terdapat di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2022, semuanya mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.

44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.

Dari 20 Orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya, seluruhnya diberdayakan atau 100% capaian kinerjanya.

45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.

Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi point penting dalam pembangunan. Perempuan mempunyai peran yang sangat strategis dalam segala lini kehidupan. Namun demikian, dalam perjalanannya, peran perempuan masih kerap dianggap kurang penting. Untuk menghilangkan marginalisasi terhadap peran perempuan dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang lebih luas.

Di Kabupaten Jepara, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Di kepalai oleh seorang perempuan yaitu Ir. Inah Nuroniah, DP3AP2KB diharapkan mampu menjawab segala tantangan peran perempuan dalam pembangunan.

Tingkat keberhasilan urusan ini ditentukan dengan beberapa indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. Jumlah lembaga pemerintah kabupaten yang telah dilatih PUG.
Lembaga pemerintahan yang telah dilatih PUG sebanyak 43 opd.

2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten.
Program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten sebanyak 34 program/41 kegiatan.
3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan DP3AP2KB untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak.
Media Massa memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Karena itulah Pemerintah Kabupaten Jepara bekerjasama dengan 3 media massa yang ada di Jepara, baik media cetak maupun elektronik.
4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.
Pada tahun 2022, kabupaten Jepara telah memiliki 64 lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.
5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani.
Dari 15 korban kekerasan anak di Kabupaten Jepara, seluruhnya sudah dapat dilayani. Capaian kinerjanya mencapai 100%.
6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan.
Lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan sejumlah 6 puskesmas 2 sekolah 2 kecamatan
7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD).
Sedangkan lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD) baru 3 lembaga yaitu P2TP2A, Forum anak, dan LGNOTA
8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan.
Tahun 2022, tidak ada kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan.
9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih.

Di tahun 2022, Kabupaten Jepara sudah melatih 100 orang kader perempuan.

10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.

Tahun 2022, tidak ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.

11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten.

Begitu pula, tidak ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten.

12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi.

Kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi ada 1 kebijakan/program.

13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi.

lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi, sejumlah 1. P2TP2A

14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.

Dari 13 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan, seluruhnya sudah mendapatkan layanan. Capaian kinerjanya sebesar 100%.

❖ Pangan

Urusan pangan ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Capaian kinerja urusan pangan diukur melalui indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

Untuk infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan, kabupaten Jepara

memilik 1 buah gudang yaitu Gudang Cadangan Pangan Kabupaten Jepara.

2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya.

Pada tahun 2022, kabupaten Jepara melaksanakan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local. Untuk regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal, tidak tersedia.

4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Sepanjang tahun 2022, Kabupaten Jepara telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Jepara memiliki peta ketahanan dan kerentanan pangan yaitu Buku Peta FSVA Tahun 2022

6. Tertanganinya kerawanan pangan.

Pada tahun 2022, di kabupaten Jepara kerawanan pangan sudah tertangani

7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.

Selama tahun 2022, Kabupaten Jepara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan cadangan pangan capaian target mencapai

8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar

Kabupaten Jepara pada tahun 2022 telah melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yaitu melalui bintek Mutu Gizi.

❖ **Pertanahan**

Di Kabupaten Jepara, urusan pertanahan ada pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara

untuk beberapa indikator dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara terkait perizinannya. Capaian Kinerja urusan pertanahan diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati

Pada tahun 2022, Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun sebanyak 109 buah. Sedangkan izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak tidak ada.

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek.

Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek dengan SK Bupati tidak ada.

3. SK Bupati / Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah pada tahun 2022 tidak ada.

4. Dokumen Izin membuka tanah.

Kabupaten Jepara tidak mengeluarkan izin membuka tanah.

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten.

Dari rencana site lokasi pembangunan fisik sebanyak 432 , jumlah penetapan site lokasi bangunan fisik sebanyak 426 98,61%.

❖ **Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks kualitas Air, Udara dan Tutupan lahan.

Dari indikator ini kualitas lingkungan di Kabupaten Jepara adalah :

- Indeks kualitas Air (IKA) : 45,45
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : 87,80

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan : 50,48
2. Tersedianya data informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten.
Di Kabupaten Jepara informasi penanganan sampah terdiri dari
 - Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah
 - Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah
 - Tersedianya informasi terkait TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan.
 Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tentang tersedianya informasi terkait TPST tidak ada, adanya PDU dan TPS3R
 3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten
Sepanjang tahun 2022, izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 27 izin. semua usulan permohonan yang terregistrasi sudah semua.
 4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab.
Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten sebanyak 487 izin sedangkan PPLHD tidak ada.
 5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kabupaten.
Pada tahun 2022, di Kabupaten Jepara belum ada Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kabupaten.
 6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.
Sepanjang tahun 2022, tidak ada usulan MHA sehingga tidak ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.

7. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang ditangani.

Dari total pengaduan masyarakat yang terintegrasi sebanyak 20 aduan, dan yang sudah ditangani sebanyak 20, jadi realisasi sebesar 100%

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Capaian kinerja Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Penerbitan akta perkawinan

Dari 8.844 peristiwa perkawinan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 8.836 dokumen, capaian kinerjanya sebesar 99.91%.

2. Penerbitan akta perceraian

Pada tahun 2022, peristiwa perceraian terjadi sebanyak 2.252, dan akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 2.153 atau 95,60%.

3. Penerbitan akta kematian.

Sepanjang tahun 2022, peristiwa kematian yang terjadi di Kabupaten Jepara cukup banyak yaitu mencapai 9.233 dan semuanya telah diterbitkan akta kematian 100%.

4. Penyajian data kependudukan.

Data kependudukan skala kabupaten yang diterbitkan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali, sehingga capaiannya mencapai 100%.

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pembangunan desa menjadi salah satu hal penting dalam percepatan pembangunan, salah satunya adalah pengentasan desa tertinggal urusan ini berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.
Pada tahun 2022, ada 8 desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.
2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya.
Pada tahun 2022 tidak ada yang melakukan kerjasama antar desa.
3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.
Tahun 2022 terdapat 5 lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.
4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.
Terdapat 184 desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Karena itulah penting bagi Negara untuk terus berupaya mengendalikan pertambahan penduduk. Melalui program-program Keluarga Berencana diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai. Indikator kinerja kunci urusan ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara tidak tersedia 1 dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan.

2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.

Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun adalah 22,89%

3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19).

Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 sebesar 6,27%

4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE).

Dari 1.236.674 sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE, masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE sebanyak 408.940 orang atau 33,07%

5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.

Di Kabupaten Jepara terdapat 19 stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.

6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP.

Dari 60 faskes yang ada, terdapat 48 Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP dengan capaian 80%.

7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Dari 201.620 Pasangan Usia Subur yang ada di Jepara, 134.294 orang menjadi peserta KB aktif atau capaiannya sebesar 66,61%.

8. Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif.

Kelompok kerja KKBPK sebanyak 69 kelompok.

9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan

Dari 18.635 orang yang menjadi sasaran peserta KB pasca persalinan, 9.876 atau 53% menjadi peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern.

10. Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah.

Dari total desa 195 dengan kepesertaan KB terendah yaitu 1 desa memiliki kepesertaan KB paling rendah yaitu kurang dari 0,51%.

11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dari total keluarga PBI yaitu 452.978, sebanyak 82.494 atau 18,21% adalah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI.

❖ **Perhubungan**

Urusan perhubungan di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. Indikator Kinerja Kunci Output dalam urusan ini adalah :

1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.

Dari 170 fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan, ada 94 buah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia. Capaian kinerjanya sebesar 55,30%.

2. Terlaksananya pelayanan uji berkala.

Dari total kendaraan wajib uji yaitu 23,952 buah, Sedangkan kendaraan yang sudah menjalani uji kendaraan sebanyak 13.477 kendaraan atau sebesar 56,27%

3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.

Lintas penyeberangan di Kabupaten Jepara sebanyak 5 lintas yaitu Jepara – Karimunjawa, dan Karimunjawa – Desa Nyamuk. Dan semuanya telah ditetapkan tarifnya. Capaian 100%

4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

untuk jaringan jalan kabupaten.

Dari 43,420 perlengkapan jalan kabupaten yang dibutuhkan, sudah terdapat 31,592,24 pemasangan perlengkapan jalannya. Capaian kinerjanya adalah 73%.

❖ **Komunikasi dan Informatika.**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Keberhasilan urusan komunikasi dan informatika diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dari 42 OPD yang jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 28 66,67%
2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo, dari 42 OPD di Jepara yang menggunakan akses internet berkualitas dari Kominfo sebanyak 28 dengan capaian 66,67%
3. Di kabupaten Jepara sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah yang disediakan kominfo sebanyak 42 OPD
4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring 137 dan jumlah kegiatan event perangkat daerah dan pelayanan public pada pmda sebanyak 137 dengan capaian 100%
5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar.

Dari 42 OPD termasuk kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara semuanya sudah memiliki portal dan situs web yang sesuai standar sebanyak 42 atau capaiannya adalah 100%

6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari 42 perangkat daerah yang ada di Jepara termasuk kecamatan yang sudah mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 42 dengan capaian 100%.

7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.

Pada tahun 2022, dari 313 layanan, terdapat 313 yang menggunakan layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik atau 100%.

8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.

Dari 313 Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baru 10 yang menggunakan layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik atau 3,19%.

9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 313 sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruhnya terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 100%

10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.
Pada tahun 2022 ada 250 layanan publik dan layanan administrasi, semua sudah terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah sebanyak 250, sehingga capaiannya adalah 100%.
11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah.
Dari 26 perangkat daerah yang ada di Jepara, hanya semuanya sudah menggunakan layanan pusat data pemerintah 100%.
12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah.
Pada IKK ini, perangkat daerah yang ada di Jepara yaitu berjumlah 26 (tidak termasuk kecamatan), semuanya sudah menyimpan data di pusat data pemerintah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 100%.
13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo).
Perangkat daerah yang ada di Jepara yaitu berjumlah 26 (tidak termasuk kecamatan), ada 26 perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo 100%
14. Persentase data yang dapat berbagi pakai.
Dari 51 data yang dimiliki, hanya 19 dapat berbagi pakai atau capainnya 37,25%.
15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city.
Pada tahun 2022, untuk mendukung program smart city, dari 26 perangkat daerah baru 25 yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 96,15%. Kecamatan tidak termasuk
16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara hanya 3 ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.

17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.

Kabupaten Jepara sudah memiliki Peraturan Bupati yang terkait implementasi e-government yaitu Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City.

18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten.

Untuk menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Jepara telah bermitra dengan komunitas yang ada di masyarakat. Dari 140 komunitas yang ada di masyarakat hanya 125 yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 89,29%.

19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM).

Pada tahun 2022, 27.048 konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan Pemkab, dan sebanyak 27.093 adalah Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 99,83%

20. Pada tahun 2022 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.

Dari 76 diseminasi dan layanan Informasi Publik, semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP dengan capaian 100%.

❖ Koperasi dan UKM

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Nakertrans.

Keberhasilan capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Sampai dengan tahun 2022, di Kabupaten Jepara terdapat 528 koperasi simpan pinjam yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam. Sedangkan penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan sebanyak 77 atau capaiannya sebesar 14,58%.

2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Pada tahun 2022, ada 9 permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam dan hanya 1 yang diterbitkan. 11,11%

3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. Dari 673 total koperasi yang ada, sebanyak 311 koperasi yang sudah diperiksa dan diawasi. 46,21%

4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada sebanyak 277, dan ada 102 usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya atau 36,82%.

5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Dari jumlah koperasi yang ada yaitu 673, yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 100 koperasi atau 14,86%.

6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab
Dari 164.210 orang anggota koperasi yang ada di Jepara, ada 215 orang yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian. 0,13%
7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab.
Dari total koperasi yang berjumlah 673, di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 baru ada 16 koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan di kabupaten jepara tidak ada.
9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab.
Dari 673 koperasi yang ada di Jepara, semuanya telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya atau capainnya 100%.
10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab.
Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jepara jumlah koperasi yang ada 673 dan yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan tidak ada
11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab. Tahun 2022 kab jepara jumlah koperasi sebanyak 673 dan yang mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran sebanyak 3 capaianys 0,45% tidak memberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab.
Untuk dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi, ada 170 koperasi yang sudah di fasilitasi dari total koperasi 673. Capaiannya 25,26%
13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah ka dalam 3 (tiga) jumlah koprasi yang ada sebanyak 673 dan yang mendapatkan dukungan fasilitasi kemitraan sebanyak 3 capaian sebesar 0,45%
14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.
Pada tahun 2022, jumlah wirausaha yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 76.800 serta 3.219 adalah pertumbuhan wirausaha baru. Capaian pertumbuhannya sebesar 4.19%.
15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS).
Tahun 2022, Kabupaten Jepara tidak memiliki data berbasis online.
16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra.
Jumlah usaha mikro di tahun 2022 sebanyak 76.800, dan yang bermitra sebanyak 193, atau 0,25%.
17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.
Di Kabupaten Jepara, usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk sebanyak 76.608, sedangkan usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sebanyak 192.
18. Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran.
Usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran di tahun 2022 sebnayak 76.195, sedangkan yang sudah terfasilitasi sebanyak 605.
19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.

Dari 76.800 usaha mikro yang ada. Sebanyak 3.590 usaha yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan.

20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara telah memberikan pendampingan kelembagaan dan usaha kepada 684 usaha mikro, dari 76.800 usaha mikro yang ada.

❖ **Penanaman Modal**

Untuk mewujudkan kemajuan dan mendukung pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah harus memiliki strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya adalah dengan investasi atau penanaman modal. Untuk menarik para investor agar mau berinvestasi ke daerah dibutuhkan iklim usaha yang sehat, mudah serta kejelasan prosedur.

Di Kabupaten Jepara, urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan dukungan para PNS dengan berbagai kualifikasi pendidikan, DPMPTSP dapat mewujudkan kinerja yang cukup baik.

Keberhasilan kinerja urusan penanaman modal diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah memiliki Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara.

2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Pada tahun 2022 DPMPTSP sudah memiliki 11 buah SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

yaitu SOP fasilitasi di Bidang Penanaman Modal. SOP Fasilitasi Kemudahan Perizinan di Kabupaten Jepara, dan SOP FGD Perkembangan Investasi PMA PMDN di Kabupaten Jepara.

3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara terdapat 18 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, dengan capaian 18 laporan yaitu laporan FGD Perkembangan Investasi PMA PMDN, Laporan Fasilitasi Perizinan Penanaman Modal dan Laporan Webinar Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF).

4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting.

Kabupaten Jepara, melalui DPMPTSP telah mengikuti kegiatan webinar bisnis, forum one on meeting Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF) pada tanggal 9 dan 12 November 2022 oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 kali.

5. Kegiatan pameran penanaman modal.

Pada tahun 2022 Jepara tidak melaksanakan pameran penanaman modal. Kegiatan pameran yang sudah direncanakan akhirnya dialihkan untuk pembuatan baliho Mall Pelayanan Publik yang berada di depan Kantor OPD Bersama serta pembuatan proposal Proyek Keris Jateng dengan capaian 0%

6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal.

Kabupaten Jepara telah menyelesaikan target bidang Penanaman Modal yaitu kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, sosialisasi pelayanan perizinan, pemeliharaan aplikasi system penanaman modal dan promosi investasi 12 kali

7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Sepanjang tahun 2022, Kabupaten Jepara melalui DPMPTSP telah melaksanakan konsultasi perizinan dan non perizinan sebanyak 752

8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Pada tahun 2022 ada 14.658 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

9. Laporan realisasi penanaman modal.

Mengingat sudah menurunnya kasus covid -19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap investasi yang ada di Jepara. Pada tahun 2022 realisasi penanaman modal 9.585.327.105.644

10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, PNS yang telah mengikuti pelatihan Penanaman Modal sebanyak 25 orang

11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN

Sepanjang tahun 2022, DPMPTSP telah melaksanakan pembinaan penanaman modal kepada 1.071 perusahaan yang ada di Jepara.

12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Pada tahun 2022 ada 15 (satu) instansi yang mengajukan layanan permintaan data.

❖ **Pemuda dan Olahraga**

Pemuda sebagai masa depan bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri akan membantu pemuda dalam melanjutkan estafet pembangunan. Urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara. Disdikpora melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pemuda. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu dengan mengadakan pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda. Kesuksesan capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

Pada tahun 2022, di Kabupaten Jepara terdapat 150 orang pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan kewirausahaan kepada 150 orang.

3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda.

Dari 283.244 penduduk yang berusia 16-30 tahun, ada 625 pemuda yang mendapat pelatihan. 0,22%

4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan.

Dari 283.244 penduduk yang berusia 16-30 tahun, ada 190 pengelola organisasi pada tahun 2022.

5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan.

Dari 175 orang yang menjadi pelatih olahraga di Kabupaten Jepara, sebanyak 125 pelatih yang memiliki kompetensi atau capaian kinerjanya adalah 71,43%.

6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah.

Karena pada tahun 2022, Indonesia ikut terkena pandemic covid-19, maka event olahraga prestasi hanya sempat dilaksanakan sebanyak 10 kali.

❖ **Statistik**

Urusan statistik dilaksanakan oleh Diskominfo. Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Tersedianya buku profil daerah.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara melalui Diskominfo telah menerbitkan 3 buah buku profil daerah yaitu Jepara Dalam Angka, PDRB dan Statistik Sektoral Kabupaten Jepara

2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara tidak melakukan survei sektoral

3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.

Di tahun 2022, kompilasi statistik sektoral yang dilakukan oleh Diskominfo sebanyak 233 kali.

4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.

Pada tahun 2022, Diskominfo tidak melaksanakan survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.

5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 233 kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS.

6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic.

Pada tahun 2022 jumlah kegiatan statistic sektoral sebanyak 233 dan yang memiliki metadata kegiatan statistik sektoral sebanyak 115 dengan capaian 49,36%.

7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral

Dari 40 metadata statistic sektoral baru 19 indikator statistik sektoral. Dengan capaian 55%

❖ **Persandian**

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kbaupaten Jepara

1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.

Pada tahun 2022, dari 10 kegiatan strategis yang dilaksanakan, ada 8 (lima) kegiatan strategis yang ada dan sudah diamankan.

2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah.

Dari 292 buah SE yang ada di Jepara, sebanyak 290 SE sudah menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian dengan capaian 100%

3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.

Dari 292 SE yang ada, semuanya telah diaudit dengan resiko kategori rendah dengan capaian 100%.

4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan.

Pada tahun 2022 dari 51 titik pada PHKS, semua titik sudah diamankan.

❖ **Kebudayaan**

Sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku dan ras, Indonesia memiliki ragam budaya dengan keunikan dan kekhasannya masing-masing. Setiap daerah memiliki potensi budaya dan cagar budaya yang berbeda-beda. Menjadi kewajiban setiap daerah untuk mengenali, menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing, karena cagar budaya adalah warisan leluhur dimana kita dapat belajar banyak dari hal tersebut. Dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan dan cagar budaya, khususnya kebudayaan local, akan membangun rasa nasionalisme sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjaga. Di Kabupaten Jepara, urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Capaian urusan kebudayaan diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi).

Di tahun 2022 di Kabupaten Jepara ada 40 obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi.

2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman).

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara ada 2 kali melaksanakan kegiatan obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

Obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2022 ada 40 Obyek.

4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara memiliki 18 orang SDM yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola.

5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan).

Tahun 2022, Kabupaten Jepara melaksanakan register cagar budaya sebanyak 5

6. Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran).

Sampai dengan tahun 2022, Jepara memiliki 3 cagar budaya yang dilindungi.

7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kota dengan dukungan data.

Pada tahun 2022 Kabupaten Jepara tidak melaksanakan Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kota dengan dukungan data.

8. Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi).

Sepanjang tahun 2022, Kabupaten Jepara tidak melaksanakan pengembangan cagar budaya.

9. Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata).

Kabupaten Jepara memiliki 1 buah cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum.

Museum Kartini yang dimiliki Kabupaten Jepara terletak di pusat kota yaitu di sebelah utara alun-alun I Jepara. Museum Kartini memiliki 612 koleksi yang bisa dinikmati oleh pengunjung.

11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum.

Dengan 224 koleksi yang dimiliki, Museum Kartini sepanjang tahun 2022 ada 15.312 pengunjung. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2022 karena sudah mulai dibuka tempat-tempat wisata setelah masa ppkm akibat covid-19

12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum ada 13

13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya.

Kabupaten Jepara telah membentuk 1 Tim pendaftaran cagar budaya.

14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten

Kabupaten Jepara telah membentuk 1 Tim ahli cagar budaya

15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya

Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan kebudayaan melaksanakan 5 fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya.

16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman

SDM yang menangani Cagar budaya dan permuseuman sebanyak 10 orang.

17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman.

Sepanjang tahun 2022, Disparbud melaksanakan 11 kegiatan peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman.

18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman.

Sarana dan prasarana untuk pendaftaran cagar budaya dan permuseuman ada 38 unit yang dimiliki.

19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat.

Pada tahun 2022, Disparbud telah mengadakan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak 13 event.

❖ **Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar. Perpustakaan terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Meskipun pada era digital seperti sekarang, segala macam informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, namun peran buku dan perpustakaan masih belum bisa tergantikan. Di Kabupaten Jepara, urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. Pada saat ini, perpustakaan Jepara bukanlah sekedar tempat membaca dan meminjam buku saja, namun perannya sudah semakin luas dalam memberikan berbagai fasilitasi kegiatan masyarakat. Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskarpus, diantaranya ada Akademi Menulis Jepara yaitu wadah bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia tulis menulis, komunitas Bahasa Inggris dan berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan lainnya.

Capaian kinerja urusan perpustakaan diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci yaitu :

1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

Dengan jumlah penduduk kabupaten Jepara sebanyak 1.236.674 jiwa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Jepara memiliki koleksi buku sebanyak 317.855 eksemplar.
25,70%

2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat.
Sedangkan untuk jumlah pengunjung yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan sepanjang tahun 2022 sebanyak 37.473 orang dari jumlah penduduk kabupaten Jepara 1.236.674 atau 3,03%.
3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk.
Untuk melayani masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, Diskarpus memiliki 915 orang petugas untuk melayani 1.236.674 orang. 0,07%
4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
Kabupaten Jepara memiliki 17 buah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan. Sedangkan jumlah total perpustakaan yang ada sebanyak 915 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa. 1,86%
5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat.
Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya mendekatkan diri pada masyarakat dengan berbagai kegiatan. Pada tahun 2022 sebanyak 533 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara telah melakukan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat melalui kegiatan Perpustakaan keliling 527 kali, Lomba dalam rangka minat baca dan lomba perpustakaan 3 kali, sosialisasi gemar membaca 3 kali.
6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya.
Kabupaten Jepara tidak memiliki naskah kuno.
7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa
Kabupaten Jepara tidak memiliki naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasakan.
8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)

koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar sebanyak 214 eksemplar.

❖ **Kearsipan**

Arsip memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan pemerintahan. Selain berisi berbagai informasi, arsip juga berperan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah. Maka bisa dikatakan bahwa arsip memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena itulah arsip akan memberikan manfaat yang optimal ketika dikelola dengan baik dan tertib. Namun sayangnya, masyarakat, organisasi/lembaga bahkan pemerintah masih banyak yang tidak sadar arsip sehingga banyak persoalan yang muncul karena pengelolaan arsip yang tidak baik. Di Kabupaten Jepara, urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja output urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.
Arsip yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 110.809 dan terdapat 68.603 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. Capaian kinerjanya adalah 61,91%.
2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.
Dari seluruh arsip inaktif yaitu 180.065, arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebanyak 138.133 atau 76,71%.
3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik.
Sedangkan jumlah arsip statis sudah 100% dibuatkan sarana bantu temu balik atau sebanyak 91.235.
4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.
Dari 378.851 arsip dinamis yang ada, yang sudah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebanyak 500 atau 0,13 %
5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

Tahun 2022 sebanyak 2.039 Arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK.

6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK.

Sedangkan untuk perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK tidak ada.

7. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten.

Pada tahun 2022 ada 64 penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK.

8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK.

Kabupaten Jepara telah melakukan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK sebanyak 4.000.

9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian.

Pada tahun 2022 ada 4 arsip dalam status pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian.

10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.

Kabupaten Jepara tidak mengeluarkan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.

URUSAN PILIHAN

❖ Kelautan dan Perikanan

Menjadi daerah yang memiliki wilayah perairan cukup luas, penduduk Kabupaten Jepara yang berprofesi sebagai nelayan cukup banyak. Dengan panjang pantai kurang lebih 72 kilometer

memiliki potensi perikanan yang cukup luar biasa. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Dinas Perikanan telah melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu dengan 10 buah Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, diharapkan bisa mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang ada di Jepara. Keberhasilan urusan kelautan dan perikanan diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP).
Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) sebanyak 276 rumah tangga.
2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional
Sampai dengan tahun 2022, dari 10 TPI yang ada di Kabupaten Jepara Kabupaten, terdapat 7 buah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah memenuhi minimal standar operasional yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Jepara.
3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan.
Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan 14 buah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan.
4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan).
Pada tahun 2022, Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) sebanyak 540 orang/pembudidaya.
5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi.

Sepanjang tahun 2022, benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi baik melalui usaha rakyat maupun Balai Benih sebanyak 1.578.213.000 ekor.

❖ **Pariwisata.**

Sektor pariwisata memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Jepara. Jepara yang memiliki destinasi wisata yang lengkap, dari wisata alam (pantai dan gunung), wisata budaya dan wisata religi tentu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Jepara. Bahkan salah satu tempat wisata menjadi destinasi internasional, yaitu Karimunjawa. Eksotika Karimunjawa sudah diakui okeh dunia. Keindahan pantai serta keelokan bawah laut, mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Karimunjawa.

Namun sebagaimana yang terjadi di seluruh dunia, sektor pariwisata ini menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, akan tetapi dengan mulai melandainya kasus Covid-19 sektor pariwisata mulai ada peningkatan terutama Di Jepara, urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Bisa dikatakan sektor pariwisata menjadi unggulan di Kabupaten Jepara Capaian kinerja urusan pariwisata diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi.

Pada tahun 2022, terdapat 24 entitas destinasi di Jepara.

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Untuk semakin menarik perhatian wisatawan, selain terus meningkatkan destinasi, Disparbud juga senantiasa memenuhi Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Tahun 2022 ada 158 sarana prasarana yang dibangun.

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten.
Sepanjang tahun 2022, ada 625 tanda daftar usaha pariwisata (TUDP) per sub jenis usaha
4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.
Setelah masa pandemic pada tahun 2022, ada 5.310 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepara.
5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri.
Sepanjang tahun 2022, Disparbud telah melaksanakan 16 kali event dalam negeri.
6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten.
Untuk event luar negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Jepara tidak mengikuti.
7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri.
Pada tahun 2022, ada 8 industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri.
8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi.
Dari 1.445 tenaga kerja pariwisata, 19 orang sudah tersertifikasi. Capaian kinerjanya mencapai 1,3%
9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan.
Dari 440 orang yang menjadi sasaran pembekalan sector pariwisata semuanya sudah terlaksana sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.
Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat sebanyak 26 lokasi.

❖ **Pertanian**

Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 100.413,189 ha. Dari keseluruhan wilayah tersebut merupakan lahan sawah/wilayah tak terbangun yang meliputi tambak, lahan pertanian, kawasan perkebunan serta konservasi. Sedangkan yang termasuk bukan

lahan/sawah kering/build up area terdiri dari pemukiman, perkantoran dan jasa, kawasan industri serta transportasi. Seiring dengan terjadinya penambahan penduduk mengakibatkan pergeseran fungsi lahan. Selain itu, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan teknologi juga menjadi factor perubahan fungsi lahan. Di Kabupaten Jepara, urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Capaian kinerja urusan pertanian di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan 107 unit sarana

Pertanian dan 58 unit prasarana pertanian buah sarana dan prasarana pertanian.

2. Prasaran pertanian yang digunakan.

Pada tahun 2022, prasarana pertanian yang digunakan sebanyak 58 unit.

3. Penerbitan izin usaha pertanian.

Sepanjang tahun 2022, Pemkab Jepara telah memberikan fasilitasi penerbitan izin usah pertanian sebanyak 1 dokumen.

4. Persentase Prasarana pertanian yang digunakan.

Dari 58 prasarana pertanian yang ada, seluruhnya dipergunakan, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

5. Persentase jumlah izin usaha pertanian Kabupaten. Dari 1 usulan usaha pertanian telah memiliki izin dengan capaian 100%.

6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana

Dari 93,8 ha luas area yang terkena bencana, seluruhnya bisa ditanggulangi.

❖ **Kehutanan**

Urusan kehutanan sudah dilimpahkan ke Provinsi Jawa Tengah.

❖ **Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)**

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan urusan ESDM.

❖ **Perdagangan.**

1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Untuk izin Pusat Perbelanjaan di kabupaten Jepara untuk Toko swalayan sebanyak 91 izin.
2. Persentase penerbitan TDG.
Pada tahun 2022 dari 24 permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang masuk, semuanya dapat diterbitkan kurang dari 24 hari, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase gudang yang tidak memiliki TDG
Penerbitan TDG sepanjang tahun 2022 sebanyak 24. Sedangkan gudang yang ada di Jepara sebanyak 34 gudang.
4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu.
Untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan waralaba luar negeri, Kabupaten Jepara tidak ada.
5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten.
Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten tidak melaksanakan pemeriksaan sedangkan sepanjang tahun 2022 tidak ada permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer.
6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu.
Pada tahun 2022, penerbitan SPKA sudah menjadi kewenangan pusat.
7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya adalah 50%.
8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu.

Dari 64 komoditi yang dimiliki Kabupaten Jepara, prosentase komoditinya adalah 328,4 atau 5,13%.

9. Di Kabupaten Jepara Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan pada tahun 2022 sebesar 3,4%
10. Persentase alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan pada tahun 2022 jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan sejumlah 3.891 dengan capaian 100%
11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku. pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara jumlah sampel BDKT yang diawasi 266 dari total BDKT 908 dengan capaian 29%

❖ **Perindustrian**

Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan perindustrian di ukur dari indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten.
Kabupaten Jepara tidak menerbitkan izin usaha kawasan industri (IUKI) Karena tidak ada kawasan industri.
2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda.
Terkait dengan dokumen RPIK, sampai saat ini belum ditetapkan menjadi Perda. Sudah tersusun naskah dan draft ranperda atau capaiannya sebesar 50%.
3. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan.
Dari 2.804 permohonan atau pengajuan izin yang masuk, seluruhnya telah diterbitkan izinnya atau capaiannya adalah 100%.
4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan.

Untuk pengajuan izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil, pada tahun 2022 tidak ada izin yang diterbitkan

- Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten.

Total populasi perusahaan industri besar & perusahaan kawasan industri di kabupaten jepara adalah 321, sedangkan jumlah perusahaan industri kecil & perusahaan kawasan industri di kabupaten di SIINas sebanyak 2.851 capaian 888,16%.

❖ **Transmigrasi**

Urusan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja urusan ini di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya sebanyak 1 kawasan yaitu salulisa sulawesi Barat
- Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak 1 pemukiman
- Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya 1 pemukiman

Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Output

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	524 x 100% 982	53,31%	Disdikpora
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	45.113 ... x 100% 45.113	100 %	Disdikpora

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa)	332 ---x 100% 45.113	0,74 %	Disdikpora
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2.949	2.949	Disdikpora
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	3.179	3.179	Disdikpora
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.830 ---x 100% 3.179	57,57 %	Disdikpora
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	679 ---x 100% 873	77,78%	Disdikpora
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	689 x 100% 698	98,71%	Disdikpora
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari	77.099 -- x 100% 77.099	100%	Disdikpora

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pemerintah Daerah			
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	26.868 --- x 100% 26.868	100%	Disdikpora
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	30.692 --- x 100% 77.099	39,81%	Disdikpora
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13.181 -x 100% 26.868	49,06%	Disdikpora
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	5.169	5.169	Disdikpora
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.643	2.643	Disdikpora
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.835	4.835	Disdikpora
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.303	2.303	Disdikpora
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga	2.396	2.396	Disdikpora

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	594	594	Disdikpora
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	781	781	Disdikpora
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	431	431	Disdikpora
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat	4.576	4.576	Disdikpora
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.533	1.533	Disdikpora
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	373 ---x 100 409	91,20%	Disdikpora

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	55 --x 100% 91	50,05%	Disdikpora
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	607 - x 100% 801	75,78%	Disdikpora
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Disdikpora SMA/ sederajat	227 --x 100% 313	72,52%	Disdikpora
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10 --- x 100% 16	62,50 %	Disdikpora
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	1.621 --- x 100% 1.621	100%	Disdikpora
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri	1.295 ----x 100% 1.621	79,89 %	Disdikpora

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	151	151	Disdikpora
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	82	82	Disdikpora
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	34	34	Disdikpora
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	1	1	Disdikpora
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	1	1	Disdikpora
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kab yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai	6	6 unit	Dinkes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		standar			
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	6 unit RS	Dinkes
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		4986 PAKET: 1.500 Leaflet Gizi Ibu Hamil 136 Form OVM 3.350 Susu Ibu Hamil KEK buku KIA	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		763 ORANG: 204 dokter 559 bidan	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (rekap sarana operasional dan contoh foto)		1620 PAKET: 1.500 Leaflet Ibu Menyusui 120 paket PMT Ibu Nifas	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat)		763 ORANG: 204 dokter 559 bidan	Dinkes
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		114 Form OVP	Dinkes
		2. Jumlah SDM		763 ORANG:	Dinkes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		204 dokter 559 bidan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		10.863 PAKET: 1.133 Posyandu 9.730 sachet formula 100	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		6515 PAKET: 204 dokter 559 bidan 5.752 kader posyandu	Dinkes
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		22 Paket Alat Pemeriksaan Hb Remaja Putri	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		1.101 ORANG: 755 Guru UKS SD/MI, 210 Guru UKS SMP/MTs, 136 Guru UKS SMA/SMK/MA	Dinkes
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		174 Posbindu Kit	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk		1.022 ORANG:	Dinkes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader Posbindu	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		549 PAKET: 313 Posyandu Lansia 74 Lansia Kit 22 Puskesmas Santun Lansia 140 Buku Panduan Caregiver bagi Lansia	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		44 ORANG 22 Dokter Puskesmas 22 Programmer Lansia (Perawat/Bidan)	Dinkes
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		174 Posbindu Kit	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		1.022 ORANG: 22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader Posbindu	Dinkes
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan			

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		10.254 PAKET 174 Posbindu Kit 10.080 dus tes Gula Darah	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		1.022 ORANG: 22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader Posbindu	Dinkes
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		29 Buku Pedoman	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		3 tenaga kesehatan (2 perawat terlatih, 1 dokter terlatih)	Dinkes
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		14.057 PAKET FDC Kat I = 350 paket Kombipak = 24 paket FDC Anak = 150 paket Pot sputum = 8.000 buah Kaca slide =	Dinkes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				54 buah Reagen Zn = 135 paket Catridge TCM = 5.344 tes.	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		70 ORANG 25 dokter TB terlatih 20 perawat TB terlatih 25 laborat TB terlatih	Dinkes
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		25.475 PAKET 24.325 rapid combo HIV sipilis 1.150 rapid 2 HIV	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.		11 ORANG: 2 Dokter 2 Perawat 2 Rekam Medis 2 Apoteker 2 ATLM 1 Bidan	Dinkes.
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab (ha)	97 Ha	97 Ha	DPU-PR
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m)	13.05M	13.050 M	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)	700 Ha	700 Ha	DPU-PR
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab (m)	2.040 M	2.040 M	DPU-PR
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab	Ada	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	DPU-PR
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab	Ada	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Jepara Tahun 2020-2025	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab	4	1. Bangunan perkuatan tebing : 7.400 meter 2. Tanggul sungai : 5040 meter 3. Pintu air : 9 Unit 4. Pompa air : 3 unit	DPU-PR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{4.238,4}{100\%} \times 10.596$	40%	DPU-PR
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{568.992,12}{1.249.933} \times 100\%$	45,52%	DPU-PR
		3. Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	$\frac{4.143}{13.810} \times 100\%$	0,30%	DPU-PR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten			
		1. Penetapan dokumen Rencana Induk	Ada	Peraturan Bupati	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab		Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040	
		2. Tersusun dan ditetapkan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten	Ada	Dokumen Jakstrada berlaku Tahun 2020 – 2024	DPU-PR
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaraan SPAM	1 PDAM	1 PDAM	DPU-PR
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	8 Izin	8 Izin	DPU-PR
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				2020-2040	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	299.371	299.371	DPU-PR
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	300	300	DPU-PR
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	299.671	299.671	DPU-PR
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	193	193	DPU-PR
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima	193	193	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja			
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	193	193	Disperkim
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akese dasar	299.371 ----- x 100 % 402.129 ,	74,45 %	Disperkim
		8. Kinrja penyediaan pelayanan SPALD S akes aman	193 ----- x 100 % 402.129	0,048 %	Disperkim
		9. Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S T akses dasar	300 ----- x 100 % 402.129	0,075	DPU-PR
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	299.371 ---- x 100 % 402.129	74,45%	DPU-PR
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	193 ---- x 100 % 402.129	0,048%	DPU-PR
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	14,25 / 85,792 X 100	16,61%	DPU-PR
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung	300/(6X50) X 100	100	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		ke IPALD			
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	193/299.3 71 X 100	0,064	DPU-PR
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten			
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	11 --- x 100 % 43	25,58	DPU-PR
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	918 Izin	918	DPMPSTP
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011	DPU-PR
		4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Keputusan Bupati Jepara Nomor 640/320 Tahun 2021	DPU-PR
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	36	Keputusan Bupati Jepara Nomor 430/410 Tahun 2018	DPU-PR
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab	163	Bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Jepara Perda 14/2016	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Perangkat Daerah dan Perbup 1/2018 UPTD	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten	163	Bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Jepara Perda 14/2016 Perangkat Daerah dan Perbup 1/2018 UPTD	DPU-PR
		8. Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/ dirawat	163	Bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Jepara Perda 14/2016 Perangkat Daerah dan Perbup 1/2018 UPTD	DPU-PR
		Tingkat kemantapan jalan			
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	872,142 KM	872,142 KM	DPU-PR
		2. Panjang jalan yang dibangun	15,818,3 KM	15,818,3 KM	DPU-PR
		3. Panjang jembatan yg dibangun	16,0 M	16,0 M	DPU-PR
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan	31,310,4 KM	31,310,4 KM	DPU-PR
		5. Panjang jembatan yang	16,0 M	16,0 M	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		diganti/dilebarkan			
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi	15,492,1 KM	15,492,1 KM	DPU-PR
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	23,6 M	23,6 M	DPU-PR
		8. Panjang jalan yang dipelihara	31,172,3 KM	31,172,3 KM	DPU-PR
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	19,8 M	19,8 M	DPU-PR
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli onstruksi di wilayah kab	Tidak ada	suket	DPU-PR
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab	73	73	DPU-PR
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab	27	27	DPU-PR
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir	Ada	SK Kepala Dinas DPUPR Nomor 061 Tahun 2022.	DPU-PR
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBD kabupaten	Ada	1154 paket	DPU-PR
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa	Ada	13 paket	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN			
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	23 paket	DPU-PR
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	1190 paket	DPU-PR
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada	Perbub sotk	DPU-PR
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang	Tidak	Suket	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	Suket	DPU-PR
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	46	DPU-PR
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Tidak ada	Suket	DPU-PR
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Suket	DPU-PR
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk	Tidak ada	Suket	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	0	DPU-PR
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Suket	DPU-PR
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	570	570	DPU-PR
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	Tidak ada	Suket	DPU-PR
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	277	277	DPU-PR
		21. Jumlah badan usaha yang	Tidak ada	Suket	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota			
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Suket	DPU-PR
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Suket	DPU-PR
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Suket.	DPU-PR
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi ewenangan pengawasannya	Tidak ada	Suket	DPU-PR

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.				
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab			
		1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	178	178	Disperkim.
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	34	34	Disperkim
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	34	34	Disperkim
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	34	34	Disperkim
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	34	34	Disperkim
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	Disperkim
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban	0	0	Disperkim

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Bencana			
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang Terfasilitasi	34	34	Disperkim
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	0	Disperkim
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten			
		1. Jumlah RT penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0 (pada tahun 2022 kabupaten jepara tidak ada kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah)	Disperkim
		1. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	0	Disperkim
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	0	Disperkim

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	0	Disperkim
		4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	0	Disperkim
		5. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak ada	0	Disperkim
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani			
		1. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh< 10 Ha	67,73.	SK Kumuh Bupati Jepara No 055/362 Tahun 2021	Disperkim
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	14.646	Dok. Data Unit RTLH Tahun 2022	Disperkim
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	84.07	SK Kumuh Bupati Jepara No 055/362 Tahun 2021	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		1. Jumlah rumah di kab/kota	305.625	305.628	Disperkim
		2. Jumlah unit PK RTLH	14.646	15.114	Disperkim
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	46.547	46.547	Disperkim
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih	0	0	Disperkim

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dari 1 tahun)			
		5. Rasio rumah dan KK	410.013 -- x 100% 305.625	134%	Disperkim
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	0	71	Disperkim
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12	12	Disperkim
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1178	1178	Disperkim
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan	1178	1178	Disperkim
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	1178	1178	Disperkim
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	12	12	Disperkim
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	0	Disperkim
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	12	12	Disperkim
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	12	12	Disperkim
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	12	12	Disperkim
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota	10	10 kejadian	Satpol PP & Damkar

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang ditangani			
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2.170	2.170	Satpol PP & Damkar
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	8	Satpol PP & Damkar
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	3	Satpol PP & Damkar
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5	5	Satpol PP & Damkar
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Ada	Satpol PP & Damkar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Tidak Melaksanakan	0	BPBD
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{1,235,018}{1,235,018} \times 100$	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan			

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tidak melaksakan	0	BPBD
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Tidak melaksakan	0	BPBD
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	320 -- x 100% 71.473	0,45%	BPBD
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	320 -- x 100% 71.473	0,45%	BPBD
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1.235.018 --- x 100% 1.235.018	100 %	BPBD
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1.235.018 --- x 100% 1.235.018	100 %	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Tidak ada suatus KLB		BPBD

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	2 --- x 100% 2	100 %	BPBD
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	869 -- x 100% 869	100 %	BPBD
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	3.160 ---x 100% 3.160	100 %	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	484	406 Layanan	Satpol PP & Damkar
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3	3 Pos	Satpol PP & Damkar
		3. Tersedianya aparatur selama	26	26 Orang	Satpol PP & Damkar

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan			
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0	Satpol PP & Damkar
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	28	28 Sarpras	Satpol PP & Damkar
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	28	28 Orang	Satpol PP & Damkar
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam	0	0	Satpol PP & Damkar

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	0	Satpol PP & Damkar
6	SOSIAL				
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
		1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	2 jenis (offline & online)	Dinsos permasdes
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.483	2.483 anak	Dinsos permasdes
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk	0	Belum Terbentuk	Dinsos permasdes
		4. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau	621	621	Dinsos permasdes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	2 unit	Dinsos permasdes
		6. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	343	343 orang	Dinsos permasdes
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	1 buah shelter	Dinsos permasdes
		8. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang	28	28 orang	Dinsos permasdes
		9. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu	266	266 orang	Dinsos permasdes
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	9	9 paket	Dinsos permasdes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		11. jumlah paket perbekalan yang tersedia	0	0	Dinsos permasdes
		12. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	28	28	Dinsos permasdes
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter	0	0	Dinsos permasdes
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan	50	50 orang	Dinsos permasdes
		15. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/ pusat	45	45 orang	Dinsos permasdes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesejahteraan sosial			
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5	5 paket	Dinsos permasdes
		17. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	0 orang	Dinsos permasdes
		18. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehata dasar	0	0 orang	Dinsos permasdes
		19. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	7	7 orang	Dinsos permasdes

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		20. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	7	7 orang	Dinsos permasdes
		21. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk	20	20 orang	Dinsos permasdes
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan	450	450 orang	Dinsos permasdes
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang	57	57	Dinsos permasdes
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki	0	0	Dinsos permasdes
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan	0	0	Dinsos permasdes
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	0	Dinsos permasdes
		6. Jumlah pekerja sosial	32	32 orang	Dinsos

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang Tersedia			permasdes
7	Tenaga Kerja				
		Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja			
		1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kab	Ada	Ada	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	97,33%	97,33%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	2	2	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	14 ---x 100% 9	155,56%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	5 ---x 100% 9	56%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9 ---x 100% 211	4,27%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	8 ----x 100% 31	26%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	0 --- x 100% 31	0%	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	731	731 orang	Diskop UKM Nakertrans
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	211 --- x 100% 211	100%	Diskop UKM Nakertrans
		8. Persentase penyerapan lulusan	45 ---x 100% 79	57%	Diskop UKM Nakertrans
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	34 ---x 100% 34	100%	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	290 --- x 100% 290	100%	Diskop UKM Nakertrans
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	80	80 orang	Diskop UKM Nakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	226 ----x 100% 339	56,6%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Data tingkat produktivitas total	4,63%	4,63%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS			
		1. Persentase	156	39,10%	Diskop

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	-- X 100% 399		UKM Nakertrans
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	10 ---X 100% 15	67%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan	39	39	Diskop UKM
		4. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	69 ---x 100% 69	100%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	2.058 --x 100% 2.078	181%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	83 --x 100% 399	11,15%	Diskop UKM Nakertrans
		7. Jumlah mogok kerja	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	66	66	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah perselisihan antar	0	0	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		SP/SB di perusahaan			
		11. Jumlah perselisihan PHK	58	58	Diskop UKM Nakertrans
		12. Jumlah Pekerja yang ter-PHK	238	238	Diskop UKM Nakertrans
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	88	88	Diskop UKM Nakertrans
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yangdiberdayakan	Ada 1	Ada 1	Diskop UKM Nakertrans
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	121 --x 100% 124	97,58%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten			
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayahkab	9.476	9.476	Diskop UKM Nakertrans
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	17.094	17.094	Diskop UKM Nakertrans
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	43	43	Diskop UKM Nakertrans
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam	-	-	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kab			
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	2	Diskop UKM Nakertrans
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	-	-	Diskop UKM Nakertrans
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	3.153	3.153	Diskop UKM Nakertrans
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	9.174	9.174	Diskop UKM Nakertrans
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.	290 ---x 100% 290	100%	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.	290	290	Diskop UKM Nakertrans
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	-	-	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang terdata			
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	290 ---x 100% 290	100%	Diskop UKM Nakertrans
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	20 ---x 100% 20	100%	Diskop UKM Nakertrans
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran	Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran	Diskop UKM Nakertrans
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD.			
		1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG	43 OPD	43 OPD	DP3AP2KB
		2. Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	34 Program / 41 Kegiatan	34 Program / 41 Kegiatan	DP3AP2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		terkait kab			
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 media massa	3 media massa	DP3AP2KB
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	64 Lembaga	64 Lembaga	DP3AP2KB
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{15}{15} \times 100\%$	100%	DP3AP2KB
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat Pelatihan	6 (2 Puskesmas, 2 Sekolah, 2 Kecamatan)	6 (2 Puskesmas, 2 Sekolah, 2 Kecamatan)	DP3AP2KB
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD kab)	P2TP2A, Forum Anak Jepara, LGNOTA	P2TP2A, Forum Anak Jepara, LGNOTA	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak			
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan	0 organisasi	0 organisasi	DP3AP2KB

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan			
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	0 orang	0 orang	DP3AP2KB
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0 Lembaga	0 Lembaga	DP3AP2KB
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	0 Lembaga	0 Lembaga	DP3AP2KB
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 perda (No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda no. 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)	1	DP3AP2KB
		6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan	1 Lembaga (P2TP2A)	1	DP3AP2KB

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		hak perempuan yg telah Terstandardisasi			
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	13 ----x100% 13	100%	DP3AP2KB
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Gudang Cadangan Kab. Jepara	DKPP
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Ada	DKPP
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Tidak ada	DKPP
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Ada	DKPP
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	1 dokumen	DKPP
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	ada	DKPP

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	ada	DKPP
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada	DKPP
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	109	109	DPMPTSP
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	1/1 X 100	Tdi	Pertanahan Kab. Jepara
		3. SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah	1/1 X 100	Tdi	Bag. Pem
		4. Dokumen Izin membuka tanah	1/1 X 100	Tdi	Bag. Pem
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten	426/432 x100%	98,61%	Bag.Pem
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil Perhitungan kabupaten terhadap : a. Indeks Kualitas Air,(IKA) b. Indeks Kualitas	IKA : 45,45 IKU : 87,80 IKTLH : 50,48	IKA : 45,45 IKU : 87,80 IKTLH : 50,48	DLH

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab	Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R	Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R	DLH
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	27 / 27	100%	DLH
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD)di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab	2 / 487	0,41 %	DLH
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH	0/0	0 %	DLH

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kab			
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan 6. ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0/0	0 %	DLH
		7. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang ditangani	20/20	100 %	DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan.	8.836 / 8.844	99,91%	Disdukcapil
		2. Penerbitan akta perceraian	2.153/2.252	95,60%	Disdukcapil
		3. Penerbitan akta kematian	9.233 / 9.233	100%	Disdukcapil
		4. Penyajian data kependudukan	2/2	100%	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan	1. Jumlah desa yang	8	8 desa	Dinsosper

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Desa	terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.			mades
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	0	Dinsosper mades
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5	5 lembaga	Dinsosper mades
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	184	184	Dinsosper mades
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	1	DP3AP2KB

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,89	22,89	DP3AP2KB
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	6,27%	6,27%	DP3AP2KB
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	408.940 ---x100% 1.236.674	33,07 %	DP3AP2KB
		5. Jumlah stakeholders/pe mangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	19	19 Stakholder	DP3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	48 --- x 100% 60	80%	DP3AP2KB
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode	134.294 / 201.620 x 100%	73,6%	DP3AP2KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
		3. Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	69	69 kelompok	DP3AP2KB
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	9.876/18.635 x 100%	55.00%	DP3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		1. Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	1 / 195 x 100%	0,51%	DP3AP2KB
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	82.494/452.978 x 100%	18,21%	DP3AP2KB
15.	Perhubungan				
		Rasio konektivitas			
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	94 /170 X 100	55,30%	Dishub
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	13.177/23.952 X 100	56,27%	Dishub
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota	5/ 5 x 100%	100%	Dishub

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.			
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	31,592,24/43,420 X 100	73%	Dishub
16.	Komunikasi dan Informatika				
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang terhubung denganakses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		1. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	28 ---- x 100% 42	66.67%	Diskominfo
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	28 ---- x 100% 42	66.67%	Diskominfo
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi	42	42	Diskominfo

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah			
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi			
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yg dimanfaatkan secara daring dg memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	137 x100% 137	100%	Diskominfo
		2. Persentase perangkat daerah	<u>42</u> x100%	100%	Diskominfo

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	42		
		3. Persentase perangkat daerah yang pengimplementasian layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{42}{42} \times 100$	100%	Diskominfo
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{313}{313} \times 100$	100%	Diskominfo
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{10}{131} \times 100$	7,63%	Diskominfo

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{313}{100} \times 313$	100%	Diskominfo
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{250}{250} \times 100$	100%	Diskominfo
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{26}{26} \times 100$	100%	Diskominfo
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{26}{26} \times 100$	100%	Diskominfo
		10. Persentase perangkat daerah yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo)	$\frac{26}{26} \times 100 \%$	100%	Diskominfo
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{19}{51} \times 100\%$	37,25%	Diskominfo
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi	$\frac{25}{26} \times 100\%$	96,15%	Diskominfo

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		inovasi yang mendukung smart city			
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	3/62	4,84%	Diskominfo
		14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	1. Perbup Tentang Masterplan Smart City 2. Perbup ttg tata kelola TIK 3. Perbup tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Diskominfo
		Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah			
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan	125 / 140 x 100%	89,29%	Diskominfo

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pemerintah kab			
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	27.048/ 27.093 x 100%	99,83%	Diskominfo
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	76/ 76 x 100%	100%	
17.	Koperasi dan UKM				
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			
		1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab	77 --- x 100% 528	14,58%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang	1 -x 100% 9	11,11%	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab			
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	311 --x 100% 673	46,21%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	102 ---x 100% 277	36,82%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	100 ---x 100% 673	14,86%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	215 --- x 100% 164.210	0,13%	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		keanggotaan dalam daerah kab			
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	16 --- x 100% 673	2,38%	Diskop UKM Nakertrans
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Tidak diisi	Diskop UKM Nakertrans
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	673 -- x 100% 673	100%	Diskop UKM Nakertrans
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	0 ----x 100% 673	0,00%	Diskop UKM Nakertrans
		11. Persentase yang diberikan	3 ----x 100% 673	0,45%	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab			
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	170 ---x 100% 673	25,26%	Diskop UKM Nakertrans
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah ka dalam 1 (satu) daerah kab	3 ----x 100% 673	0,45%	Diskop UKM Nakertrans
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha			
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3.219 -- x 100% 76.800	4.19%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data	0 ---x 100% 76.800	0	Diskop UKM Nakertrans

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		system (ODS)			
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	193 ---x 100% 76.800	0,25%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	192 ---x 100% 76.608	0,25%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	605 ---x 100% 76.195	0,79%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3.590 ---x 100% 76.800	4,67%	Diskop UKM Nakertrans
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	684 ----x 100% 76.800	0,89%	Diskop UKM Nakertrans
18	Penanaman Modal				
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten			
		1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Ada	1	DPMPTSP
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian	11	11	DPMPTSP

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		fasilitas/insentif penanaman modal			
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	18	18 laporan	DPMPTSP
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	2 kali	DPMPTSP
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada	Tidak aada	DPMPTSP
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	12	12	DPMPTSP
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	752	752	DPMPTSP
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	14.658	14.658	DPMPTSP
		9. Laporan realisasi penanaman modal	9.585.327 .105.644	9.585.327.10 5.644	DPMPTSP
		10. Pembinaan paratur penanaman modal tingkat kab.	25	25 orang	DPMPTSP
		11. Pembinaan penanaman	1.071	1.071	DPMPTSP

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		modal PMA dan PMDN		perusahaan	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kab	15	15	DPMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga				
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	150	150	Disdikpora
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	150	150	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	625 -- X 100% 283.244	0,22%	Disdikpora
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	190 -- X 100% 283.244	0,06%	Disdikpora
		Peningkatan Prestasi Olahraga			
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	125 -- X 100% 175	71,43%	Disdikpora

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	10	10	Disdikpora
20	Statistik				
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		1. Tersedianya buku profil daerah	Ada 3	1. Jepara Dalam Angka 2. PDRD 3. Statistik Sektoral Kab Jepara	Diskominfo
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Tidak melaksanakan	Diskominfo
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	233	233	Diskominfo
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Tidak ada	Diskominfo
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	233	233	Diskominfo
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	115/233 X 100	49,36%	Diskominfo
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	19/40 X 100	55%	Diskominfo
21	Persandian				

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	8/10 x100%	80%	Diskominfo
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	292/292 X 100%	100%	Diskominfo
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	292/292 x100%	100%	Diskominfo
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang	51/51 X 100%	100%	Diskominfo

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		ditetapkan			
22	Kebudayaan				
		Terlestarikannya Cagar Budaya			
		1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	40	40 obyek	Disparbud
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaa n keberagaman)	2	2	Disparbud
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat)	40	40 obyek	Disparbud
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata	18	18 Tim	Disparbud

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	5	5 tim	Disparbud
		6. Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	3	3 Tim	Disparbud
		7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kotake luar kota dengan dukungan data	0	Tidak ada	Disparbud
		8. Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	0	Tidak ada	Disparbud
		9. Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	1 Cagar Budaya	Disparbud
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	612	612 buah	Disparbud
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan	15.312	15.312 orang	Disparbud

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kegiatan museum			
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	13	13	Disparbud
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	1 Tim	Disparbud
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupatwn	1	1 Tim	Disparbud
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	5 tim	Disparbud
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	10	10 orang	Disparbud
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	11	11 orang	Disparbud
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	38	38 unit	Disparbud
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	13	13 kali	Disparbud
23	Perpustakaan				
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
		1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	317.855 / 1.236.674 x 100%	25,70%	Diskarpus

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	37.437/ 1.236.674 x 100%	3.03 %	Diskarpus
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	915 / 1.236.674 x 100%	0,07%	Diskarpus
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	17 / 915 x 100%	1,86%	Diskarpus
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	533	Perpustakaan Keliling 527 kali, Lomba dalam rangka Minat Baca dan Lomba Perpustakaan 3 kali, Sosialisasi Gemar Membaca 3 kali	Diskarpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada	0	Diskarpus
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	0	Diskarpus
		3. Jumlah koleksi budaya etnis	214	214	Diskarpus

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)		eksemplar	
24	Kearsipan				
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	68.603/110.809 x 100%	61,91	Diskarpus
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkandaftar arsip	138.133 / 180.605 x 100%	76,71%	Diskarpus
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	91.235 /91.235 x 100%	100%	Diskarpus
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	500 / 382.109 x 100%	0,13%	Diskarpus
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2.039	2.039	Diskarpus
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibatbencana yang sesuai NSPK	0	0	Diskarpus
		3. Penyelamatan	64	64	Diskarpus

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten			
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yangsesuai NSPK	4.000	4.000	Diskarpus
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian	4	4	Diskarpus
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipandaerah kab yang sesuai NSPK	0	0	Diskarpus
URUSAN PILIHAN					
25	Kelautan dan Perikanan				
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			
		1. Jumlah rumah tangga nelayan	276	276 RT	Dinas

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			Perikanan
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	7 / 10 x 100%	70%	Dinas Perikanan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	14 izin	14 izin	Dinas Perikanan
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	540 orang	540 orang	Dinas Perikanan
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.578.213.000 ekor	1.578.213.000 ekor	Dinas Perikanan
26	Pariwisata				
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	24	24	Disparbud
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	158	158	Disparbud
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	625	625	Disparbud
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5.310	5.310	Disparbud
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	16	16	Disparbud
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	-	Tidak ada	Disparbud
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	8	8	Disparbud
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	19 / 1.445 X 100%	1,3%	Disparbud
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sectorkepariwisataan	440/440 X 100%	100%	Disparbud

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat	26	26 lokasi	Disparbud
27	Pertanian				
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	107 unit sarana Pertanian dan 58 unit prasarana pertanian	107 unit sarana Pertanian dan 58 unit prasarana pertanian	DKPP
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	58	58 unit	DKPP
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	1	1 dokumen	DKPP
		4. Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	58/58 x 100%	100%	DKPP
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertaniankabupaten	1/1 x 100%	100%	DKPP
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan encana	45/48 x 100%	93,8 %	DKPP
28	Kehutanan (tidak menyelenggarakan urusan kehutanan)				
		1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Tdi	

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Tdi	
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura		Tdi	
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		Tdi	
29	ESDM (Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten)				
		1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panasbumi dalam daerah kab			Tidak ada
30	Perdagangan				
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	91/91 izin	100%	Disperindag
		2. Persentase penerbitan TDG	24 / 24 x 100%	100%	Disperindag
		3. persentase gudang yang tidak memiliki TDG	24 / 34 x 100%	70,58%	Disperindag
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Tidakada penerbitan STPW	Surat Keterangan Disperindag	Disperindag

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab	$0 / 0 \times 100\%$	0%	Disperindag
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu		SPKA sudah menjadi kewenangan pusat	Disperindag
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = \frac{(a+b) \times 100}{x \times 100}$ $= \frac{(0,5+0)}{1} \times 100$ $= 50\%$	50%	Disperindag
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$\frac{328,47}{64} \times 100\%$	5,13%	Disperindag
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$a = 30.055.871$	3,4%	Disperindag

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			$b = 90\% \times 31.157.485 = 28.041.736$ $c = 31.157.485$ $x = \frac{a}{(b \times c)} \times 100\%$ $= \frac{30.055.871}{(28.041.736 \times 31.157.485)} \times 100\%$ $= 3,4\%$		
		10. Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{3.891}{3.891} \times 100$	100%	disperindag
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{266}{908} \times 100$	29%	Disperindag
31	Perindustrian				
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab			
		1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab		Tidak menerbitkan IUKI	DPMPSTP
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN			

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang ditetapkan dalam RPIP			
		1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	$= a+b$ $= 30+20$ $= 50$	50%	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	$2.804/2.804$ $\times 100\%$	100% izin (DPMPTSP)	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	$0/0$ $\times 100\%$	0 izin	Disperindag
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1. Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	$2851/193$ $\times 100\%$	888,16%	Disperindag

No .	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
31	Transmigrasi				
		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1	1 telah diberangkatkan ke lokasi penempatan di salulisu Sulawesi barat	Diskop UKM Nakertrans
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	1	
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	1	1	

B. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

❖ **Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, tingkat keberhasilan atau capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
 Dari 39.198 anak yang berusia 5-6 tahun, ada 34.133 anak yang sudah tamat maupun sedang belajar di satuan PAUD selama tahun 2022 atau capaiannya sebesar 87,08%.
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
 Pada Tahun 2022, anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar mencapai 123.956 orang dari 123.238 total anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Jepara atau 99,42% sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar.

3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

Pada tahun 2022, di Kabupaten Jepara terdapat dari total anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Jepara yaitu 60.401 anak usia 13-15, terdapat 52.873 anak yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama atau sebesar 87,54%.

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Dari total 4.671 anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten Jepara, 2.225 belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 47,63%

❖ **Urusan Kesehatan**

Indikator kinerja kunci untuk urusan kesehatan adalah :

1. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara terbilang cukup besar. Sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.236.674 jiwa. Sedangkan daya tampung rumah sakit rujukan yang ada adalah 1.114 atau capaiannya baru sebesar 0,09%.

2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi.

Untuk melayani kesehatan masyarakat, di Jepara sudah ada 6 buah rumah sakit dan jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi sebanyak 5 dengan capaian 83,33%.

3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah ibu hamil yang ada di Jepara mencapai 20.841 orang, dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak 19.820 capaiannya sebesar 95,1%

4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.

Dari 18.635 ibu bersalin yang ada di Jepara 100% sudah mendapatkan pelayanan persalinan.

5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Bayi yang lahir pada tahun 2022 sebanyak 18.637 dan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebanyak 18.519 dengan capaian 99,37%.

6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Pada tahun 2022, balita di kabupaten Jepara sebanyak 91.862 anak dan semuanya sudah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%.

7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pada tahun 2022, dari anak usia pendidikan dasar yang berjumlah 40.610 anak, yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 37.488 anak atau capainnya 92,31 %

8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Penduduk usia 15-59 tahun yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 799.047 orang, dan yang sudah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 741.567 orang atau 92,81%

9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di kabupaten Jepara sebanyak 128.564, sedangkan mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sejumlah 123.152 orang 95,79 %

10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Penderita hipertensi yang ada di Jepara sebanyak 361.282 orang. Sedangkan penderita hipertensi yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 331.204 orang dengan capaian 91,67%

- 11.Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%

Penderita Diabetes Mellitus yang ada di Jepara sebanyak 30.570 orang. Semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- 12.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

Penderita ODGJ yang ada di Jepara sebanyak 3.031 orang. Sedangkan penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 3.000 orang dengan capaian 98,98%

- 13.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

Penderita TBC yang ada di Jepara sebanyak 5.030 orang. Semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%.

- 14.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang ada di Jepara sebanyak 26.022 orang dan yang sudah seluruhnya mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar dengan capaian 100%.

❖ **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, di kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk data IMB-nya. Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten

Di Kabupaten Jepara luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai sejumlah 97 (ha) dan semuanya telah terlindungi oleh infrastuktur pengendalian banjir di wilayah sungai dengan capaian 100%.

2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten.

Di Kabupaten Jepara, luas kawasan permukiman sepanjang rawan abrasi di wilayah sungai sepanjang 1 dan telah terlindungi oleh infrastuktur pengaman patai di wilayah sungai.

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 28.247, dan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun 2022 sepanjang 11.267 atau 39,89%

4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.

Dari total rumah tangga di Kabupaten Jepara adalah 402.129 rumah, sebanyak 384.405 mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 95,59%

5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic.

Dari seluruh kab jepara jumlah rumah yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu 402.129 terdapat 299.671 yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur

tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dengan capaian 74,52%

6. Rasio kepatuhan IMB kabupaten.

Dari 1.333 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku 918 yang sudah sesuai pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya. Dengan capaian 68,87%

7. Tingkat Kemantapan jalan.

Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten Jepara adalah 872.142 km, dan yang kondisi mantap sepanjang 772.223 km atau capaiannya sebesar 88,54%.

8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

Dari 650 kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten Jepara, ada 73 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 11,23%.

9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.

Dari total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak 1.154 semuanya tidak terjadi kecelakaan konstruksi.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten.

Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022 sebanyak 34 dari 25 unit yang direncanakan dengan capaian sebesar 136%

2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.

Pada tahun 2022 kabupaten Jepara tidak ada kegiatan tentang Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani.
Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang ada di Kabupaten Jepara adalah 138,91 hektar, 71,18 hektar sudah ditangani sehingga target 51,24%
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Dari jumlah total seluruh unit rumah di Kabupaten Jepara yatu 305.625 unit, ada 46.547 unit rumah yang tidak layak huni. Dengan capaian 51,23%
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).
Dari total rumah yang ada di Jepara yaitu 305.625 unit, Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 1.178 unit. Dengan capaian 0,38%

❖ **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
Dari 10 pengaduan pelanggaran yang masuk pada tahun 2022 semuanya bisa diselesaian.
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 7 Perda dan seluruhnya memuat sanksi yang ditegakkan.
3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
Dari seluruh penduduk Kabupaten Jepara, yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana yaitu sebanyak 1.235.018 orang.
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Jumah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan rawan benecana sebanyak 320 sedangkan yang berada di kawasan rawan bencana sebanyak 71.473

5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dari 3.130 yang menjadi korban bencana dan semuanya telah memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 3.130 orang. capaian 100%

6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari 101 kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2022, yang dapat dijangkau dan ditangani sampai padam sebanyak 80 kejadian sehingga capainnya sebesar 79,20%.

7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.

Response time penanganan kebakaran adalah 12,13 menit.

❖ **Urusan Sosial**

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.483 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 1.659 orang atau capaiannya sebesar 66,81%

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.

Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 450, dan seluruh korban bencana alam dan sosial sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga capaian kinerjanya 100%.

❖ **Tenaga Kerja**

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

Pada tahun 2022 dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten jepara sebanyak 334 terdapat 11 yang mengacu pada RTKD , capaian 3,29%.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 128.510 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 907 orang atau 0,71%.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 128.510 orang. Sedangkan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 23,249,852,94 sehingga capaiannya adalah 18091.86%.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar).

Pada tahun 2022, perusahaan yang ada di Jepara berjumlah 399. Perusahaan sudah menerapkan tata kelola kerja yang baik sebanyak 226 bperusahaan atau 56,64%.

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah.

Dari 17.094 pencari kerja yang terdaftar, ada 9.174 pencari kerja yang ditempatkan atau 53,67%.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

Belanja langsung APBD Kab. Jepara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 895.054.639.966 sedangkan Jumlah ARG pada belanja langsung APBD sebesar Rp. 37.116.120.000 atau 4,15%.

2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten.

Pada tahun 2022, di Kabupaten Jepara terdapat 340.615 anak (berusia kurang dari 18 tahun) dan 15 anak mengalami kekerasan atau 0,004 %.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).
0,002 % atau 13 orang dari 614.449 orang perempuan yang ada di Kabupaten Jepara mengalami kekerasan.

❖ Pangan

1. Persentase cadangan pangan.

Pada tahun 2022, jumlah cadangan pangan 52 ton.

❖ Pertanian.

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara dari 1.304.257 M2 luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) seluruhnya sudah sesuai sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum pada tahun 2022 seluas 1.673 m2 dengan capaian 100%

3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Jepara dari luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan seluas 1.304.257 M2, semuanya sudah sesuai peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Pada tahun 2022 tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat.

Tidak tersedia tanah untuk rakyat.

6. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

Kabupaten Jepara tidak menangani sengketa tanah garapan.

❖ **Lingkungan Hidup.**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 63,70
- Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) : 45,45
- Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) : 87,80
- Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%) : 50,48

2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten.

Pada saat ini, persoalan sampah menjadi masalah di semua wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Jepara dari 150.516,42 timbunan sampah, baru 40,39% atau 60.798,05 timbunan sampah yang dapat tertangani.

3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2022, ada 17 Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dan semuanya atau 17 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten Jepara. dengan capaian 100%.

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Perekaman KTP Elektronik

Pada tahun 2022, dari jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yaitu 935.924 orang, terdapat 916.313 orang 17 tahun keatas

yang sudah melakukan perekaman dan memiliki ktp-el capaiannya 97,90%.

2. Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.

Dari 330.720 anak di tahun 2022 yang ada di Jepara, sebanyak 109.649 atau 33,15% anak sudah memiliki KIA.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dari jumlah penduduk 0-18 tahun, dari 340.615 jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 321.418 orang atau 94,36%.

4. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Dari 25 Perangkat Daerah (kecamatan tidak termasuk), yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebanyak 12 PD dengan capaian 48%

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Persentase pengentasan desa tertinggal.

Pada tahun 2022, tidak terdapat desa yang masuk kategori desa tertinggal, yaitu Desa Parang Kecamatan Karimunjawa. Dan Desa Parang ini belum memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun persentase peningkatan status desa mandiri.

2. Persentase peningkatan status desa mandiri.

Pada tahun 2022, terdapat 181 desa yang berstatus sebagai desa berkembang dan terdapat 65 desa yang termasuk kategori desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka kelahiran total di kabupaten Jepara adalah 2,05

2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2022 sebanyak 201.620 PUS dan yang menjadi peserta KB aktif Modern sebanyak 66,61 atau sebanyak 134.294 PUS.

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2022 sebanyak 201.620 PUS, dan yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani sebanyak 36.083 PUS atau 17,90%.

❖ **Perhubungan**

1. Rasio konektivitas kabupaten

Rasio konektivitas kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ yaitu $0,948 + 0,64 / 2 = 0,794$ trayek/ lintas Kinerja lalu lintas kabupaten.

2. V/C ratio di jalan kabupaten Jepara adalah 0,21%.

❖ **Komunikasi dan Informatika**

1. Persentase Perangkat Organisasi Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

Dari 28 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara, OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 42 PD atau 66,67%.

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial.

Dari 23 Layanan Publik yang ada baru 15 yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 69,26%.

3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Jepara tahun sebanyak 1.236.674 jiwa, yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Jepara sebanyak 856.549 jiwa. 69,26%

❖ **Koperasi dan UKM**

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.
Di Tahun 2022, total koperasi yang ada di Jepara sebanyak 673 koperasi, dan yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset sebanyak 170 buah. 34,18%
2. Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.
Dari 76.800 usaha kecil yang ada di Jepara, ada 3.219 usaha kecil yang menjadi wirausaha atau 4.19%.

❖ **Penanaman Modal.**

1. Jumlah investasi kabupaten jepara tahun 2022 sebesar 9.585.327.105.644 dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 7.304.118.903.839 dengan Persentase peningkatan investasi di kabupaten Realisasi investasi tahun 2022 adalah 18,94%

❖ **Kepemudaan dan Olahraga**

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
Pada tahun 2022, di kabupaten Jepara terdapat 283.244 pemuda (umur 16-30 tahun) dan sejumlah 11.911 orang berwirausaha. 4,20%
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
Dari total 283.244 pemuda (umur 16-30 tahun) di tahun 2022, terdapat 60.743 orang yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi. 21,45%
3. Peningkatan prestasi olahraga

Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2022 sebanyak 44 medali dari berbagai cabang olahraga.

❖ **Statistik**

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Dari 26 Perangkat Daerah (termasuk kecamatan) yang ada di kabupaten Jepara, sudah 26 yang telah menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100%.
2. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.
Dari 26 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Jepara, baru 26 yang telah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100%.

❖ **Persandian.**

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Jepara
Pada tahun 2022, di kabupaten jepara jumlah nilai per area keamanan informasi 475 sedangkan area penilaian sebanyak 645 dengan capaian 73,64%.

❖ **Kebudayaan**

1. Terlestarikannya Cagar Budaya.
Kabupaten Jepara memiliki 40 cagar budaya sampai tahun 2022. Sejumlah 37 cagar budaya dilestarikan. Dengan capaian 92,5%

❖ **Perpustakaan**

1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
survey kajian kegemaran membaca kabupaten jepara sebesar 62,19%.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

survey Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) Kabupaten Jepara sebesar 77,12%

❖ **Kearsipan**

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43).

Capaian indikator kinerja kunci ini diukur melalui $T = (a + i + s + j)/4$ Capaiannya 60%.

2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Capaian indikator kinerja kunci ini diukur melalui rumus $T = (m + b + g + a + c + i)/6$. Capaiannya 66,67%.

URUSAN PILIHAN

❖ **Kelautan Perikanan**

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).

Dari target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Jepara 36.189,85 ton, dan total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) sebanyak 58.197,453 ton dengan capaian 160,81%

❖ **Pariwisata**

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.

Sektor pariwisata adalah yang paling terdampak dengan adanya pandemic covid-19. Jika dibandingkan tahun akan tetapi sudah ada peningkatan yang sangat pesat dengan melandainya kasus

Covid-19 serta dibukanya ppkm dimana jumlah wisatawan mancanegara yang datang sebanyak 5.260 orang, jumlah yang datang pada tahun 2021 sebanyak 50, persentasenya menurun drastis yaitu 10,520%

2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara per kebangsaan.

Tahun 2021 wisatawan yang berkunjung ke Jepara sebanyak 50 orang, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 1.497.799 orang, persentasenya 517,54%.

3. Tingkat hunian akomodasi.

Dari 399.310 jumlah kamar yang tersedia, pada tahun 2022 terdata ada 149.102 kamar yang terjual atau 37,34%.

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.

Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah) 35.001.075 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah) 1.502.773 atau 4,29

5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Realisasi PAD tahun 2022 sebesar 427.583.098.963, sedangkan realisasi PAD dari sektor pariwisata tahun 2022 sebesar 19.415.296.160 dengan capaian 4,54%.

❖ **Pertanian**

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun.

Produktivitas pertanian di tahun 2022 adalah 9,37 ton/hektar.

2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

Kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 26.411 . sedangkan di tahun 2022 sebanyak 27.166 capaiannya sebesar 2,86%.

❖ **Kehutanan**

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan urusan kehutanan.

❖ **ESDM**

Kabupaten Jepara tidak ada perusahaan panas bumi.

❖ **Perdagangan**

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Pada tahun 2022, terdapat 91 pelaku usaha perdagangan, dan seluruhnya sudah memiliki izin sesuai ketentuan sebanyak 91 dengan capaian 100%

2. Persentase kinerja realisasi pupuk.

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sebanyak 31.157.485, sedangkan realisasinya sebesar 30.055.871 atau 48,7%.

3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Jepara adalah 3.891, seluruhnya merupakan UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2022.

❖ **Perindustrian**

1. Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.

Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021 sebanyak 8.449, sedangkan tahun 2022 sebanyak 13.136. capaian kinerja untuk urusan perindustrian adalah 35,7%.

2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten).

Capaiannya sebesar 50%.

3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

- Dari 2.804 izin yang dikeluarkan seluruhnya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, sehingga capaiannya sebesar 100%.
- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan pada tahun 2022 tidak ada.
 - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara tidak menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
 - Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.
Sampai dengan tahun 2022, informasi industri secara lengkap terkini ada 3 yaitu : Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energy

❖ **Transmigrasi**

Kebijakan Pemerintah Pusat, tahun 2022 melaksanakan pemberangkatan transmigrasi sebanyak 1 kk yang telah diberangkatkan ke lokasi penempatan di salulisu provinsi Sulawesi barat.

Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	34.133 .. x 100 % 39.198	87,08%	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	123.238 ...x 100 % 123.956	99,42%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	52.873 ..x 100 % 60.401	87,54%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	2.225 ... x 100 % 4.671	47,63%	Disdikpora
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	927 / 1.236.674 X 100	0,0075 %	Dinkes
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	5/6 x 100	83,33%	Dinkes
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	19.820 / 20.841 x 100	95,1 %	Dinkes
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	18.635/ 18.635 x 100	100 %	Dinkes
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	18.519/ 18.637 X 100	99,37 %	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91.862/ 91.862 X 100	100 %	Dinkes
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	37.488/ 40.610 X 100	92,31 %	Dinkes
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	741.567 / 799.047 X 100	92,81%	Dinkes
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	123.152/ 128.564 X 100	95,79 %	Dinkes
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	331.204/ 361.282 X 100	91,67 %	Dinkes
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.570/ 30.570 X 100	100 %	Dinkes
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3.000/ 3.031 X 100	98,98%	Dinkes
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan	5.030/	100 %	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pelayanan TBC sesuai standar	5.030 X 100		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	26.022/ 26.022 X 100	100 %	Dinkes
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.	97/ 97 X 100	100%	DPUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	1/1 X 100	Tdi	DPUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	11.267 --- x 100 % 28.247	39,89%	DPUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	384.405 --- x 100 % 402.129	95,59 %	DPUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	299.671 ---x 100 % 402.129	74,52 %	DPUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	918 --- x 100 % 1.333	68,87 %	DPUPR
		Tingkat Kemantapan jalan.	772.223 --- x 100 % 872.142	88,54%	DPUPR
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	73 --- x 100 % 650	11,23%	DPUPR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 --- x 100 % 1154	0	DPUPR
4.	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.	34 -- x 100% 25	136%	Disperkim
		Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1 -- x 100% 1	Tdi	Disperkim
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	71,18 -- x 100% 138,91	51,24%	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	46.547/ 305.625 x 100%	15,23%	Disperkim
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan	1.178 / 305.625 x 100%	0,38%	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Utilitas Umum)			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.	$10/10 \times 100\%$	100%	Satpol PP & Damkar
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$7/7 \times 100\%$	100%	Satpol PP & Damkar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$1.235.018 / 1.235.018 \times 100\%$	100%%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$320/71.473 \times 100\%$	0,45%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$3.130/3.130 \times 100\%$	100 %	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{80}{101}$	79,20%	Satpol PP & Damkar
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	12,13 Menit	Satpol PP & Damkar
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$1.659 / 2.483 \times 100\%$	66,81%	Dinsos Permasdes
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	450/450	100%	Dinsos Permasdes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kabupaten.			
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	11/334 X 100	3,29%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	907/128.510 X 100%	0,71%	Diskop UKM Nakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.	23.249.852,94/ 128.510 X 100	18091,86%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar.	226 --x 100% 399	56,64%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	9.174 --X 100% 17.094	53,67%	Diskop UKM Nakertrans
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	37.116.120 .000/895.054.639.966 x 100%	4,15%	DP3AP2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	15/ 340.615	0,0004%	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13/ 614.449 X 100%	0,002 %	DP3AP2KB
9.	Pangan	Persentase cadangan pangan	52 ton / 100 ton kali 100	52 %	DKPP
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas	1.304.257 m2 /1.304.257 m2 x 100%	100%	DPMPSTSP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		izin lokasi yang diterbitkan			
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1.673 m2/ 1.673 m2 X 100	100%	BPKAD Bid. Asset.
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	1.304.257 m2 /1.304.257 m2 x 100%	100%	DPMPTSP
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1/1 X 100	Tdi	Pertanahan
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	1/1 x 100	Tdi	Bag. Pem Dan Pertanahan
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	1/1 X 100	Tdi	Bag. Pemt.
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	63,70 45,45 87,80 50,48	IKLH : 63,70 IKPA : 45,45 IKPU : 87,80 ITHL : 50,48	DLH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	60.798,05/150.516,42 x 100	40,39%	DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	17 /17 X 100	100%	DLH

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		oleh Pemerintah Daerah			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	916.313/ 935.924x 100	97,90%	Disdukcapil
		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.	109.649/ 330.720x 100	33.15%	Disdukcapil
		Kepemilikan Akta Kelahiran.	321.418/ 340.615x 100	94,36%	Disdukcapil
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12/25 x 100	48% Kecamatan tidak termasuk)	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal.	0/0 x 100	0%	Dinsos Permasdes
		Persentase peningkatan status desa mandiri	65/181x 100%	0%	Dinsos Permasdes
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,05	2,05	DP3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).	134.294/2 01.620 x 100	66,61%	DP3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	36.083/ 201.620 x 100	17,90%	DP3AP2KB
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota.	$\frac{0,948 + 0,64}{2}$	0,794 trayek/ lintas	Dishub
		Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,21	0,21	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang	28/42x 100	66,67%	Diskominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial.	15/23 X 100%	66,22%	Diskominfo
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	856.549/ 1.236.674 x 100	69,26%	Diskominfo
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	170 ...x 100% 673	34,18%	Diskop UKM Nakertrans
		Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha	3,219 x 100% 76.800	4,00%	Diskop UKM Nakertrans
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	9.585.327. 105.644 – 7.304.118. 903.839 / 7.304.118. 903.839	18,94%	DPMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	60.743 ...X 100% 283.244	21,45%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	16.675 X 100% 283.244	5,88%	Disdikpora
		Peningkatan prestasi olahraga.	44	44 medali	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	26/26 X 100%	100%	Diskominfo
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	26/26 X 100%	100%	Diskominfo
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah.	475/645 X 100%	73,64%	Diskominfo
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya.	37/40 x 100	92,5%	Disparbud
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	62,19%.	62,19%	Diskarpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	77,12%	77,12%	Diskarpus
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43	$T(a + I + s + j)/4$ a = 62% I = 77% S = 100% J = 0,13198 %	$(62\% + 77\% + 100\% + 0,13198\%) / 4 = 60\%$	60% Diskarpus
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$(m + b + g + a + c + i)/6$ m = 100% b = 0% g = 100% a = 100% c = 100% I = 0%	$(100\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\% + 0\%) / 6 = 67\%$	66,67% Diskarpus
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).	58.197.453/ 36.189,85 X100	160,81%	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	5.260/ 50	10.520%	Disparbud

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mananegara per kebangsaan.			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	1.497.799 / 289.409 x 100	517,54%	Disparbud
		Tingkat hunian akomodasi.	149.102/ 399.310	37,34%	Disparbud
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku .	1.502773 / 35.001.075	4,29%	BPS
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	19.415.296.160/ 427.583.098.963x 100	4,54%	Disparbud
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	626.027,6 / 66.801,3 ton/ha	9,37 ton/ha	DKPP
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	27.166/ 26.411 x 100	2,86%	DKPP
28	Kehutanan			Tidak melaksanakan	
29	ESDM			Tidak melaksanakan	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	91/91 X 100	100%	Disperindag
		Persentase kinerja realisasi pupuk	30.055.871 / 31.157.485 x 100	96,46%	DKPP
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang	3.891/3.891 x 100.	100%	Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		berlaku).			
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.	13.136-8.449 / 13.136 x 100	55,474%	Disperindag
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten).	(100/2)%	50%	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	2.804/2.804 x 100	100 %	DPMPTSP
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0 izin	DPMPTSP
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0%	Disperindag
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Informasi produksi dan kapasitas	=(1+2) 50%+(10%+10+10% +10% +10%	Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			produksi 2. Informasi bahan baku dan bahan penolangan 3. Informasi bahan bakar/energy Informasi tenaga	= 100% Infor prosduksi fdan kapasitas produksi : 100%	
32	Transmigrasi.		1kk	1 kk	Diskop UKM Nakertrans

C. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

❖ **Perencanaan Dan Keuangan**

1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.
Jumlah realisasi APBD 2022 sebesar Rp. 2.596.127.848.489, sedangkan realisasi jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah 247. 265.568.906 dengan capaian 9,52%
2. Rasio PAD.
Jumlah PAD Kabupaten Jepara di tahun 2022 sebesar 427.538.098.963, sedangkan jumlah PDRB Non Migas sebesar 2.362.937.014.364 Rasio PAD-nya sebesar 18,38%.
3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara adalah level 3.
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara level 3.

5. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures).

Realisasi Belanja APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 2.429.312.277.230 Sedangkan belanja urusan pemerintahan sebesar Rp. 1.987.613.850.834 dan realisasi transfer Expenditures sebesar Rp. 441.698.426.396. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum sebesar 81,82%.

6. Opini Laporan Keuangan.

Kabupaten Jepara, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 Opini Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk tahun 2022 belum keluar.

❖ **Pengadaan**

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.

Kontrak konstruksi keseluruhan di tahun 2022 adalah 148 sedangkan kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022 tidak ada.

2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.

Pada tahun 2022, di Kabupaten Jepara, pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif sejumlah 3.217 paket. Sedangkan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 5.401 paket, capaian kinerjanya sebesar 167,889%.

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

Pada tahun 2022, total belanja operasi dan modal Kabupaten Jepara sebesar Rp. 765.031.551.823,00 sedangkan Jumlah nilai

belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan Rp. 542.753.133.979,10 , sehingga capaiannya sebesar 70,95%.

4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, pada tahun 2022 jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri sebesar Rp. 337.613.000.000,00 sedangkan jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri produk umkm dan koperasi tahun 2022 sebesar Rp. 60.632.000.000. Dengan capaian 17,96%

❖ **Kepegawaian**

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
Pada tahun 2022 Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2022 sebanyak 970 orang. Sedangkan pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.771 orang. Rasionya adalah 182,58%.
2. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
Pada tahun 2022 Jumlah seluruh PNS (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 2.741 orang. Sedangkan jumlah PNS Fungsional sebanyak 372 orang dengan capaian 13,57%
3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
Pegawai Fungsional yang ada di Jepara pada tahun 2022 sebanyak 372 orang dan yang sudah bersertifikat kompetensi sebanyak 132 dengan capaian 35,48%.

❖ **Manajemen Keuangan**

1. Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.
 Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) : 2.605.545.682.020 Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi : 2.429.312.277.230 Budget execution sebesar 93,24%.
2. Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.
 Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) adalah 490.005.622.000 Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah 427.583.098.963 Revenue mobilization : 87,26%.
3. Assets management.
 - Daftar asset tetap : Ada
 - Manual untuk menyusun daftar asset tetap : Ada
 - Proses inventarisasi asset tahunan : Ada
 - Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran : Ya
4. Cash Management: Rasio
 Total Belanja Anggaran tahun 2022 2.309.409.464.300 sebesar nilai Realisasi SILPA : 141.815.571.259 Rasionya : 6,14%.

❖ **Transparansi Dan Partisipasi Publik**

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).
 Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Rp. 2.429.836.102.058.
 Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Rp.2.621.977.599.331.
2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information).
 Total jumlah dokumen yang telah dirinci sebanyak 7 dokumen. Sedangkan yang sudah dipublikasikan di

website Pemda sebanyak 7 dokumen.

**Matriks Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan**

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.	247.265.568.906/2.596.127.848.489 x 100%	9,52%	BPKAD
		Rasio PAD.	427.583.098.963/2.326.937.014.364 x 100 %	18,38 %	BPKAD
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3	level 3	Inspektorat
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 DC dengan catatan)	3 DC (dengan catatan)	Inpektorat
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	1.987.613.850.834 / 2.429.312.277.230 x 100%	81,82%	BPKAD
		Opini Laporan Keuangan	10 kali	Bukti piagam WTP (tahun 2011 – 2020)	BPKAD
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	0/148 X 100%	0	Bag. PBJ

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	5.401/3.217	167,889%	Bag. PBJ
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	542.753.133979,10/765.031.551.823,00X100%	70,95%	Bag. PBJ
		Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. pemerintah daerah	60.632.000.000/337.613.000.000,00X100	17,96%	Bag. PBJ
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.771/970X100%	182,58%	BKD.
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	372/2.741X100%	13,57%	BKD
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	132 / 372X100%	35,48%	BKD
4	Manajemen Keuangan.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2.429.312.277.230/2.605.545.682.020X100%	93,24%	BPKAD
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	427.583.098.963/490.005.622.000X100%	87,26%	BPKAD
		Assets management	Asset tetap, manual untuk menyusun	Ya	BPKAD

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			asset tetap Proses inventarisasi asset tahunan, nilai asset yang tercantum dalam laporan		
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	141.815.571.259/2.309.409.464.300 X 100 %	6,14%	DPKAD
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik).	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).	2.621.977.599.331/2.429.836.102.058 X 100 %	92,67%	BPKAD
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	7 ----- x 100% 7	100%	BPKAD

III. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara dinilai berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui pembandingan Rencana Kinerja dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Jepara.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI
1.	100 % lebih	BAIK SEKALI (A)
2.	> 75 % s/d100 %	Baik (B)
3.	>55 % s/d75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (D)

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2017 – 2022, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 3 Tujuan, 4 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama;
- Misi II terdapat 1 Tujuan, 1 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama;
- Misi III terdapat 1 Tujuan, 6 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama;
- Misi IV terdapat 1 Tujuan, 4 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama;
- Misi V terdapat 1 Tujuan, 1 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja Utama. (16 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 16 _____ (enam belas) Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) _____

Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa sebanyak 14 indikator sasaran atau 48,27% bermakna Baik Sekali, 5 indikator sasaran atau 17,24 % bermakna Baik, dan 4 indikator sasaran atau 13,79 % bermakna Cukup dan 6 indikator kinerja yang belum ada data capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 134,15 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 121,89 %. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2022 bermakna Baik Sekali dan naik sebesar 12,26 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021.

a. **Target kinerja dalam perjanjian kinerja**

Perjanjian Kinerja Bupati Jepara Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jepara. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2022:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bupati Jepara Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	7,48
	Harapan lama sekolah	12,34
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,73
	Kasus Kematian Ibu	14
	Angka kematian bayi	5,15
	Persentase Balita Gizi Buruk	2,0
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	24,2
Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	56,00
	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	87,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target
	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	68,00
Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	87,81
	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,45
Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	12.273.073
	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	5.502.254
	Nilai realisasi Investasi	1.092
Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	4.271.069
Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	341.313
Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan	
	Wisman	5.000
	Wisnus	1.500.000
Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	21,13
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	81,25
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	100
	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	100
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76,51
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	23,80

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP
	Nilai LKJiP	BB
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76
	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP
	Nilai LKJiP	BB
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76
	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4

b. **Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	7,48	8,09
	Harapan lama sekolah	12,34	12,77
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,73	75,97
	Kasus Kematian Ibu	14	13
	Angka kematian bayi	5,15	4,24
	Persentase Balita Gizi Buruk	2,0	1,37
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	24,2	NA
Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	56,00	45,45
	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	87,00	87,8
	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	68,00	50,48
Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00	4,10

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
kreatif, inovatif, dan berdaya saing			
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	87,81	61,37
	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,45	1,45
Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	12.273.073	NA
	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	5.502.254	NA
	Nilai realisasi Investasi	1.092	8.687,71
Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	4.271.069	NA
Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	341.313	NA
Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan		
	Wisman	5.000	5.310
	Wisnus	1.500.000	1.787.208
Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	21,13	53,90
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	81,25	84,77
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	100	73,66
	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	100	97,84
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76,51	89,17

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
jembatan			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	23,80	24,65
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	Masih proses evaluasi
	Nilai LKJiP	BB	B
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76	83,15
	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,214

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	7,77	8,09
	Harapan lama sekolah	12,77	12,77
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,91	75,97
	Kasus Kematian Ibu	19	13
	Angka kematian bayi	4,32	4,24
	Persentase Balita Gizi Buruk	1,38	1,37
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	24,08	24,08*
Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	51,67	45,45
	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	77,73	87,8
	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	44,45	50,48
Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang	Tingkat Pengangguran	4,23	4,10

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022
kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Terbuka		
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	72,18	61,37
	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,42	1,45
Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Data belum release BPS	NA
	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Data belum release BPS	NA
	Nilai realisasi Investasi	3.398	8.687,71
Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Data belum release BPS	NA
Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	Data belum release BPS	NA
Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan		
	Wisman	50 289.409	5.310
	Wisnus		1.787.208
Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	52,55	53,90
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	83,96	84,77
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	72,86	73,66
	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	96,64	97,84
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	88,06	89,17

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022
jembatan			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	23,63	24,65
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	WTP*
	Nilai LKJiP	B	B
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,89	83,15
	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	3,214

*= data capaian Kinerja Tahun 2021

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2022	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJM
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	8,09	104,11
	Harapan lama sekolah	12,77	100
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,97	100,31
	Kasus Kematian Ibu	13	107,14
	Angka kematian bayi	4,24	117,69
	Persentase Balita Gizi Buruk	1,37	131,50
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	24,08	99,5
Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	45,45	81,16
	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	87,8	100,91

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2022	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJM
	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	50,48	74,23
Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10	73,17
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	61,37	69,88
	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,45	100
Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	NA	
	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	NA	
	Nilai realisasi Investasi	8.687,71	
Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	NA	
Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	NA	
Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan		
	Wisman	5.310	11,8
	Wisnus	1.787.208	77,7
Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	53,90	255,09
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	84,77	104,33
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	73,66	73,66

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja 2022	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJM
bagi seluruh masyarakat	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	97,84	97,84
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	89,17	116,54
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	24,65	103,57
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	Masih proses evaluasi	
	Nilai LKJiP	B	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,15	109,4
	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,214	80,35

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Analisis efisiensi didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal, kinerja mencapai 104,28 % dengan efisiensi anggaran sebesar 5,82%.

- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, kinerja mencapai 112,99 % dengan efisiensi anggaran sebesar 6,45%.
- 3) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak, dengan efisiensi anggaran sebesar 2,63 %.
- 4) Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah, kinerja mencapai 320,26 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2,16 %.
- 5) Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani, dengan efisiensi anggaran sebesar 3,55 %.
- 6) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh, kinerja mencapai 104,28 % dengan efisiensi anggaran sebesar 3,23 %.
- 7) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, kinerja mencapai 100,93 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2,06 %.
- 8) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, kinerja mencapai 106,6 % dengan efisiensi anggaran sebesar 8,37 %.

Efisiensi anggaran diperoleh antara lain dari: sisa lelang, perjalanan dinas dan realisasi menyesuaikan harga riil di lapangan. Disamping hal-hal tersebut, efisiensi anggaran juga didorong oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengalokasikan anggaran dengan standar belanja berbasis program.

Adapun realisasi penggunaan anggaran per program adalah sebagai berikut:

Row Labels	Sum of nilaiAnggaran	Sum of nilaiRealisasi
1.01. - PENDIDIKAN	877,953,362,864	807,359,340,130
001 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	599,980,912,864	540,065,868,072
002 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	277,972,450,000	267,293,472,058
1.02. - KESEHATAN	470,517,088,525	417,113,895,650
003 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	136,077,438,000	125,157,850,963
004 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	331,808,732,525	289,707,910,014
005 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,812,796,000	1,566,363,820
006 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	296,291,000	211,179,293
007 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	521,831,000	470,591,560
1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	240,413,597,637	216,484,613,294
008 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23,820,042,000	21,996,628,123
009 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	33,031,308,000	26,708,716,963
010 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18,558,724,229	17,166,582,297
011 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8,658,223,000	8,503,872,063
012 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	17,319,000,000	17,031,485,130
013 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8,775,000,000	8,442,033,000
014 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	27,380,265,408	26,577,440,431
015 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1,550,000,000	1,543,345,200
016 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	99,321,035,000	86,633,870,976
017 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,000,000,000	1,880,639,111
1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36,509,937,000	34,000,643,081
018 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,751,716,000	5,369,936,394
019 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2,445,020,000	2,342,022,553
020 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	27,053,041,000	25,072,416,644
022 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1,189,070,000	1,155,806,590
162 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DA	71,090,000	60,460,900
1.05. - KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11,946,622,000	11,020,994,922
023 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10,116,877,000	9,274,395,925
024 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,021,000,000	966,058,997
025 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	550,745,000	525,907,779
026 - PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	258,000,000	254,632,221
1.06. - SOSIAL	21,035,855,421	19,370,474,386
027 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,843,725,000	7,107,109,371
028 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,245,088,000	1,212,865,139
029 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	30,000,000	28,507,724
030 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3,265,753,000	3,137,050,475
031 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8,256,289,421	7,508,432,433
032 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	320,000,000	310,834,971
033 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	75,000,000	65,674,273
2.07. - TENAGA KERJA	2,644,533,450	2,097,193,618
034 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	75,000,000	63,307,063
035 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,199,255,200	1,704,850,240
036 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	194,478,750	186,337,965
037 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	175,799,500	142,698,350
2.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,548,806,268	5,117,258,985
038 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	285,473,000	268,574,976
039 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	135,694,268	50,442,704
040 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	28,765,000	27,920,332
041 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	244,904,000	230,912,937
042 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	19,245,000	19,245,000
206 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,834,725,000	4,520,163,036
2.09. - PANGAN	20,462,377,000	18,857,648,288
043 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17,389,647,000	15,852,370,825
044 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKA	1,104,730,000	1,065,876,080
045 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	900,000,000	876,458,229
046 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80,000,000	78,777,890
165 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEN	988,000,000	984,165,264
2.11. - LINGKUNGAN HIDUP	26,260,836,000	25,400,678,050
047 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14,606,828,000	14,304,430,243
048 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	425,000,000	414,426,408
049 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN H	1,464,400,000	1,259,471,960
050 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,476,329,000	1,413,799,802
051 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH I	50,000,000	48,361,543
052 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	100,000,000	99,664,376
053 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	75,000,000	73,335,855
054 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8,063,279,000	7,787,187,863
2.12. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10,073,848,944	9,786,959,854
055 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8,973,848,944	8,737,116,369
056 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	310,000,000	306,598,798
057 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	185,000,000	173,544,713
058 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	565,000,000	530,334,974
059 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	40,000,000	39,365,000
2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10,198,400,000	9,329,156,641
060 - PROGRAM PENATAAN DESA	953,000,000	948,316,170
061 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7,964,600,000	7,127,794,307
062 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN M	1,280,800,000	1,253,046,164
2.14. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12,139,754,000	8,512,311,012
064 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226,643,500	221,874,145
065 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,858,799,500	5,626,922,563
066 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6,054,311,000	2,663,514,304
2.15. - PERHUBUNGAN	41,918,639,000	40,165,813,030
067 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30,446,765,000	29,133,951,350
068 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6,531,788,000	6,275,894,663

059 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	40,000,000	39,365,000
2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10,198,400,000	9,329,156,641
060 - PROGRAM PENATAAN DESA	953,000,000	948,316,170
061 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7,964,600,000	7,127,794,307
062 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	1,280,800,000	1,253,046,164
2.14. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12,139,754,000	8,512,311,012
064 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226,643,500	221,874,145
065 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,858,799,500	5,626,922,563
066 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6,054,311,000	2,663,514,304
2.15. - PERHUBUNGAN	41,918,639,000	40,165,813,030
067 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30,446,765,000	29,133,951,350
068 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6,531,788,000	6,275,894,663
069 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,440,086,000	2,423,792,072
180 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2,500,000,000	2,332,174,945
2.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11,179,116,100	10,550,068,216
070 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,797,916,100	5,294,106,680
071 - PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,373,700,000	2,344,861,758
072 - PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3,007,500,000	2,911,099,778
2.17. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9,404,327,000	8,724,892,498
073 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,770,161,000	6,210,729,183
074 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	20,000,000	19,729,933
075 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	38,500,000	37,481,541
076 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	298,892,000	293,087,146
077 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	119,000,000	118,503,000
078 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2,157,774,000	2,045,361,695
2.18. - PENANAMAN MODAL	5,874,908,000	5,148,536,482
079 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4,975,535,000	4,273,663,837
080 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	229,000,000	227,989,500
081 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	111,000,000	106,848,775
082 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	80,000,000	75,203,614
083 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	449,373,000	435,130,756
084 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30,000,000	29,700,000
2.19. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3,955,000,000	3,954,063,359
085 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,705,000,000	1,704,433,859
086 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2,225,000,000	2,224,629,500
087 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	25,000,000	25,000,000
2.20. - STATISTIK	203,110,000	197,517,159
088 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	203,110,000	197,517,159
2.21. - PERSANDIAN	12,500,000	12,117,850
089 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	12,500,000	12,117,850
2.22. - KEBUDAYAAN	2,815,200,000	2,800,381,451
090 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,800,000,000	1,794,169,168
091 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	40,000,000	39,848,940
092 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	203,630,000	199,363,898
093 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	771,570,000	766,999,445
2.23. - PERPUSTAKAAN	5,980,020,000	5,550,657,664
094 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,500,020,000	5,089,989,550
095 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	480,000,000	460,668,114
2.24. - KEARSIPAN	310,000,000	305,241,851
096 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	310,000,000	305,241,851
3.25. - KELAUTAN DAN PERIKANAN	17,115,570,000	16,104,566,234
098 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,583,190,000	5,253,604,504
100 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5,330,380,000	4,947,281,500
101 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,538,000,000	5,244,935,942
103 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	664,000,000	658,744,288
3.26. - PARIWISATA	23,103,362,000	21,000,967,755
104 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8,699,222,000	7,886,957,343
105 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	12,353,980,000	11,185,172,864
106 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,316,180,000	1,284,295,327
107 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	733,980,000	644,542,221
3.27. - PERTANIAN	12,711,096,000	11,921,669,265
108 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4,275,270,000	4,087,358,772
109 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,149,100,000	5,076,382,958
110 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	735,550,000	314,106,655
111 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	150,000,000	144,319,455
112 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,401,176,000	2,299,501,425
3.30. - PERDAGANGAN	4,072,520,000	3,939,454,515
113 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,952,520,000	2,928,914,045
114 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	220,000,000	210,336,999
115 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	300,000,000	259,167,474
116 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	150,000,000	147,917,293
117 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	450,000,000	393,118,704
3.31. - PERINDUSTRIAN	20,025,611,000	19,050,329,424
118 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18,804,247,000	18,068,210,598
119 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,071,364,000	855,771,723
120 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150,000,000	126,347,103
3.32. - TRANSMIGRASI	38,393,750	27,257,975
121 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	38,393,750	27,257,975
4.01. - SEKRETARIAT DAERAH	65,713,250,890	62,659,324,025
122 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33,686,426,290	31,712,826,377
123 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29,300,418,000	28,440,371,246
124 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,726,406,600	2,506,126,402
4.02. - SEKRETARIAT DPRD	67,549,975,000	63,922,789,516

117 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	450,000,000	393,118,704
▣ 3.31. - PERINDUSTRIAN	20,025,611,000	19,050,329,424
118 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18,804,247,000	18,068,210,598
119 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,071,364,000	855,771,723
120 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150,000,000	126,347,103
▣ 3.32. - TRANSMIGRASI	38,393,750	27,257,975
121 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	38,393,750	27,257,975
▣ 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH	65,713,250,890	62,659,324,025
122 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33,686,426,290	31,712,826,377
123 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29,300,418,000	28,440,371,246
124 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,726,406,600	2,506,126,402
▣ 4.02. - SEKRETARIAT DPRD	67,549,975,000	63,922,789,516
126 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42,671,145,000	42,051,403,446
127 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24,878,830,000	21,871,386,070
▣ 5.01. - PERENCANAAN	9,182,876,000	8,791,167,102
129 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,544,377,000	7,202,777,671
130 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAER	744,269,000	699,573,250
131 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAE	894,230,000	888,816,181
▣ 5.02. - KEUANGAN	481,244,909,292	473,460,258,321
134 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24,594,533,600	19,858,317,870
135 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	449,748,051,492	447,486,880,801
136 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,152,760,000	2,036,788,753
137 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4,749,564,200	4,078,270,897
▣ 5.03. - KEPEGAWAIAN	9,239,328,000	7,497,794,939
138 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,646,786,000	5,183,732,205
139 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,592,542,000	2,314,062,734
▣ 5.04. - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3,784,303,000	3,511,346,153
140 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3,784,303,000	3,511,346,153
▣ 5.05. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,290,000,000	1,249,322,262
141 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,290,000,000	1,249,322,262
▣ 6.01. - INSPEKTORAT	9,287,802,000	8,233,935,181
142 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,275,976,000	6,582,816,115
143 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	876,068,000	800,516,372
144 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,135,758,000	850,602,694
▣ 7.01. - KECAMATAN	64,225,370,000	60,301,946,390
145 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59,796,445,500	56,009,354,192
146 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,330,766,000	1,303,746,362
147 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,222,445,500	2,141,362,333
148 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	175,060,000	169,554,857
149 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	700,653,000	677,928,646
▣ 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,035,393,190	5,779,690,702
150 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3,135,124,000	2,937,105,515
151 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	230,000,000	226,058,289
152 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ME	1,848,669,190	1,815,109,074
153 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	105,000,000	104,903,000
154 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, D,	370,600,000	362,116,639
155 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALIT	346,000,000	334,398,185
Grand Total	2,621,977,599,331	2,429,312,277,230

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat, Baik Formal Maupun Non Formal

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat, Baik Formal Maupun Nonformal dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 103,14 % dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya

Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat, Baik Formal Maupun Nonformal disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat, Baik Formal Maupun Non Formal

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Rata – Rata Lama Sekolah	7,40	7,77	105	7,48	8,09	108,16	108,16
2.	Harapan Lama Sekolah	12,33	12,76	103,48	12,34	12,77	103,48	103,48
	Rata-Rata Capaian		104,24			105,82		

Sumber : Bappeda Kabupaten Jepara 2022.

1.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 7,43 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Seiring dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara tahun 2021 sudah mencapai 7,77 tahun dan meningkat lagi di tahun 2022 mencapai 8,09. Hal ini diperkuat dengan tingginya persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara yang hanya menamatkan pendidikan tertingginya sampai dengan jenjang SD/MI.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Secara makro dari ukuran rata-rata lama sekolah penduduk tersebut

menunjukkan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Jepara juga mengalami perubahan pada tahun 2017 dan 2018 yakni sebesar 0,10 tahun sehingga mencapai 7,43 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Tengah hanya mencapai 7,27 tahun 2017 dan 7,35 tahun pada tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 7,45 dan tahun 2020 sebesar 7,68. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 7,77 dan tahun 2022 sebesar 8,09. Bila dibandingkan dengan target kinerja di akhir periode RPJMD atau pada tahun 2022 yang sebesar 7,48, capaian kinerja pada tahun 2022 ini sudah mencapai 105,82%

Konsistensi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara ini tidak lepas dari beberapa kebijakan yang mendukung tercapainya kinerja tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan mutu serta kualitas pendidikan pada jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs;
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas input, proses dan output pendidikan;
3. Meningkatkan kemasyarakatan dan prestasi kegiatan pemuda, olahraga dan seni;
4. Meningkatkan kemandirian pengelolaan pendidikan non formal (PNF) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

Namun demikian, jumlah sumber daya pendidik dari unsur PNS perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlahnya yang semakin tidak proporsional dengan jumlah siswa/kelas yang ada saat ini. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jepara telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan salah satu sub komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan rata-rata jenjang pendidikan tertinggi di Kabupaten Jepara. Pada indikator ini terlihat bahwa rata-rata lama

sekolah penduduk Kabupaten Jepara periode tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yakni bertambah 0,32 tahun, sementara peningkatan rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 0,18 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Jepara memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang semakin meningkat.

1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 terealisasi 12,77 dari target sebesar 12,77 sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi kinerja ini naik jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 12,76. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jepara diharapkan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 ini sudah mencapai 100 % bila dibandingkan dengan target di akhir periode RPJMD yang sebesar 12,77.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan 4 (empat) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 114,16 % dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Angka harapan hidup	75,70	75,91	75,91	75,73	75,97	100,31	100,31
2.	Kasus Kematian Ibu	14	19	73,68	14	13	107,14	107,14
3.	Angka kematian bayi	5,2	4,32	116,92	5,15	4,24	117,69	117,69
4.	Persentase Balita Gizi Buruk	2,0	1,38	131,00	2,0	1,37	131,50	131,50
	Rata-Rata Capaian		105,35			114,16		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2022

2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan hidup (AHH) di Kabupaten Jepara secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terhitung sejak tahun 2012, angka harapan hidup di Kabupaten Jepara mencapai 75,61 kemudian berturut-turut naik menjadi 75,63 pada tahun 2013, 75,64 pada tahun 2014, 75,65 pada tahun 2015, 75,67 pada tahun 2016, tahun 2017 angkanya mencapai 75,68, tahun 2018 mencapai 75,69, tahun 2019 mencapai 75,73 dan tahun 2020 mencapai 75,84 angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Secara lebih rinci, dapat diketahui bahwa angka harapan hidup Perempuan di Kabupaten Jepara mempunyai angka harapan hidup yang lebih secara konsisten lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2017 AHH perempuan mencapai 105,2% dari AHH laki-laki, yaitu 77,67 tahun berbanding 73,83 tahun. Sementara itu pada tahun 2018 AHH

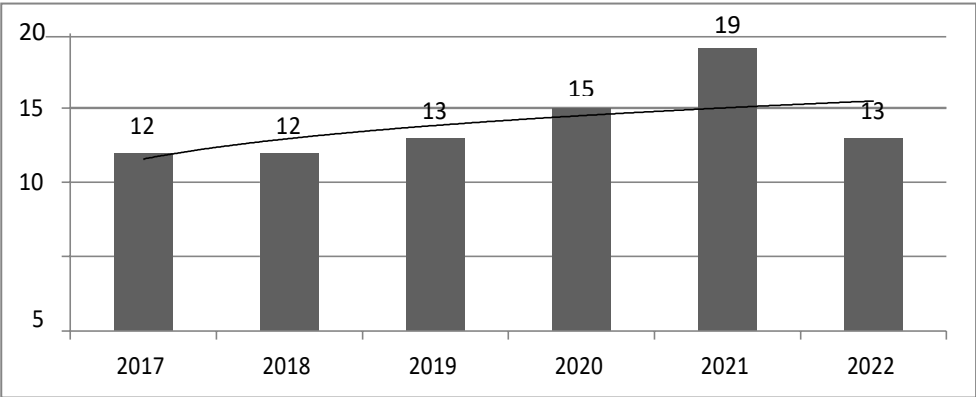
perempuan mencapai 105,19% dari AHH laki-laki, yaitu 77,70 tahun berbanding 73,86 tahun. Pada tahun 2019 AHH Laki-laki mencapai 73,89 tahun dan perempuan 77,71 tahun. Jika ditilik dari dimensi kesehatan, maka AHH ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi kesehatan perempuan masih lebih baik daripada laki-laki. Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

2.2. Kasus Kematian Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator jumlah kasus kematian ibu. Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara menunjukkan trend meningkat, jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2021 ada 19 kasus. Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, new emerging disease COVID-19 membawa dampak yang terhadap ibu hamil dengan adanya kasus kematian ibu akibat COVID-19 sejumlah 6 kasus. Jumlah kasus kematian ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.5

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022

Berdasarkan penyebab, kematian ibu terbagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2021 penyebab kematian langsung dan tidak langsung, pada tahun 2022 penyebab kematian pada ibu adalah hipertensi dan kehamilan / eklampsia (6 kasus), infeksi (1 kasus) dan penyebab penyakit jantung (2 kasus) sedangkan sisanya disebabkan oleh lain-lain yaitu epilepsy (1 kasus) dan gagal ginjal (1 kasus).

Hipertensi dalam kehamilan atau disebut eklampsia masih merupakan penyebab tertinggi kematian ibu dalam masa kehamilan, melahirkan maupun nifas, factor-faktor yang menyebabkan eklampsia adalah ibu dalam masa hamil mempunyai riwayat hipertensi sebelum kehamilan, memiliki riwayat eklampsia pada kehamilan sebelumnya, serta konsisi ibu yang obesitas, belum optimalnya pemantauan dan pengawalan ibu hamil dengan hipertensi menyebabkan terjadinya kematian ibu dengan eklampsia. Pemantauan tekanan darah rutin secara berkala melalui ANC terintegrasi dan pengawalan gizi ibu hamil diharapkan mampu mengurangi angka kematian ibu dengan penyebab eklampsia.

2.3. Angka Kematian Bayi

Perkembangan AKB di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami penurunan yaitu dari 5,21 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 4,24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Penyebab terbesar kasus kematian bayi masih berkisar pada kasus BBLR dan asfiksia. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang

dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Penurunan angka kematian bayi ini didukung dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan yaitu:

- 1 Penyuluhan tentang pentingnya asupan gizi seimbang terutama asupan protein hewani bagi remaja putri dan ibu hamil;
- 2 Suplementasi gizi mikro bagi ibu hamil (hemafort) dan remaja putri (tablet Fe);
- 3 Pemberian PMT bagi bayi bermasalah sebagai stimulan upaya peningkatan kondisi bayi BBLR atau penyakit lain serta peningkatan kondisi kesehatan ibu bayi;
- 4 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam penanganan kasus BBLR dan asfiksia, manajemen terpadu bayi muda melalui pendekatan KN;
- 5 Sosialisasi pada masyarakat dalam penanganan bayi BBLR terutama pada saat di rumah.

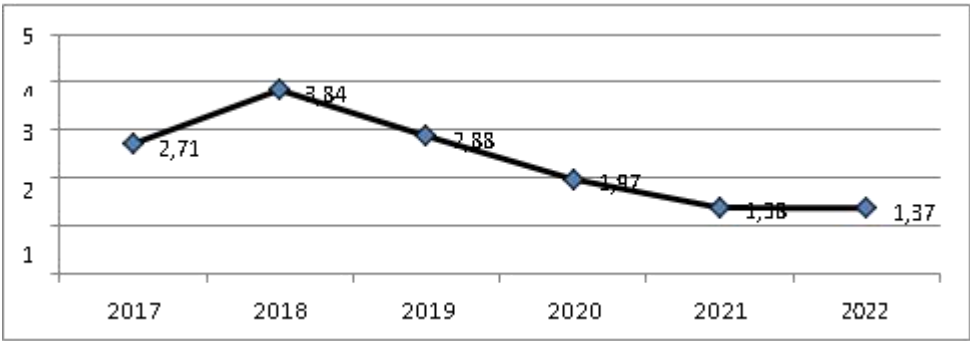
2.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan kondisi dimana balita memiliki berat badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur dan tinggi badannya. Kondisi ini menggambarkan staus gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Gizi buruk tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menyebutkan bahwa penentuan kategori balita gizi buruk (severe wasted) adalah dengan indikator berat badan dibandingkan dengan tinggi badan atau panjang badan balita (BB/TB atau BB/PB). Hasil kegiatan operasi timbang yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022

yang selanjutnya dimasukan dalam pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi e-PPGBM, angka gizi buruk di Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar 1,37%. Permasalahan gizi buruk di Kabupaten Jepara menunjukkan trend menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Gambar 3.4
Persentase Balita Gizi buruk Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022

Gizi buruk dapat dicegah apabila ibu dan keluarga balita, kader posyandu serta tenaga kesehatan paham dan peduli terhadap pemantauan pertumbuhan balita. Ibu dan keluarga balita harus waspada apabila tidak terjadi kenaikan berat badan selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Kader dan tenaga kesehatan harus mampu memberikan edukasi dan konseling pada ibu atau keluarga balita terkait pentingnya pemantauan pertumbuhan serta bagaimana cara mengatasi masalah berat badan anak yang tidak naik. Berat badan anak yang tidak naik hanya disebabkan oleh dua hal, yaitu asupan makan yang kurang atau anak mengalami infeksi. Jika selama dua bulan balita tidak mengalami berat badan (2T), maka bidan desa harus segera merujuk ke puskesmas untuk ditangani oleh Tim Tatalaksana Gizi Buruk dan stunting pada anak

Partisipasi masyarakat untuk membawa balitanya ke posyandu (D/S) pada tahun 2022 mengalami kenaikan disbanding tahun 2021 yaitu dari 77,57% menjadi 85,39%. Selain karena meredanya kasus COVID-19 juga gencarnya isu stunting di masyarakat. Meski terjadi peningkatan D/S masih ada 14,16% balita yang belum terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Kualitas pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di

posyandu juga harus ditingkatkan, masyarakat tidak hanya datang untuk penimbangan tetapi mereka harus paham bagaimana mengatasi jika balitanya tidak mengalami kenaikan berat badan atau pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai standar. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini terjadinya gizi buruk ataupun stunting dapat dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kelas ibu hamil serta kelas ibu balita, kualitas pelayanan posyandu dan BKB (Bina Keluarga Balita) serta kualitas pemantauan dan perkembangan balita di PAUD.

Penyebab gizi buruk ataupun stunting terdiri atas penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi prinsip gizi seimbang dan adanya penyakit infeksi yang terkait dengan tingginya kejadian penyakit menular dan buruknya kesehatan lingkungan, akses pangan keluarga, pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses informasi tentang gizi dan kesehatan. Banyaknya wanita yang menjadi tenaga kerja di pabrik mengakibatkan pekerja tersebut menitipkan anak balita kepada keluarganya atau orang lain dengan pola asuh dan perilaku yang tidak mendukung dalam konsumsi gizi seimbang terutama dalam pemberian makanan pada bayi dan anak.

Untuk mengatasi masalah gizi buruk pada balita ini diperlukan konvergensi lintas sektoral, dengan cara bekerja sesuai tupoksinya dan semua sektor terkait mengarah pada sasaran balita gizi buruk dan balita stunting serta menggunakannya sebagai indikator sasaran dampak pembangunan. Salah satu bentuk konvergensi lintas sektoral adalah melalui kegiatan komunikasi perubahan perilaku masyarakat yang didukung dengan anggaran dari APBD, Dana Desa, APBN, dan sumber dana lainnya. Selain itu adanya komitmen dukungan dari semua perangkat daerah, lintas sektor terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan kelompok masyarakat sehingga terwujud perubahan perilaku

Penurunan persentase gizi buruk ini tidak terlepas dari beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara beserta

instansi yang terkait. Ada beberapa hal yang mendukung pencapaian target penurunan persentase gizi buruk yaitu:

1. Terbitnya Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2022.
2. Adanya alokasi dari Dana Desa untuk penanggulangan gizi buruk.
3. Kegiatan penambahan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak melalui revitalisasi posyandu.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program-program yang mendukung penurunan persentase balita gizi buruk terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam deteksi dini terhadap kasus gizi buruk melalui penimbangan balita di posyandu belum optimal.
2. Pola konsumsi makanan yang kurang seimbang.
3. Pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan yang buruk, akses pangan keluarga yang terbatas, tingkat pendapatan yang masih rendah, tingkat pendidikan, akses informasi tentang gizi dan kesehatan yang kurang.

3. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak

Hasil capaian Kinerja sasaran **Strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja tahun 2022 belum rilis dari BPS . Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.5

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAI AN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	

1.	Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	23,29	24,08	103,39	24,2	24,08	99,5	99,5
	Rata-Rata Capaian		103,39			99,5		

Sumber data : BPS Kab. Jepara Tahun 2022

Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur ketimpangan gender melalui tiga dimensi yakni dimensi ekonomi, dimensi pengambilan keputusan, dan dimensi partisipasi politik. Salah satu komponen IDG yang masih timpang ialah sumbangan pendapatan perempuan. I Indonesia sumbangan pendapatan perempuan selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sumbangan pendapatan perempuan secara nasional sebesar 37,22% pada tahun 2021. Sedangkan untuk Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebesar 24,08% yang masih jauh dibawah angka pencapaian secara nasional terpaut 13,14. Angka ini meningkat dibandingkan dengan pencapaian Kabupaten Jepara tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 yang tercapai sebesar 23,66%. Untuk capaian tahun 2022 BPS belum mengeluarkan data penghitungan persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga secara resmi.

Kesenjangan upah berdasarkan gender adalah hal nyata yang merugikan kaum perempuan dengan menekan pendapatan mereka. Upaya untuk mengatasi kesenjangan upah antara dua gender harus mampu memeriksa dimana perekonomian suatu daerah memberikan peluang yang tidak setara bagi perempuan di setiap level pendidikan dan karir

4. Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal Dalam Even/Gelaran Seni Budaya

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal dalam Even/Gelaran Seni Budaya dengan 1 (satu)

indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 255,09 % pada tahun 2022 dengan predikat **"Baik sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal dalam Even/Gelaran Seni Budaya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal dalam Even/Gelaran Seni Budaya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Targe t	Realis asi	Capa ian (%)	Targ et	Realisa si	Capa ian (%)	
1.	Persentase kelompok seni dan Budaya yang aktif	19,72	52,55	266,48	21,13	53,90	255,09	255,09
	Rata-Rata Capaian		266,48			255,09		

Sumber : Disparbud Kabupaten Jepara Tahun 2022

4.1. Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif

Capaian kinerja pada Meningkatnya partisipasi kelompok seni / budaya lokal dalam even / gelaran seni budaya sebesar 255,09% atau tercapai dengan kategori sangat baik. Dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kelompok seni budaya yang aktif, capaiannya sebesar 255,09% dari target yang ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari perhitungan antara jumlah kelompok seni yang dibina (401) dibagi jumlah kelompok seni di Kab. Jepara (744). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi persentase kelompok seni budaya yang aktif sebesar 52,55% (391 kelompok seni yang dibina dibagi 744 kelompok seni di Kab. Jepara) maka tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 53,90% dari target yang ditetapkan 21,13%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah tercapai dengan kategori sangat baik (255,09%).

Penyebab tercapainya capaian kinerja Tahun 2022 adalah meningkatnya apresiasi seni oleh masyarakat pasca pandemi covid-19 sejalan dengan peningkatan jumlah pelaku seni untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya. Hal itu didukung dengan pembaruan data dan pembinaan kelompok seni.

Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis 1.1 Meningkatnya partisipasi kelompok seni / budaya lokal dalam even / gelaran seni budaya adalah sebesar Rp. 2.800.381.451,-, atau 99,47% dari pagu anggaran Rp. 2.815.200.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,53% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 didukung dari pelaksanaan 4 (empat) Program yaitu:

Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Permuseuman, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan Kebudayaan :

1. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 - c. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Program Pengembangan Kesenian Tradisional :

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya :

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - a. Pelindungan Cagar Budaya

Program Pengelolaan Permuseuman :

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - a. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
 - b. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
 - c. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

5. Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari** dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 85,43 % pada tahun 2022 dengan predikat **“Baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Indeks Kualitas Pencemaran Air	56,00	51,67	92,26	56,00	45,45	81,16	81,16
2.	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	87,00	77,73	89,34	87,00	87,8	100,91	100,91
3.	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	68,00	44,45	65,36	68,00	50,48	74,23	74,23
	Rata-Rata Capaian			82,32			85,43	

1. **Indeks Kualitas Pencemaran Air**

Target tersebut tidak tercapai karena air sungai rata-rata dalam kondisi tercemar sedang, diantaranya disebabkan adanya pencemaran di daerah hulu dan hilir. Untuk daerah hulu disebabkan dari aktifitas domestik, sektor pertanian dengan pemakaian pupuk dan pestisida kimia, penambangan galian C secara liar dan besar-besaran hampir di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk daerah hilir sumber pencemar berasal dari aktivitas industri, Industri Kecil Menengah serta aktivitas domestik permukiman dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang limbah rumah tangga di sungai.

Pengelolaan DAS harus melibatkan banyak pemangku kepentingan diantaranya instansi yang membidangi sektor pertanian, permukiman, pertambangan tidak bisa hanya diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

2. **Indeks Kualitas Pencemaran Udara**

Program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 mampu meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas udara tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industry, pemantauan terhadap pengelolaan limbah industry, cerobong asap, pemilik kendaraan, dan pengendalian melalui perijinan lingkungan.

3. **Indeks Tutupan Lahan/Hutan**

Indeks Tutupan Hutan/Lahan masih pada indeks 50,48 dengan capaian kinerja 74,23%. Capaian indeks ini lebih tinggi dari capaian tahun lalu yang berada pada angka indeks 44,45. Capaian Indeks tutupan lahan tahun 2022 masih masih belum maksimal, bahkan banyak terjadi konversi lahan untuk dijadikan kawasan budidaya (perumahan dan industri) dan kegiatan pertambangan. Hal tersebut didukung dengan adanya reduksi kewenangan pemerintah daerah terkait sektor kehutanan dan penambangan menyulitkan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup lestari di Kabupaten Jepara antara lain:

- a. Meskipun keberadaan sungai di Kabupaten Jepara tergolong tercemar sedang

tetapi pencemaran air sungai di Kabupaten Jepara perlu diwaspadai, dan harus dilakukan pemantauan pada semua perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL ataupun AMDAL dimana pada setiap 6 bulan sekali wajib memberikan laporan beserta hasil analisa pengujian dari laboratorium yang terakreditasi untuk kualitas air dan udara.

- b. Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jepara yang berfungsi sebagai fasilitas utama penyeimbang pembangunan daerah dalam menanggulangi terjadinya banjir (daerah resapan air), menyerap polutan udara, dan menyuplai oksigen.

6. Meningkatnya Kualitas SDM Dan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, Dan Berdaya Saing

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas SDM dan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 73,17% pada tahun 2022 dengan predikat **"Cukup"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas SDM dan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusiadan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Cpaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3	4,23	70,92	3	4,10	73,17	73,17
	Rata-Rata Capaian			70,92			73,17	

Sumber : Jepara Dalam Angka, 2022

6.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan padahal sudah berusaha dengan maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2014-2021 berfluktuatif dan terus menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 TPT Kabupaten Jepara sebesar 4,23% terus menurun menjadi 4,10% pada tahun 2022. Angka ini di bawah angka pengangguran nasional yang mencapai 5,86% dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,57%. Apabila dibandingkan dengan 3 (tiga) Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Kudus (3,21%), Kabupaten Pati (4,45%) dan Kabupaten Demak (6,11%). Walaupun mengalami penurunan tetapi belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,00%.

Adapun kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Angkatan kerja masih banyak yang belum terserap lapangan kerja yaitu dari 700.156 orang Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 671.473 orang;
2. Penurunan penyerapan tenaga kerja di sector manufaktur yaitu berkurang sebanyak 17.342 orang. Hal ini berimbas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada perusahaan industry di Jepara terutama industry tekstil dan sepatu sebagai akibat perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negara tujuan ekspor seperti di Amerika Serikat, Eropa dan China.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperluas jejaring kerja sama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industry, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) secara online sehingga info peluang kerja di setor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses oleh pencari kerja;
2. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja;

- Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja di sector formal melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara) serta perluasan kerja di sektor informal, termasuk penciptaan wirausaha baru.

7. Meningkatnya Kualitas, Kuantitas Dan Daya Saing Koperasi Serta UMKM

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Daya Saing Koperasi serta UMKM** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 84,94 % dengan predikat **“Baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Daya Saing Koperasi serta UMKM** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Daya Saing Koperasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Koperasi sehat	87,86	75,19	85,58	87,81	61,37	69,88	69,88
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,40	1,42	101,4	1,45	1,45	100	100
Rata-Rata Capaian		93,49			84,94			

Sumber : Diskopukmnakertrans, 2022

7.1 Persentase Koperasi Sehat

Realisasi kinerja Persentase Koperasi Sehat selama lima tahun terakhir berfluktuatif dan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 hingga mencapai 92,94 %. Turun pada tahun 2019 menjadi 82,41% dan menurun lagi di tahun 2020 menjadi 78.94. Pada tahun 2021 ini menjadi 72,18% dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 61,37%. Angka ini belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan

sebesar 87,81%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Menurunnya koperasi yang melaksanakan RAT dari 300 koperasi menjadi 177 koperasi;
2. Adanya penyesuaian dari data manual ke ODS;
3. Belum seluruh koperasi kondisinya sehat;
4. Kurang pahamnya pengurus dan pengawas koperasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta menyusun laporan keuangan koperasi;
5. Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami deficit;
6. Koperasi sampai sekarang masih banyak yang belum memanfaatkan program inovasi dan transformasi digital koperasi.

7.2 Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil

Realisasi kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil pada tahun 2022 mencapai 1,45. Dibandingkan dengan target yang sebesar 1,45, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Pencapaian ini diukung oleh beberapa hal yaitu:

1. Banyak pelaku UMKM yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan sehingga dapat menambah pengetahuan / SDM karena adanya tambahan anggaran refocusing Covid 19.
2. Pelaku UMKM sudah banyak yang mengakses izin usaha melalui OSS.
3. Adanya fasilitas sertifikat halal bagi pelaku UMKM sebagai upaya mendukung usaha mikro naik kelas karena bisa lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk usaha mikro sehingga omzet mengalami peningkatan;
4. Adanya pameran produk unggulan tingkat nasional untuk memperkenalkan produk-produk UMKM, mengetahui kompetitor-kompetitor dari daerah lain dan juga mendapatkan calon-calon konsumen;
5. Adanya pertemuan antara pengusaha retail dan pelaku UMKM sehingga UMKM dapat merasakan produknya di toko retail modern dan memperluas pemasaran.
- 6. Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan Dan Investasi Daerah**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah** dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar sebesar 795,57% pada tahun 2022 dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi	10.92	10.471.6	95,83	11.600.133	Data belum release		
	Sektor	7.193	91,30*					
	Industri							
	dalam PDRB							
	(ADHB)							
2.	Kontribusi	5.250.763			5.502.254	Data belum release		
	Sektor							
	Perdagangan							
	dalam PDRB							
	(ADHB)							
3.	Nilai Realisasi Investasi	1.061	3.398	320,26	1.092	8.687,71	795,57	795,57
	Rata-Rata Capaian			320,26			795,57	

Sumber: Disperindag Kab. Jepara dan BPS Kabupaten Jepara Tahun 2022

- a. Kontribusi Sektor Industri Dalam PDRB (ADHB)
- Sektor industri masih memberikan kontribusi paling besar terhadap struktur produk domestik regional bruto (ADHB) di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 95,83%. Pencapaian ini didominasi kenaikan realisasi di 3 (tiga) sub sektor dalam sektor industri antara lain Industri Makanan dan Minuman, Industri Furniture dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus

dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. Sementara itu, industri yang mengalami penurunan adalah Pengolahan Tembakau dan Industri Karet dan Barang dari Karet dan Plastik. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2020 turun sebesar 0,01%, namun tetap melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2022 jumlah industry di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan sebesar 42% dari jumlah industry 8.449 IKM di tahun 2021 naik menjadi 14.583 di tahun 2022. Pertumbuhan industry di KabupatenJepara dipengaruhi oleh bertambahnya investasi perusahaan yang ada di Jawa Barat berpindah ke Jawa Tengah diakibatkan oleh masih rendahnya UMR yang ada di Jawa Tengah serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk industry padat karya. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan industry nasional yang pada tahun 2022 mencapai 4,83% lebih tinggi dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 3,95%. Sektor perindustrian di Kabupaten Jepara mencapai 52% dari PDB Kabupaten Jepara

b. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB (ADHB)

Peningkatan sektor industri berpengaruh besar terhadap peningkatan sektor perdagangan. Pada tahun 2022 triwulan III ekspor Kabupaten Jepara naik sebesar 62% dari nilai 347 juta USD menjadi 408 juta USD

Peningkatan jaringan perdagangan dengan pelaksanaan pameran internasional maupun nasional. Perluasan jaringan perdagangan juga dilaksanakan melalui aplikasi lapak.jepara.go.id. Pengawasan produk perdagangan melalui pengawasan harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang dalam keadaan terbungkus dalam upaya perlindungan hak konsumen.

c. Nilai Realisasi Investasi

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan usaha yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah satu elemen pokok pembangunan daerah Kabupaten Jepara, baik Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara, peningkatan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Adapun faktor pendukung tercapainya target realisasi Investasi di Kabupaten Jepara antara lain :

a. Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, BKPM sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga realisasi investasi.

b. Kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri, salah satunya dikarenakan adanya efek penetapan aturan tax amnesty. Tax Amnesty akan menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri dan dengan pertambahan dana yang ada maka tingkat investasi akan naik.

c. Kemudahan perizinan dan dengan dibukanya MPP (Mall Pelayanan Publik):
Selain itu ada juga faktor kendala tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan, yaitu antara lain :

a Kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

b Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.

c Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya investasi. Hal ini dikarenakan faktor masyarakat Indonesia yang cenderung ingin mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat tapi risiko yang diterima

relatif kecil. Dukungan terhadap faktor ini berasal dari gaya hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, lebih nyaman dengan keadaan saat ini meskipun tahu bahwaproduk yang dikonsumsi merupakan barang impor.

Langkah tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Jepara menghadapi beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Segera membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha di Jepara. Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, padatahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Jepara dengan Keputusan Bupati Jepara No. 500/38 Tahun 2018 sebagai implementasi PP Nomor 91/2017 yang berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya.
- b. Mengadakan sosialisasi tentang investasi.

7. Meningkatnya Produksi Pertanian Yang Berkelanjutan Dengan Melibatkan Partisipasi Petani

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berkelanjutan dengan Melibatkan Partisipasi Petani dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Data capaian kinerja tahun 2022 belum release dari BPS sehingga belum dapat mengkategorikan predikat capaian kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berkelanjutan dengan Melibatkan Partisipasi Petani disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.12

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Produksi Pertanian Yang Berkelanjutan Dengan Melibatkan Partisipasi Petani**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	

1.	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	3.733.491	NA	NA	4.271.069	NA		
	Rata-Rata Capaian	-						

Sumber: BPS Kab. Jepara *angka sementara

9.1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)

Sektor pertanian merupakan sub kategori dari kategori sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sub kategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

Penghitungan angka kontribusi sector Pertanian dalam PDRB tahun 2022 sudah tidak di release lagi oleh BPS. Tetapi meski demikian, data dari perangkat daerah yang menangani tentang pertanian didapat data bahwa mayoritas indicator dalam penghitungan capaian dalam sektor pertanian telah memenuhi target, bahkan melampaui target tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator produksi tanaman pangan utama tahun 2022 naik sebesar 630158,60 ton atau 11% dari tahun 2021, yaitu sebesar 562.869,15 ton

Hambatan yang sering dihadapi dibidang pertanian yaitu :

- Adanya serangan OPT dalam skala besar misalnya serangan wereng dan tikus pada tanaman padi;
- Terjadinya cuaca ekstrim atau musim yang tidak bisa diprediksi;
- Ketersediaan sumber air yang kurang terutama di musim kemarau. Langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah:
- Pembuatan bendung/embung agar ketersediaan air mencukupi dan berkesinambungan terutama di musim kemarau, melalui kegiatan Pengelolaan Sumber Air mendukung Tanaman Pangan (DAK) dan sebagainya;
- Adanya tambahan anggaran baik dari APBD II, APBD I maupun dari Pemerintah Pusat dalam mendukung program/kegiatan dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, seperti Upsus Pajale (Upaya Khusus

Peningkatan produksi Padi Jagung Kedele), Mekanisasi Pertanian yang merupakan kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Upaya mewujudkan sasaran meningkatnya produksi pertanian dilaksanakan pula dengan cara meningkatkan kemampuan penerapan teknologi kelompok tani, sehingga petani dapat mengadopsi teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Penerapan teknologi ini didukung oleh kegiatan-kegiatan Sekolah lapang pengolahan hasil komoditas perkebunan (kopi), Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman, Sekolah lapang Iklim, Pembinaan kelompok UPJA, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT) tanaman perkebunan dan pengembangan APH, Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pemantauan dan pengamatan OPT perkebunan, Pelatihan pengolahan hasil peternakan, Pendampingan percepatan peningkatan populasi sapi dengan sinkronisasi birahi dan embrio transfer, dan kegiatan Sekolah lapang budidaya peternakan.

8. Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap Maupun Budidaya Yang Berkelanjutan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap Maupun Budidaya yang Berkelanjutan dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja tahun 2022 belum release dari BPS. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap Maupun Budidaya yang Berkelanjutan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap
Maupun Budidaya yang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	

1.	Kontribusi Sektor Perikanan dalam PDRB	286.589	NA		341.313	NA		
	Rata-Rata Capaian							

Sumber : BPS Kab. Jepara *angka sementara

10.1. Kontribusi Sektor Perikanan dalam PDRB

Sektor perikanan merupakan subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB. Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segalajenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, airpayau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenisikan, crustacea, mollusca, rumputlaut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (dilaut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Persentase capaian target kontribusi sektor perikanan dalam PDRB ADHB pada tahun 2020 adalah sebesar 98,23 %. Meskipun capaian kinerja menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 98,85 namun secara kuantitas mengalami kenaikan sebesar 16,38 Milyar dari tahun 2018. Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB dalam kurun waktu tahun 2014-2020 terus mengalami peningkatan sebanding dengan peningkatan PDRB Kab. Jepara. Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB ADHB di Kabupaten Jepara masih sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu hanya 0,94%.

9. Meningkatnya Kualitas Destinasi dan Investasi Pariwisata

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Destinasi dan Investasi Pariwisata** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 119,1 % pada tahun 2022 dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Destinasi dan Investasi Pariwisata** disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Destinasi Dan Investasi Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kunjungan Wisatawan							64,7
	Wisman	41.000	50	0,12	5.000	5.310	106,2	0,11
	Wisnus	2.200.000	289.409	13,15	1.500.000	1.787.208	119,15	12,58
	Rata-Rata Capaian			6,635			119,1	

Sumber : Disparbud Kab. Jepara,2022

11.1. Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Lokal)

Jumlah kunjungan wisatawan ke Jepara pada tahun 2021 tercatat 50 wisatawan mancanegara dan 289.409 wisatawan nusantara (wisnus), total antara wisman dan wisnus sebesar 289.459 orang atau (12,91%) dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan 3.004 orang (wisman) dan 349.325 orang (wisnus), total antara wisman dan wisnus berjumlah 352.329 orang.

Pariwisata menjadi salah satu unggulan daerah Kabupaten Jepara, terdapat beragam potensi kepariwisataan, baik wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah/budaya dan wisata buatan lainnya. Dalam pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025, maka Kabupaten Jepara termasuk pengembangan pariwisata Kawasan Semarang–Karimunjawa, dengan obyek utama Kepulauan Karimunjawa/Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya

Gambar 3.1
Taman Nasional Karimunjawa dengan Potensi Wisata Baharinya



Obyek wisata lainnya di Kabupaten Jepara adalah : wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi : (a) Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo; (b) Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan; (c) Museum Kartini di Kecamatan Jepara; (d) Benteng VOC di Kecamatan Jepara; (e) Pendopo Kabupaten di Kecamatan Jepara; (f) Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan (g) Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong. Warisan budaya Kabupaten Jepara yang telah dikenal adalah kerajinan meubel, seni ukir dan tenun menjadi warisan budaya tak benda yang dikenal secara nasional terdapat di Kecamatan Tahunan, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kalinyamanatan dan Kecamatan Jepara dan sekitarnya. Terdapat pula hutan wisata dan wisata alam di Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo, serta kawasan cagar alam Kembang (di Kecamatan Kembang), cagar alam Gunung Clering (Kecamatan Donorojo) dan cagar alam Keling (Kecamatan Keling).

Obyek wisata unggulan di Jepara meliputi obyek wisata pantai Kartini, pantai Bandengan, pantai Pungruk, Benteng Portugis dan Museum Kartini. Sementara 24 desa wisata yang dikembangkan di Jepara sesuai Keputusan Bupati Nomor 556/329 Tahun 2020 berada di desa Tempur, desa Plajan, desa Bandengan, desa Mulyoharjo, desa Teluk awur, desa Petekeyan, desa Troso, desa Kemojan dan desa Karimunjawa. Adapun destinasi wisata paling diminati di Kabupaten Jepara masih pada Taman Nasional Karimunjawa yang menyumbang sebesar 5,30% jumlah wisatawan dari total wisatawan yang berkunjung di Jepara dan 0,34% dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata daerah sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan industri pariwisata dan perdagangan adalah :

1. Menyelenggarakan festival seni dan budaya baik di daerah maupun melalui event-event nasional untuk promosi wisata.
2. Menyelenggarakan pameran seni dan pembangunan guna mempromosikan produk-produk unggulan asli daerah.

Capaian kinerja pada sasaran strategis 2.1 : Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata sebesar 106,2% untuk kunjungan wisatawan mancanegara tercapai dengan kategori **sangat baik** dan 119,15% untuk kunjungan wisatawan nusantara tercapai dengan kategori **sangat baik**. Dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu kunjungan wisatawan berjumlah 5.310 orang (wisman) dan 1.787.208 orang (wisnus), total antara wisman dan wisnus sebesar 1.792.518 orang atau (119,1%) dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan 50 orang (wisman) dan 289.409 orang (wisnus), total antara wisman dan wisnus berjumlah 289.459 orang mengalami kenaikan sebesar 519,26 %.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum tercapai, dengan kategori **baik** (76,44%).

Penyebab tercapainya capaian kinerja Tahun 2022 adalah karena ada perubahan target dalam RKPD Perubahan 2022 dan Renja Perubahan 2022. Perubahan target kinerja dilakukan karena melihat realisasi kinerja di tahun 2020 dan 2021 untuk kunjungan wisatawan yang menurun drastis akibat dampak pandemi covid-19. Namun berbagai upaya tetap dilakukan untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Jepara, diantaranya dilakukan terobosan dengan berbagai inovasi dan kreativitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, optimalisasi pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata, meningkatkan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media yang efektif. Terbukti pada tahun 2022 kunjungan wisatawan meningkat atau lebih tinggi dari tahun 2020 dan 2021.

Mekanisme pengumpulan data kinerja sesuai dengan SOP penyusunan

perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Nomor : 050/0737.1.

Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis 2.1. Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata adalah sebesar Rp. 13.114.010.412,- atau 91,04% dari total pagu anggaran Rp. 14.404.140.000,- . Hal ini berarti terdapat efesiensi anggaran sebesar 8,96% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran 2.1 didukung dari pelaksanaan 3 (tiga) Program yaitu :

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - i. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
 - ii. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam
 - a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam
Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - iii. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota.
- Program Pemasaran Pariwisata :
 - iv. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota:
 - a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Pariwisata Kabupaten/Kota

- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
 - 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
 - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - c. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

10. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Dan Pengurangan Kawasan Kumuh

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat dan Pengurangan Kawasan Kumuh dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 104,33 % pada tahun 2022 dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat dan Pengurangan Kawasan Kumuh disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Dan Pengurangan Kawasan Kumuh

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	

1.	Persentase Rumah Layak Huni	80,51	83,96	104,28	81,25	84,77	104,33	104,33
	Rata-Rata Capaian		104,23			104,33		

Sumber : DISPERKIM Kab.Jepara, 2022

12.1. Persentase Rumah Layak Huni

Realisasi kinerja persentase rumah layak huni di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mencapai 104,33 % melampaui sebesar 0,05% dari target 2021 sebesar 104,28%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 104,33% telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang sebesar 104,33 %. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 104,28%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD yang sebesar 81,25, maka realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 ini sudah mencapai 104,33%.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani sebanyak 2.157 unit. Memiliki arti bahwa jumlah Rumah Layak Huni pada tahun 2022 mengalami enambahan sebesar 2.157 unit, sehingga total unit Rumah Layak Huni sampai dengan tahun 2022 menjadi 259.072 unit, dari jumlah keseluruhan unit rumah diKabupaten Jepara sebesar 305.625 unit. Capaian kinerja persentase Rumah Laya Huni pada tahun 2022 sebesar 84,77%, telah terjadi kenaikan sebesar 0,72% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 84,05%

11. Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 85,75 % pada tahun 2022 dengan predikat **"Baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air
Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	100	72,86	72,86	100	73,66	73,66	73,66
2	Persentase Masyarakat yang dapat Mengakses Air Bersih	100	96,64	96,64	100	97,84	97,84	97,84
Rata-Rata Capaian				90,36			85,75	

Sumber : DISPERKIM Kab.Jepara, 2022

13.1. Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Sanitasi Layak

Capaian realisasi kinerja Persentase Rumah Tinggal yang memiliki sanitasi layak pada tahun 2022 mencapai 73,63%. Capaian kinerja tahun 2022 belum sesuai target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 100,00%. Realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 72,86% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Capaian di tahun 2022 naik sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2021. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2022 ini hanya tercapai 73,63%

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target Rumah Tinggal yang memiliki sanitasi layak adalah:

1. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan sarana prasarana sanitasi yang terbangun;
2. Kesulitan Penyediaan lahan/lokasi yang dihibahkan untuk pembangunan sarana prasarana sanitasi;
3. Sistem Pengelolaan yang tidak bagus sehingga ada beberapa sarana prasarana sanitasi yang tidak berfungsi;
4. Lokasi/lahan yang ditunjuk tidak representatif sehingga asas manfaat tidak maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam meningkatkan persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak, antara lain:

1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Jepara sumber dana dari DAK Penugasan, dengan realisasi terbangun MCK ++ sebanyak 5 paket dan tanki septic skala individual sebanyak 3 paket;
2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Jepara sumber dana dari DAK Reguler, yang dilaksanakan pada 12 paket, dengan penerima manfaat sebanyak 600 unit rumah tinggal;
3. Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat tersebar di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara, terbangun sebanyak 5 lokasi dari tagert sebanyak 3 lokasi, terealisasi sebanyak 4 unit MCK komunal, 1 unit IPAL dan 1 unit sumur bor.

13.2. Persentase Masyarakat yang Dapat Mengakses Air Bersih

Capaian realisasi kinerja Persentase Masyarakat yang dapat Mengakses Air Bersih pada tahun 2022 mencapai 97,84% dari target yang ditetapkan sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya menjadi 97,84%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi mencapai 96,64 % dari target 100 %. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2022 ini masih kurang 2,16 %. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target ini adalah :

1. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan sarana prasarana air minum yang terbangun.
2. Letak Topografi daerah yang kesulitan untuk membangun sarana dan prasarana air minum.
3. Beberapa daerah yang kesulitan menemukan sumber air baku.

Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam meningkatkan persentase rumah tinggal yang dapat mengakses air bersih, antara lain :

1. Perencanaan dan pengawasan kegiatan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
2. Sosialisasi penyediaan air minum lingkungan permukiman di Kabupaten Jepara.
3. Pengadaan sarana airbersih.
4. Pendampingan kegiatan hibah air minum pedesaan.
5. Peningkatan infrastruktur air minum dan airbersih.
6. Penunjang Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat).

14. **Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 116,54 % pada tahun 2022 dengan predikat **"Sangat Baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan dan Jembatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	70,78	88,06	124,41	76,51	89,17	116,54	116,54
Rata-Rata Capaian		124,41			116,54			

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2022

14.1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mencapai 89,17 %, bila dibandingkan dengan target yang 76,51 %, maka capaian kinerjanya sebesar 116,54%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar 76,51, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 ini telah mencapai 116,54 %.

Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2012 panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 4,59 % dan tahun 2016

mengalami peningkatan mencapai 42,11% dari total panjang jalan kabupaten jalan kabupaten 872,142 km. Hal ini berarti masih ada 57,89 % jaringan jalan kabupaten dalam kondisi rusak (kondisi sedang, rusak, dan rusak berat) dari total keseluruhan panjang jalan. Berikut gambaran pertumbuhan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Jepara sejak 2012 hingga 2021.

15. **Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Irigasi**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 103,57% pada tahun 2022 dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	23,41	23,63	100,93	23,80	24,65	103,57	103,57
Rata-Rata Capaian		100,93			103,57			

Sumber : DPUPR Kabupaten Jepara, 2022

15.1. **Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal. Ditandai dengan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru mencapai 9,82 m/ha. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 21,9 % pada tahun 2018. Capaian realisasi kinerja Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 mencapai 23,63 %. Capaian ini telah melampaui target yang

sebesar 23,41 %, sehingga capaian kinerjanya menjadi 100,93 %. Sedangkan capaian realisasi kinerja tahun 2022 naik sebesar 24,65%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 23,80 maka tercapai sebesar 103,57%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 23,8 %, realisasi capaian tahun 2022 ini telah mencapai 103,57 %. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagi upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu kegiatan.

16. **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, tetapi baru 1 indikator yang bisa dinilai dengan mendapatkan angka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 106,6 % dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	Proses Audit	-	100
2.	Nilai LKjIP	B	B	100	BB	B	-	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75,80	80,81	106,6	76	83,15	109,4	109,4

Secara umum nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami tren peningkatan yang positif. Dari tahun 2012 nilai AKIP Kabupaten Jepara yang hanya 39,84 atau kategori C dan turun 0,27 poin menjadi 39,57 pada tahun 2013, secara bertahap naik hingga pada LKjIP tahun 2016 nilainya menjadi 55,61 atau kategori CC, dan pada tahun 2017 nilai LKjIP Kabupaten Jepara telah mencapai 60,31 atau kategori B. Terakhir, hasil penilaian SAKIP Kabupaten Jepara Tahun 2022 memperoleh nilai 64,53 dengan kategori B

Pelaksanaan Reformasi birokrasi mengacu pada Perpres RI No 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang kemudian dituangkan dalam Permenpanrb Nomor 20 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, memberikan pelayanan prima pada publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang nilai-nilai dasar dan kode etik ASN. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yaitu organisasi, tata laksana, Peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (mindset), serta budaya kerja aparatur.

Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk di dalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proses bisnis yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai dengan : (1) Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; (2) Penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; (3) Belanja aparatur yang semakin profesional; (4) Belanja Publik yang semakin dominan; serta (5) Perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan dan partisipatif

Dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kabupaten Jepara secara serius melakukan perbaikan – perbaikan yang diperlukan. Dengan belajar dari periode RPJMD sebelumnya, pada periode RPJMD 2017-2022 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara meneliti dengan seksama dokumen – dokumen perencanaan lainnya sehingga bisa selaras dengan RPJMD serta penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang "*SMART*". Selain itu, saat ini juga telah dibangun suatu sistem aplikasi *E-SAKIP* Kabupaten Jepara guna pencapaian akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

16.3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 83,15, sehingga capaiannya sebesar 106,6 %. Pada Tahun 2018 Kabupaten Jepara telah menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat pada semua organisasi perangkat daerah (42) dan 11 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyusun nilai kepuasan masyarakat sebagai salah satu parameter penyelenggaraan pemerintahan khusus pada aspek kualitas pelayanan public.

Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima dengan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara.
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pola Perijinan Terpadu Penanaman Modal.
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
7. Keputusan Bupati Jepara Nomor 502/4 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Perijinan Kabupaten Jepara.

8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/92 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pegaduan Permasalahan Perijinan Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 2015.
9. Mulai tahun 2012 telah diterapkan Sistem Standar Mutu *ISO 9001: 2008* hingga akhir tahun 2015 di Jepara.
10. Penyelenggaraan lomba pelayanan publik yang dilaksanakan tiap tahun.

16.4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Mulai tahun 2016 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disibukkan lagi dengan pekerjaan baru yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing. Hal ini dipicu oleh target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2014-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa "tingkat kematangan implementasi SPIP" ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina SPIP telah menetapkan pedoman melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk Kabupaten Jepara sendiri nilai yang diperoleh mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada level 2, kemudian pada kurun waktu tahun 2018/2019 berdasarkan Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor LQA-88/PW11/3.1/2018 Tanggal 18 Maret 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Reviu atas Hasil *Self Assessment* Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Jepara, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Jepara bisa mencapai level 3 dengan nilai 3,1489, namun karena ada penurunan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dari level 5 ke level 2, dengan pertimbangan bahwa implementasi terkait kepemimpinan yang kondusif belum memadai yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan hukum kepala daerah yang ditangani KPK terkait penetapan Bupati Jepara sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang maka level maturiti SPIP Kabupaten Jepara kembali turun ke level 2, yaitu dengan nilai 2,9625.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan SPIP Terintegrasi yang dievaluasi oleh BPKP dengan nilai 3,214. Hal ini dibuktikan dengan

Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dari BPKP
Nomor PE.09.03/LHP-976/PW/11/3.1/2022 tanggal 29 Desember 2022.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

I. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A. Urusan Pertanian dan Urusan Pangan (DKPP Kabupaten Jepara)

• **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

• **Dasar Pelaksanaan Tugas**

- a. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- b. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021.
- c. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- d. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- e. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- f. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- g. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- h. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- i. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- j. Nomor : SP DIPA.018.08.4.039158 / 2022 Tanggal 17 November 2021
- k. DIPA Nomor : 018.03.4.039151/2022 Tanggal 17 November 2021
- l. DIPA Nomor : 018.03.4.039151/2022 Tanggal 17 November 2021
- m. DIPA Nomor : 018.03.4.039151/2022 Tanggal 17 November 2021
- n. DIPA Nomor : 018.03.4.039151/2022 Tanggal 17 November 2021

• **Program dan Kegiatan**

A. Program :

Pembangunan Embung Pertanian

Kegiatan :

Pembangunan Embung Pertanian

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
- ❖ Anggaran : Rp 240.000.000
- ❖ Realisasi : Rp 240.000.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

B. Program :

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Kegiatan :

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
- ❖ Anggaran : Rp1.275.000.000
- ❖ Realisasi : Rp1.275.000.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

C. Program :

Rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan Pertanian

Kegiatan :

Rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan Pertanian

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : 15 Kecamatan di Jepara
- ❖ Anggaran : Rp 500.000.000
- ❖ Realisasi : Rp 498.283.400
- ❖ Capaian Kegiatan : 95%

D. Program :

Persiapan Optimasi Lahan

Kegiatan :

Persiapan Optimasi Lahan

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
- ❖ Anggaran : Rp 60.140.000
- ❖ Realisasi : Rp 60.140.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

E. Program :

Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan

Kegiatan :

Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
- ❖ Anggaran : Rp 2.283.800.000
- ❖ Realisasi : Rp 2.283.800.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

F. Program :

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan :

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
- ❖ Anggaran : Rp10.000.000
- ❖ Realisasi : Rp10.000.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 100% ; Traktor roda 4 : 2 Unit; Cultivator : 32 Unit; Traktor roda 2 : 32 Unit; Pompa Air : 10 Unit.

G. Program :

Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi

Kegiatan :

Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : 16 Kecamatan di Jepara
- ❖ Anggaran : Rp187.275.000
- ❖ Realisasi : Rp187.275.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%, seluruh kelompok tani di Kab. Jepara.

H. Program :

Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi

Kegiatan :

Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : 16 Kecamatan di Jepara
- ❖ Anggaran : Rp147.410.000
- ❖ Realisasi : Rp136.955.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 93% ;

Alokasi :

Urea = 15.551 ton

ZA = 600 ton

SP-36 = 6 ton

NPK = 15.000 ton

Organik granul = 435 ton

Organik Cair = 50 liter

I. Program :

Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian

Kegiatan :

Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
- ❖ Anggaran : Rp16.048.000
- ❖ Realisasi : Rp16.048.000
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%; 3600 Ha

J. Program :

Layanan Umum

Kegiatan :

Layanan Umum

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : DKPP Kab. Jepara
- ❖ Anggaran : Rp78.500.000
- ❖ Realisasi : Rp74.464.500
- ❖ Capaian Kegiatan : 95%

K. Program :

Bantuan Benih Jagung

Kegiatan :

Bantuan Benih Jagung

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kedung, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Mlonggo, Pakisaji, Bangsri, Keling, Donorojo, Kalinyamatn, Kembang
- ❖ Anggaran : 950 Hektar
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

L. Program :

Bantuan Benih Kacang Tanah

Kegiatan :

Bantuan Benih Kacang Tanah

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Donorojo, Tahunan dan Bangsri
- ❖ 25 Hektar

- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

M. Program :

Bantuan Benih Kacang Hijau

Kegiatan :

Bantuan Benih Kacang Hijau

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Tahunan, kedung, welahan, Mayong
- ❖ 50 Hektar
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

N. Program :

Bantuan Benih Padi (OPIP)

Kegiatan :

Bantuan Benih Padi (OPIP)

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Nalumsari, Mayong dan Donorojo
- ❖ 130 Hektar
- ❖ Capaian Kegiatan : 100%

B. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara)

• **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Kementerian Perdagangan

• **Dasar Pelaksanaan Tugas**

Permendag No. 98 tahun 2020

• **Program dan Kegiatan**

a. Program : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

- Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Output : Terbangunnya sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan

Rincian Kegiatan :

- Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
 - ❖ Lokasi : Pasar Rakyat Mindahan
 - ❖ Anggaran : Rp. 3.000.000.000,-
 - ❖ Realisasi : Rp. 2.447.225.000,-

- ❖ Capaian Kegiatan : Telah terbangunnya atau direvitalisasinya sebuah sarana perdagangan yaitu Pasar Rakyat Mindahan.

C. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim Kabupaten Jepara).

- **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- **Dasar Pelaksanaan Tugas**

1. Perpres No.123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK TA.2021
2. PMK No. 3/PK/2020 Tentang Panduan Rivew Laporan Realisasi DAK 2021.
3. PermenPUPR No.5 Tahun 2021 Tentang Juknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur PUPR Tahun 2021

Program dan Kegiatan

b. Program : Kawasan Permukiman

Kegiatan : peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.

Output : berkurangnya rumah tidak layak huni di kawasan kumuh.

Rincian Kegiatan :

- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh.

- ❖ Lokasi : Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan
- ❖ Anggaran : Rp. 2.518.041.000,-
- ❖ Realisasi : Rp. 2.518.014.000,-
- ❖ Capaian Kegiatan : 100% , 70 Unit

D. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasades Kabupaten Jepara)

➤ Bantuan Keuangan Khusus Desa

- Dasar Pelaksanaan Tugas.

Perbup Nomor 61 Tahun 2018

- Program :
Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kegiatan :
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Sub Kegiatan :
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- Sumber Dana : APBD Kabupaten
- Jumlah Anggaran : Rp. 417.919.236.100,-
- Realisasi : Rp. 417.875.836.100,-
- Permasalahan & Solusi : -

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH
DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022
(DKPP, Disperindag, Disperkim, Dinsospermasdes)**

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	(DKPP) Dinas Pweranian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	1794.RBK.002.051. Pembangunan Embung Pertanian		Rp240.000.000	Rp240.000.000	100		100	
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	1794.RDK.001.051. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier		Rp1.275.000.000	Rp1.275.000.000	100		100	
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	Rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan Pertanian	15 Kecamatan di Jepara.	Rp 500.000.000	Rp 498.283.400	95		95	

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	1795.RBO.002.051. Persiapan Optimasi Lahan		Rp 60.140.000	Rp 60.140.000	100		100	
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	1795.RBO.002.052. Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan		Rp 2.283.800.000	Rp 2.283.800.000	100		100	
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	1796.AEA.001.053. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian		Rp10.000.000	Rp10.000.000	100	Traktor roda 4 : 2 Unit; Cultivator : 32 Unit; Traktor roda 2 : 32 Unit; Pompa Air :	100	

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	3993.QAA.001.051. Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi	16 Kecamatan di Jepara	Rp187.275.000	Rp187.275.000	100	10 Unit Seluruh kelompok tani	100	
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	3993.QAH.001.051. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi	16 Kecamatan di Jepara	Rp147.410.000	Rp136.955.000	93	Alokasi : Urea = 15.551 ton ZA = 600 ton SP-36 = 6 ton NPK = 15.000 ton Organik granul = 435 ton Organik Cair = 50 liter	93	

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	3994.RBK.001.051. Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian		Rp16.048.000	Rp16.048.000	100	3600 Ha		
		Nomor : SP DIPA.018.08.4.0 39158 / 2022 Tanggal 17 November 2021	1797.EBA.962.051. Layanan Umum	DKPP Kab. Jepara	Rp78.500.000	Rp74.464.500	95		95	
		DIPA Nomor : 018.03.4.039151 /2022 Tanggal 17 November 2021	Bantuan Benih Jagung	Kedung, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit,Tah unan, Mlonggo, Pakisaji,Ba ngsri, Keling,	950 Hektar		100		100	

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DIPA Nomor : 018.03.4.039151 /2022 Tanggal 17 November 2021	Bantuan Benih Kacang Tanah	Donorojo, Kalinyamat n, Kembang Donorojo, Tahunan dan Bangsri	25 Hektar		100		100	
		DIPA Nomor : 018.03.4.039151 /2022 Tanggal 17 November 2021	Bantuan Benih Kacang Hijau	Tahunan, kedung, welahan, Mayong	50 Hektar		100		100	
		DIPA Nomor : 018.03.4.039151 /2022 Tanggal 17 November 2021	Bantuan Benih Padi (OPIP)	Nalumsari, Mayong dan Donorojo	130 Hektar		100		100	

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	DISPERINDAG Kementerian Perdagangan	Permendag No. 98 tahun 2020	Program: Perdagangan Dalam Negeri; Kegiatan: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Kapasitas Logistik Perdagangan; Output: Terbangunnya sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan; Rincian Kegiatan : Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Pasar Rakyat Mindahan	Rp.3.000.000.000	Rp.2.447.225.000	81	1 paket	100	
3.	DISPERKIM Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.Perpres No.123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK TA.2021	Program : Kawasan Permukiman Kegiatan : peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)	Desa Lebuawu, Kec. Pecangaan Total 70 Unit	Rp. 2.518.041.000	Rp. 2.518.041.000	100	70 unit	100	

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.PMK No. 3/PK/2020 Tentang Panduan Rivew Laporan Realisasi DAK 2021. 3.PermenPUPR No.5 Tahun 2021 Tentang Juknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur PUPR Tahun 2021	Ha. Output : berkurangnya rumah tidak layak huni di kawasan kumuh. Rincian Keg Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh.							

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (PENUGASAN)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes Kabupaten Jepara)

No	URUSAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian kegiatan	lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan & solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINSOSPERMADES (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Jepara.	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Penunangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	Lokasi : Kabupaten Jepara.	417.919.236.100	417.875.836.100	99,98			

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Adapun tahapan penerapan SPM :

1. Pengumpulan data
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA

Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi target penerima layanan dari setiap indikator, sarana, dan sumber daya manusia Pendidikan yang mendukung pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sarana yang dimiliki dalam penerapan SPM yakni 982 PAUD, 689 SD dan. Sedangkan SDM Pendidikan yang dimiliki guna mendukung penerapan SPM terdiri dari 121 Pegawai Dinas Dikpora , 3.179 Guru PAUD ,4.835 pendidik SD , 1.781 Pendidik di SMP dan 74 di PKBM.

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Tahapan perhitunghan kebutuhan dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada setiap indikator SPM dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar.

C. PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD dan menjadi prioritas. Selain itu juga memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Indikator program pemenuhan SPM didalam

dokumen perencanaan yaitu Indeks Capaian SPM dengan target 100%. Sedangkan untuk indikator pada sub kegiatan yang termasuk didalam indikator SPM, masing-masing indikator memiliki target sebesar 100%.

D. PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan rencana pemenuhan sesuai perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan terhadap layanan dasar dan mutu layanan dasar yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

A. PENGUMPULAN DATA

Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi target penerima layanan dari setiap indikator, sarana, dan sumber daya manusia kesehatan yang mendukung pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sarana yang dimiliki dalam penerapan SPM yakni 22 puskesmas, 6 Rumah Sakit, dan 60 klinik. Sedangkan SDM Kesehatan yang dimiliki guna mendukung penerapan SPM terdiri dari 321 Dokter, 79 Dokter gigi, 1.463 Perawat, 721 Bidan, 70 Ahli Gizi, 90 Tenaga Kesmas, 159 Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), 43 Penata Rontgen, 594 Tenaga Non Kesehatan Terlatih, dan 4.137 Kader Kesehatan.

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Tahapan perhitunghan kebutuhan dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada setiap indikator SPM dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar.

C. PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD dan menjadi prioritas. Selain itu juga memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan,

sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Indikator program pemenuhan SPM didalam dokumen perencanaan yaitu Indeks Capaian SPM dengan target 100%. Sedangkan untuk indikator pada sub kegiatan yang termasuk didalam indikator SPM, masing-masing indikator memiliki target sebesar 100%.

D. PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan rencana pemenuhan sesuai perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan terhadap layanan dasar dan mutu layanan dasar yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. PENGUMPULAN DATA

Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi target penerima layanan dan juga data pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara yang mendukung pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Tahapan perhitunghan kebutuhan dilakukan dengan menghitung barang dan / atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Dalam pelaporan SPM Bidang Pekerjaan Umum ini satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah Kartu Keluarga (KK) untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar.

C. PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD dan menjadi prioritas. Selain itu juga memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara menetapkan Target pencapaian Program dan

Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

D. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara yaitu penyediaan barang dan / atau jasa, sarana dan prasaran, sumber daya yang dibutuhkan dan / atau melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data sesuai tabel berikut :

1. Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Tabel 2.1
Pengumpulan Data dengan Jenis dan Metode Pengumpulan Data

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	a. Lokasi b. Luasan perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (Unit) d. Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa e. Kondisi Fisik Rumah f. Jumlah Rumah Sewa g. Lokasi rumah sewa h. Kondisi Fisik Rumah Sewa	Dilakukan oleh SKPD Teknis, melalui: a. Survey Sekunder: • Data wilayah • administrasi • Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun	Form 4.A.4

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		(tipe, fasilitas) i. Tarif sewa per bulan j. Pemilik rumah sewa			
2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	a. Lokasi terdiri dari kecamatan dan desa b. Luasan (Ha)	Dilakukan oleh SKPD Teknis, melalui: a. Survey Sekunder: • Data wilayah • administrasi • Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun	Form 4.A.5
3	Pengumpulan Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	a. Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) b. Jumlah rumah tangga, kk dan jiwa yang belum tertangani c. Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas	Survey primer dengan berkoordinasi dengan BPBD		Form 4.A.6
4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	a. Jumlah Rumah yang terkena bencana alam b. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya	Pendataan cepat dikordinasikan oleh Tim Satgas BPBD bersama Tim Satgas	Pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat	Form 4.A.6

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		terkena bencana c. Pendataan Kerusakan rumah d. Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM.	OPD Teknis bidang Perumahan dan masyarakat setempat.		
5	Verifikasi penerima layanan SPM	a. BNBA Penerima Layanan b. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan c. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	a. Verifikasi oleh Tim Satgas BPBD, Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan bersama masyarakat b. Rembug warga penentuan penerima layanan SPM	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendataan	
6	Penyusunan Rencana Aksi	a. BNBA penerima layanan yang telah disetujui b. Rencana Jumlah rumah yang direhabilitasi c. Rencana Jumlah rumah yang dibangun kembali	Dilakukan oleh tim satgas BPBD dan OPD Teknis bidang Perumahan Bersama dengan warga	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah penentuan calon penerima pelayanan	

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		d. Rencana Lahan (ha) untuk relokasi dengan akses jalan ke pusat kegiatan e. Rencana Jumlah rumah pembangunan baru/ relokasi			
7	Pelaporan Pelaksanaan SPM	a. Jumlah rumah yang tertangani b. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani c. Permasalahan, kendala dalam pelaksanaan pemenuhan SPM	OPD Teknis Bidang Perumahan	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun	

Sumber : Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sedangkan penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria dalam tabel berikut sesuai NSPK yang ada.

Tabel 2.2
Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian
1	2	3	4
1	Rusak Ringan	Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen nonstruktural & arsitektural rusak Tingkat Kerusakan antara 5 s/d 30%	a. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas b. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok/dinding

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian
1	2	3	4
			papan pecu/rusak c. Penutup lantai lepas/terkelupas d. Sebagian intalasi rusak
2	Rusak Sedang	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non structural rusak	a. Bangunan masih berdiri b. Sebagian rangka atap patah c. Balok kolom sebagian patah d. Sebagian kecil dinding, kusen pintu / jendela runtuh / roboh e. Sebagian langit-langit lepas f. Sebagian besar intalasi listrik rusak/terputus
3	Rusak Berat	Bangunan roboh atau sebagian besar komponen structural rusak	a. Bangunan roboh total b. Atap jatuh c. Balok, kolom, plat lantai patah d. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh e. Sebagian besar langit-langit runtuh f. Intalasi listrik rusak total

Sumber : Permen PUPR No 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

2. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Tabel 2.3
Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	a. Lokasi b. Luasan Perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (unit) d. Jumlah Rumah Tangga e. Jumlah Kepala Keluarga f. Status Penghunian	a. Survey Sekunder: • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer	Melakukan update data setiap tahun	Form 4.A.10
2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	a. Lokasi b. Luasan Perumahan (Ha) c. Jumlah Rumah (unit) d. Jumlah Rumah Tangga e. Jumlah Kepala Keluarga f. Status Penghunian	a. Survey Sekunder: • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer	Melakukan update data setiap tahun	Form 4.A.11
3	Pendataan / Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)	a. Lokasi b. Luasan Lahan (Ha) c. Jumlah Rumah (unit) d. Jumlah Rumah Tangga e. Jumlah Kepala Keluarga f. Tingkat Kekumuhan	a. Survey Sekunder: • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer	Melakukan update data setiap tahun	Form 4.A.12
4	Pendataan	a. Lokasi	a. Survey		Form 4.A.13

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	/Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota	• Kecamatan • Kelurahan/ Desa • RT/RW b. Jumlah Rumah Terdampak (unit) c. Jumlah Kepala Keluarga d. Jumlah Jiwa • Kondisi Ekonomi Keluarga • MBR • Non MBR e. Status Kepemilikan Tanah • Legal • Ilegal f. Sudah Terlayani • Ganti aset • Subsidi sewa • Penyediaan RLH g. Belum terlayani	Sekunder: • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer		
5	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	a. Lokasi b. Jumlah Rumah (unit) c. Luas Hunian d. Tarif Sewa	a. Sekunder: • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit b. Survey Primer	Melakukan update data setiap tahun	

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya :

- 1. Relokasi perumahan di “tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya”;
- 2. Relokasi perumahan di lahan-lahan bukan peruntukan permukiman;
- 3. Relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.

Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Resntrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

1. Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi Form 4.B.3 dan Form 4.B.4 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.4
Perhitungan Kebutuhan Biaya Penyediaan Dan Rehabilitasi
Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	a. Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang*Hari
		• Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		b. Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	a. Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data aset lahan pemma	Orang*Hari
		• Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		b. Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)
	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	Pengisian Form	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Sub Total)
	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati	Konsumsi Rapat	Orang*kali
	Penerima dan jenis pelayanan	Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/ fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/ fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Orang*Hari
		• Konsumsi Rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Orang*Hari
		• Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Tenaga Ahli	
		• Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
		• Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan	Rp

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		RAB	
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	Pembinaan SPM kepada pelaksana kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

2. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi Form 4.B.7 dan Form 4.B.8 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.5
Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
A	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)
	1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
			• Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	4	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
			• Tenaga Ahli Geografi / Geodesi	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln
B	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			• Paket meeting	Org*Kali
	2	Rapat Sinkronisasi dokumen	• Paket meeting	Org*Kali
C	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		• Konsumsi	Org*Kali
2	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
D	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
1	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2	Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
		Penggandaan dokumen	
		• Penggandaan dokumen	Eks
E	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
1	Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2	Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		• Konsumsi	Org*Kali
3	Pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	
		• Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Org*Bln
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
F	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
1	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		• Konsumsi	Org*Kali
3	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		• Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		• Penggandaan dokumen	Eks
G	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
1	Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum	Rembug Warga	
		• Media diskusi	Rp

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
		Tenaga Ahli	
		• Tenaga Perencana Ahli	Org*Bln
		• Tenaga Arsitektur Ahli	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
		• Tenaga Ahli ME	Org*Bln
		• Tenaga Plumbing Ahli	Org*Bln
	3 Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
	4 Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun Sewa dan atau / Rumah Khusus	
		• Biaya konstruksi	Rp
		• Biaya MK	Rp
	5 Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	
		• Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		• Penggandaan dokumen	Eks
H	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1 Penyusunan Laporan Penerapan SPM	• Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
		• Penggandaan dokumen laporan	Eks
I	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1 Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		• Pembahasan (Paket meeting)	Org*Kali
		• Penggandaan dokumen laporan	Eks

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
			• Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
J	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali
			Survei lapangan	Org*Kali
K	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket <i>meeting</i>)	Org*Kali
			Penggandaan Materi	Eks
			Narasumber	Org*Kali

C. PERENCANAAN

1. Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

- Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renja Disperkim. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut :
 - Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM dimuat di dalam Renstra Disperkim;
 - Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana aksi penanggulangan bencana bidang Perumahan dituangkan dalam Renja Disperkim dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
- Sosialisasi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di Kawasan rawan bencana;
- Melakukan pendataan data dasar dan pendataan;

4. Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan. Setelah terbentuk satgas bencana sektor perumahan;
5. Pelatihan tim satgas bencana bekerjasama dengan BPBD Provinsi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan terkait SPM bidang perumahan dan kebijakan strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - b. Kegiatan pelatihan identifikasi spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana:
 - 1) Definisi dan kriteria rumah layak huni dan rumah ramah bencana
 - 2) Pengenalan komponen struktur dan non struktur rumah layak huni dan ramah bencana
 - c. Kegiatan pembinaan teknis pengumpulan data:
 - 1) Pelatihan identifikasi kebutuhan data
 - 2) Pelatihan Pengisian Form A dan B
 - 3) Pelatihan identifikasi kerusakan rumah
 - 4) Pelatihan identifikasi penerima layanan SPM
 - 5) Pelatihan metode-metode yang dapat digunakan untuk pengumpulan data
 - 6) Pelatihan metode-metode untuk pengolahan data
 - d. Pelatihan pendampingan masyarakat untuk verifikasi akhir penerima bantuan SPM bidang perumahan.
 - e. Pelatihan penyusunan dan pengisian rencana aksi bidang perumahan sesuai Perka BNPB yang berlaku.
6. Pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah;
7. Pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang perumahan;
8. Penyusunan sistem informasi pemantauan penerapan SPM.

Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Form 4.C.2 sebagaimana terlampir.

2. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan penerapan SPM yang

telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;

- a. Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM yang dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD;
 - b. Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
2. Melakukan pendataan data dasar dan membuat rekapitulasi data;
 3. Sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah daerah akan dilaksanakan;
 4. Sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat;
 5. Melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih;
 6. Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan;
 7. Pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM;

Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Form 4.C.4 sebagaimana terlampir.

D. PELAKSANAAN

1. Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui tata cara pelaksanaan pelayanan, dan upaya pencapaian.

1. Tata cara Pelaksanaan Pemenuhan SPM:
 - a. Koordinasi dengan tim satgas bencana dan tim pendataan;

- b. Pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh tim pendataan cepat (form A);
- c. Kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
- d. Verifikasi calon penerima pelayanan SPM;

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
 - 2) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
 - 3) Tidak memiliki asset bangunan lain;
 - 4) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.
- e. Rembug warga penentuan calon penerima SPM;
 - f. Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, mencakup kegiatan dan sumber pendanaan selama maksimal 3 tahun dalam satu kejadian bencana, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD. Dalam menyusun rencana aksi harus sesuai dengan NSPK yang diterbitkan oleh Kepala BNPB. (Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan);
 - g. Pengajuan anggaran melalui BPBD maupun APBD untuk pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah rusak;
 - h. Penentuan fasilitator pendamping teknis rehabilitasi dan/pembangunan kembali rumah rusak yang memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, mampu membaca gambar teknis, dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), memahami teknis dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
 - i. Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang

- 1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - 2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
 - 3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses perbaikan rumah rusak, mulai yang rusak ringan sampai sedang.
- j. Pembangunan kembali rumah rusak berat.
- 1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - 2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
 - 3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses pembangunan kembali terhadap rumah yang rusak berat di lokasi yang sama.
- k. Pembangunan baru/ relokasi rumah korban bencana
- 1) Penyusunan siteplan perumahan baru;
 - 2) Pengadaan lahan yang mempunyai fasilitas akses PSU ke pusat kegiatan;
 - 3) Pembangunan baru rumah layak huni di lokasi baru (relokasi) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga secara kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.
- l. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana
- 1) Bimbingan teknis dan pendampingan akses layanan informasi rumah sewa layak huni;
 - 2) Fasilitasi rumah susun sewa atau bantuan uang sewa rumah layak huni bagi penerima pelayanan.
- m. Pemantauan penerapan SPM
- n. Pelaporan penerapan SPM
2. Upaya Pencapaian
- a. Penyusunan Rencana dan Prioritas Penerapan SPM;

- 1) Sinkronisasi kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dimuat dalam Dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstrada Bidang Perumahan;
 - 2) Pengalokasian anggaran kebutuhan SPM dalam RKPD;
 - 3) Penyusunan RP3KP.
- b. Sosialisasi SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, mencakup materi sebagai berikut:
- 1) Penerima layanan SPM;
 - 2) Spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana;
 - 3) Tata cara perbaikan/rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam;
 - 4) Pemanfaatan potensi dan penggalangan dana untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana.
- c. Pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM (Pemerintah, LSM, Swasta, Akademisi, dll).

Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dilihat pada Form 4.D.2 sebagaimana terlampir.

2. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Kabupaten/Kota oleh OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.

1. Tata Cara Pelaksanaan SPM
 - a. Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru
 - 1) Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya

- 2) Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
 - 3) Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting
- b. Melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan
 - f. Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan
 - g. Melakukan penyaluran subsidi uang sewa
 - h. Melakukan penyediaan rumah layak huni
2. Upaya Pencapaian
 - a. Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
 - b. Pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti PTSP dan REI.
 - c. Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.

Rincian Capaian Pelaksanaan "Form 4.D.4 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilihat pada Form 4.D.4 sebagaimana terlampir.

5. BIDANG TRANTIBUMLINMAS

A. PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan standar teknis SPM, tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mencapai hasil 100 % (serratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM yang telah ditentukan, untuk mencapai hasil yang telah ditentukan maka dalam pengumpulan data meliputi :

- Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak mempetroleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.
- Jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Sedangkan hasil dari pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum :

- Jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada sebanyak 4 (empat) orang
- Asset yang dimiliki warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Perda/Perkada sebanyak 4 (empat) unit rumah dalam keadaan baik
- Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penegakan Perda/Perkada yang dimiliki Satpol PP sebanyak 6 jenis
- Sarana prasarana penunjang penegakan Perda/Perkada yang dimiliki Satpol PP sebanyak 28 uniiti dalam keadaan layak
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Satpol PP sebanyak 37 orang yang terdiri dari 25 PNS dan 12 Non PNS, sedangkan PNS yang sudah mengikuti diklat 20 orang, yng belum diklat 5 orang.
- Perda/Perkada yang ditegakan sebanyak 7 Perda
- Tidak ada warga negara yang terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada dalam radiu 0-50 meter
- Tidak ada asset yang dimiliki warga negara yang rusak akibat penegakan Perda dan Perkada dalam radius 0-50 meter

b. Pelayananm Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- Damkar Kabupaten Jepara tidak memiliki relawan pemadam kebakaran

- Jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran sebanyak 80 orang, dengan rincian laki-laki 73 orang, perempuan 7 orang

c. Pelayanan Sub Urusan bencana daerah

Standar pelayanan masyarakat pada sub urusan bencana yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dalam pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Kemudian data perlu dikumpulkan pada tahapan ini adalah terkait dengan jumlah barang dan atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Pengumpulan dan pendataan sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

a. Penghitungan Layanan Trantibum

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada prinsipnya adalah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia.

- Sesuai dengan penghitungan kebutuhan penerima layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, untuk kebutuhan layanan trantibumlinmas sudah sesuai dengan mutu layanan dasar
- Dalam rangka penegakan Perda/Perkada, Satpol PP Kabupaten Jepara sudah mempunyai 6 SOP dan untuk tahun 2022 tidak ada SOP baru yang akan disusun ataupun direvisi
- Hasil penghitungan kebutuhan peningkatan kapasitas personil Satpol PP, diperlukan adanya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP tingkat dasar dan diklat PPNS
 - Sesuai dengan mutu pelayanan dasar sarana prasana Satpol PP yang dibutuhkan 34 sedangkan sarana prasarana yang tersedia sebanyak 28 unit, sehingga masih diperlukan sarana prasarana sebanyak 6 unit.

- Penegakan Perda/Perkada yang dilaksanakan Satpol PP tidak berdampak kepada warga negara yang berada dalam radius 0-50 mter dari lokasi penegakan Perda/Perkada, maka tidak diperlukan penghitungan perkiraan kebutuhan pelayanan dasar.

b. Penghitungan Layanan Pemadaman Kebakaran

- Untuk layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran, kebutuhan alat komunikasi sudah tercukupi dengan tersedia 2 HT, sedangkan untuk penyediaan system pelaporan masyarakat masyarakat/panic button belum tersedia
- Untuk layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, telah disediakan sarana prasana pemadaman kebakaran beserta pemeliharannya, diantaranya 3 pos WMK, 7 unit mobil damkar, 1 unit tandon air, APD 14 unit, peralatan dan perlengkapan pemadaman kebaran 16 unit, serta kesiapsiagaan petugas damkar sebanyak 31 orang.
- Belum tersedianya mobil penyelamatan (rescue), peralatan dan perlengkapan penyelamatan serta kesiapsiagaan petugas penyelamatan (rescue) untuk layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pemadaman kebakaran.
- Dalam rangka pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada msyarakat sedangkan untuk pelatihan/penyuluhan masyarakat relawan kebakaran dan pembentukan Sistem Ketahanan kebakaran Lingkungan (SKK) belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

c. Penghitungan Layanan Sub Urusan bencana daerah

Dalam penghitungan layanan sub urusan bencana daerah dilaksanakan berdasarkan Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana dengan melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana, identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana.

C. PERENCANAAN

Guna mendukung pencapaian target SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maka telah dialokasikan anggaran untuk pemenuhan pelayanan dasar tersebut melalui

program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) maupun Rencana Kerja (RENJA). Program/kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pemenuhan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah :

a. Perencanaan Pemenuhan Pelayanan dasar Sub Urusan Trantibum

- Untuk rencana pemenuhan pelayanan dasar SPM trantibumlinmas sub urusan trantibum telah dialokasikan anggaran melalui Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dan Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp. 157.000.000,- dari dana APBD
- Untuk peningkatan kapasitas anggota Satpol PP telah dialokasikan anggaran melalui program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui kegiatan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM sebesar Rp. 10.000.000,-
- Rencana Pemenuhan sarana prasarana bagi warga negara yang terdampak dalam radius 0-50 meter dari penegakan Perda/Perkada telah dialokasikan anggaran melalui program peningkatan ketentraman dan ketertib umum, dengan kegiatan penegakan Perda/Perkada, dan sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap Perda/Perkada sebesar Rp. 3.925.000,- untuk 2 orang.

b. Perencanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Damkar

- Untuk penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar sub urusan pemadam kebakaran di Kabupaten Jepara sudah ada 3 pos WMK, sedangkan sampai tahun 2022 belum mempunyai relawan damkar.

c. Perencanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah

- Untuk penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar sub urusan bencana daerah prioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam

rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan rencana pemenuhan sesuai perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan terhadap layanan dasar dan mutu layanan dasar yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar sub Urusan Trantibum

- Target capaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum untuk 2 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.925.000,- sedangkan realisasi capaiannya NIHIL karena dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada tidak ada warga negara dalam radius 0-50 meter yang terdampak.
- Pelaksanaan penegakan Perda/Perkada didukung oleh 37 personil Satpol PP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.000.000,-
- Sarana prasarana pemenuhan layanan dasar sub urusan trantibum telah terpenuhi sesuai dengan mutu pelayanan dasar.

b. Pelaksanaan Pemenuhan Dasar Sub Urusan Damkar

- Realisasi capaian pemenuhan pelayanan dasar sub urusan damkar oleh petugas damkar telah mencapai 100 %
- Realisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar untuk operasi non kebakaran capaiannya NIHIL

c. Pelaksanaan Pemenuhan dasar Sub Urusan Bencana Daerah

- Realisasi capaian pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana daerah yang meliputi Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai 100 %.

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

A. PENGUMPULAN DATA

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara melakukan pengumpulan dan pengelolaan data bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah meliputi : 1) data penerima pelayanan dasar; 2) data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan 3) data sarana dan prasarana pelayanan dasar. Pengumpulan dan pengelolaan data ditujukan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan korban bencana yang ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan dan ketepatan sasaran.

Selanjutnya hasil tahapan pengumpulan dan pengelolaan data, diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui SIKS-NG atau Sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG. (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – New Generation).

Data penerima pelayanan dasar, data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dan data sarana dan prasarana pelayanan dasar dilakukan pemutakhiran secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Tahapan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, sebagai berikut :

- a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
- b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
- c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial;
- d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;

- e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
- f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
- g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
- h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
- i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah. Dan, hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

C. PERENCANAAN

Bahwa penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan maka harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah telah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinsospermasdes Kabupaten Jepara.

Selanjutnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

D. PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan rencana pemenuhan sesuai perencanaan yang telah disusun.

Pelaksanaan terhadap layanan dasar dan mutu layanan dasar yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Pendidikan Dasar
- 3. Pendidikan Kesetaraan.

B. TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Untuk daerah kabupaten/kota jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Terdapat perubahan dari SPM sebelumnya yang hanya pendidikan dasar saja.

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan tahun 2022. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya sesuai dengan rencana target target (jumlah orang yang akan terlayani).

Tabel 3.A.1
Target dan Indikator Pencapaian SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	34.133	Desember 2022	1 . Buku gambar	40,570	Desember 2022	36.016.811.000
					2 . Alat mewarnai	40,570	Desember 2022	
					3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	40,570	Desember 2022	
					4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	668	Desember 2022	
					5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,787	Desember 2022	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	157.371	Desember 2022	1 . Buku teks pelajaran	112506	Desember 2023	166.322.597.000
					2 . Perlengkapan belajar	112506		
					3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala	449		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV			
					4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	704		
					5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	4976		
					6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	112506		
					7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	6148		
					8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	698		
3	Pendidik	Jumlah	4.518	Desemb	1 . Modul	4518	Desemb	47.852.190.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	an Kesetaraan	penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		er 2022	belajar		er 2022	
					2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	16		
					3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	4518		
					4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	42		
					5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1		
					6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi	4		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					SMA/sederajat			
					7 . Perlengkapan belajar	4518		
					8 . PKBM Terakreditasi minimal C	16		

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A.2
Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Tahun Anggaran
1	Pendidikan Anak Usia Dini	36.016.811.000	2022
2	Pendidikan Dasar	166.322.597.000	2022
3	Pendidikan Kesetaraan	47.852.190.000	2022

D. DUKUNGAN PERSONIL

Guna tercapainya pelayanan Pendidikan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BIDANG	Jenis Kelamin		TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Sekretariat	12	6	18
2	PAUD dan PNF	4	4	8
3	SD	5	4	9
4	SMP	4	3	7
5	Pemuda dan Olahraga	8	1	9
6	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2	9
7	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (dinas)	8	4	12
8	Tenaga Harian Lepas	31	18	49
9	Guru	2.350	4.340	6.690
JUMLAH		2.429	4.382	6.811

E. HASIL CAPAIAN

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A.3
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah penduduk usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	34.133	34.133	100%	36.016.811.000	35.913.733.175	99,71%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
2.	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	176.111	176.111	100%	166.322.597.000	162.665.228.526	97,80%
3.	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.518	4.518	100%	47.852.190.000	47.810.511.940	99,91%

Pencapaian SPM dihitung dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian penerima pelayanan dasar diperoleh dari target dan indikator kinerja, sedangkan capaian mutu pelayanan dasar diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Adapun perhitungan Capaian Indeks IP SPM diuraikan pada Tabel 3.A.4 dan 3.A.5 sebagai berikut :

Tabel 3.A.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2022

1. Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yg harus dilayani (Orang)	Jumlah yg terlayani (Orang)		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yg harus dilayani (Orang)	Jumlah yg terlayani (Orang)		
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	34.133	34.133	100,00	80,00
2.	Pendidikan Dasar	176.111	176.111	100,00	80,00
3.	Pendidikan Kesetaraan	4.518	4.518	100,00	80,00

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
1	Pendidikan Dasar Usia Dini			100%	20%
	1. Buku gambar	40.570	40.570	100%	20%
	2. Alat mewarnai	40.570	40.570	100%	20%
	3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	333	333	100%	20%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	668	668	100%	20%
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.787	1.787	100%	20%
2	Pendidikan Dasar			100%	20%
	1. Buku teks pelajaran	112.506	112.506	100%	20%
	2. Perlengkapan belajar	112.506	112.506	100%	20%
	3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah)	449	449	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	yang berkualifikasi S1/D-IV				
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	704	704	100%	20%
	5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	4.976	4.976	100%	20%
	6. Penyediaan biaya personil peserta didik	112.506	112.506	100%	20%
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	6.148	6.148	100%	20%
	8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	698	698	100%	20%
3	Pendidikan Kesetaraan			100%	20%
	1. Modul belajar	4.518	4.518	100%	20%
	2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	16	16	100%	20%
	3. Penyediaan biaya personil peserta didik	4.518	4.518	100%	20%
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	42	42	100%	20%
	5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1	1	100%	20%
	6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga	4	4	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat				
	7. Perlengkapan belajar	4.518	4.518	100%	20%
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	16	16	100%	20%

Tabel 3.A.5
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
2.	Pendidikan Dasar	100	Tuntas Paripurna
3.	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna
	IP SPM Bidang Pendidikan	100,00%	Tuntas Paripurna

Dalam perhitungan indeks capaian SPM (IP SPM) terdapat kategori nilai indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

- a. Nilai 100 dikategorikan Tuntas Paripurna
- b. Nilai 90-99 dikategorikan Tuntas Utama
- c. Nilai 80-89 dikategorikan Tuntas Madya
- d. Nilai 70-79 dikategorikan Tuntas Pratama
- e. Nilai 60-69 dikategorikan Tuntas Muda
- f. Nilai < 60 dikategorikan BelumTuntas

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang pendidikan tahun 2022 rata-rata sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan

dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Terdapat 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan semua telah ymencapai target 100%.

F. KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan, antara lain :

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
		1. Belum optimalnya kelengkapan data dan ketepatan waktu pelaporan 2. Terdapat perubahan beberapa data sasaran, dimana pada awalnya data sasaran menggunakan data estimasi, sedangkan pada akhir tahun diubah menjadi angka riil. 3. Sulitnya menghitung kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti.	1. Penguatan komitmen dalam pelaporan data SPM. 2. Adanya SK perubahan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun berjalan. 3. Adanya pelatihan perhitungan kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Pembagian tupoksi yang jelas dan pelatihan rutin pada sumber daya yang melaksanakan SPM.
II	Eksternal		
		1. Belum ada pilah anggaran spesifik untuk SPM 2. Belum ada monitoring dan evaluasi rutin penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten	1. Integrasi anggaran spesifik untuk SPM 2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- 4. Pelayanan kesehatan balita.
- 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- 9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.
- 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- 11. Pelayanan kesehatan orang terduga TB.
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

B. TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya sesuai dengan rencana target target (jumlah orang yang akan terlayani).

Tabel 3.B.1
Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayan an Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	20.841	Desember 2022	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	20.841	Desember 2022	21.946.190.000
					2 . Tablet tambah darah	20.841		
					3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	20.841		
					4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	20.841		
					5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	20.841		
					6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	5		
					7 . Bidan	721		
					8 . Perawat	1.463		
					2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
2 . Kartu ibu (rekam medis)	18.635							
3 . Buku	18.635							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun			Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			
					4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	5		
					5 . Bidan	721		
					6 . Perawat	1.463		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran bayi baru lahir yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	18.637	Desember 2022	1 . Vaksin Hepatitis B0	18.637	Desember 2022	21.904.064.000
					2 . Vitamin K1 injeksi	18.637		
					3 . Salep/tetes mata antibiotik	18.637		
					4 . Formulir bayi baru lahir	18.637		
					5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	18.637		
					6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.637		
					7 . Dokter/dokter spesialis Anak	7		
					8 . Bidan	721		
					9 . Perawat	1.463		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan pelayanan	91.862	Desember 2022	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkemban	91.862	Desember 2022	12.702.977.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		kesehatan balita sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran balita yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun			gan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku			
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)				91.862			
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)				91.862			
	4 . Vitamin A Biru				91.862			
	5 . Vitamin A Merah				91.862			
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella				91.862			
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB - Hib, Campak, Rubella				91.862			
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)				91.862			
	9 . Peralatan Anafilaktik				91.862			
	10 . Bidan				721			
	11 . Dokter				321			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					12 . Perawat	1.463		
					13 . Ahli Gizi	70		
					14 . Guru PAUD	1.036		
					15 . Kader Kesehatan	4.137		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	40.610	Desember 2022	1 . Buku raport kesehatanku	40.610	Desember 2022	10.582.576.000
					2 . Buku pemantauan kesehatan	40.610		
					3 . Kuesioner skrining kesehatan	40.610		
					4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	40.610		
					5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	40.610		
					6 . Dokter/Dokter gigi	79		
					7 . Bidan	721		
					8 . Perawat	1.463		
					9 . Ahli Gizi	70		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	90		
					11 . Guru	1.578		
					12 . Kader Kesehatan	4.137		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran usia 15-59 tahun yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	799.047	Desember 2022	1 . Pedoman dan media Komunikasi , Informasi, Edukasi (KIE)	799.047	Desember 2022	22.889.100.000
					2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter , Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	799.047		
					3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	799.047		
					4 . Dokter	321		
					5 . Bidan	721		
					6 .	1.463		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Perawat			
					7 . Ahli Gizi	70		
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	90		
					9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	594		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran usia 60 tahun ke atas yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	128.564	Desember 2022	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	28.564	Desember 2022	7.973.921.000
					2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	128.564		
					3 . Buku kesehatan lansia	128.564		
					4 . Dokter	321		
					5 . Bidan	721		
					6 . Perawat	1.463		
					7 . Ahli Gizi	70		
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	90		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	594		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita hipertensi yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	361.282	Desember 2022	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi , Informasi, Edukasi (KIE)	361.282	Desember 2022	4.431.452.000
					2 . Tensimeter	361.282		
					3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	361.282		
					4 . Dokter	321		
					5 . Bidan	721		
					6 . Perawat	1.463		
					7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	90		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita	30.570	Desember 2022	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	30.570	Desember 2022	8.429.532.000
					2 . Formulir pencatatan dan pelaporan	30.570		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		DM yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun			aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			
					3 . Pedoman dan media Komunikasi , Informasi, Edukasi (KIE)	30.570		
					4 . Dokter	321		
					5 . Bidan	721		
					6 . Perawat	1.463		
					7 . Ahli Gizi	70		
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	90		
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat				Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran ODGJ yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	3.031		
					2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	3.031		
					3 . Penyediaa n formulir pencatatan	3.031		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					dan pelaporan			
					4 . Media Komunikasi , Informasi, Edukasi (KIE)	3.031		
					5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	5		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberku losis	Jumlah penderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingk an dengan jumlah sasaran penderita TB yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	5.030	Desember 2022	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	5.030	Desember 2022	8.882.324.000
					2 . Reagen Zn TB	5.030		
					3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	5.030		
					4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bu nsen, Ose/Lidi), Rak pengering	5.030		
					5 . Catridge	5.030		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					tes cepat molekuler			
					6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	5.030		
					7 . Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	5.030		
					8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	11		
					9 . Perawat	1.463		
					10 . Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	159		
					11 . Penata Rontgen	43		
					12 . Tenaga kesehatan masyarakat	90		
					13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	594		
					13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai i			
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang	26.022	Desember 2022	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet,	26.022	Desember 2022	9.341.482.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	Berisiko Terinfeksi HIV	mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran orang berisiko terinfeksi HIV yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun			Poster, Banner)			
					2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	26.022		
					3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	26.022		
					4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	26.022		
					5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	11		
					6 . Perawat	1.463		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					7 . Bidan	721		
					8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	159		
					9 . Tenaga kesehatan masyarakat	90		
					10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	594		

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.B.2
Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
1	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu	21.946.190.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
	Ibu Hamil	Hamil	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.178.146.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	21.904.064.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	12.702.977.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	10.582.576.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	22.889.100.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7.973.921.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.431.452.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.429.532.000
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	5.423.333.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	8.882.324.000
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	9.341.482.000

D. DUKUNGAN PERSONIL

Guna tercapainya pelayanan kesehatan dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	
		L	P

1.	Dokter	119	202
2.	Dokter Gigi	17	62
3.	Perawat	537	926
4.	Bidan		721
5.	Ahli Gizi	6	64
6.	Tenaga Kesmas	21	69
7.	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	30	129
8.	Penata Rontgen	21	22
9.	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	178	416
10.	Kader Kesehatan		4.137
J U M L A H		7.677	

E. HASIL CAPAIAN

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.B.3
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.841	20.841	100,00	21.946.190.000	19.921.106.751	90,77
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.635	18.635	100,00	23.178.146.000	21.976.169.761	94,81
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.637	18.637	100,00	21.904.064.000	20.814.638.291	95,03
4	Pelayanan Kesehatan Balita	91.862	91.862	100,00	12.702.977.000	10.429.589.551	82,10
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	40.610	37.488	92,31	10.582.576.000	8.099.279.651	76,53
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia	799.047	741.567	92,81	22.889.100.000	21.967.281.051	95,97

	Produktif						
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	128.564	123.152	95,79	7.973.921.000	5.842.296.151	73,27
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	361.282	331.204	91,67	4.431.452.000	3.453.977.651	77,94
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.570	30.570	100,00	8.429.532.000	8.071.872.891	95,76
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	3.031	3.000	98,98	5.423.333.000	4.607.164.251	84,95
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	5.030	5.030	100,00	8.882.324.000	7.633.858.651	85,94
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	26.022	26.022	100,00	9.341.482.000	8.300.930.841	88,86

Pencapaian SPM dihitung dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian penerima pelayanan dasar diperoleh dari target dan indikator kinerja, sedangkan capaian mutu pelayanan dasar diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Adapun perhitungan Capaian Indeks IP SPM diuraikan pada Tabel 3.B.4 dan 3.B.5 sebagai berikut :

Tabel 3.B.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2022

1. Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yg harus dilayani (Orang)	Jumlah yg terlayani (Orang)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.841	20.841	100,00	80,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.635	18.635	100,00	80,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.637	18.637	100,00	80,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	91.862	91.862	100,00	80,00
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	40.610	37.488	92,31	73,85
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	799.047	741.567	92,81	74,25
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	128.564	123.152	95,79	76,63
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	361.282	331.204	91,67	73,34
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.570	30.570	100,00	80,00
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	3.031	3.000	98,98	79,18
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	5.030	5.030	100,00	80,00
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	26.022	26.022	100,00	80,00

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu			100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Hamil				
	1.Vaksin Tetanus Difteri (Td)	20.841	20.841	100,00	20,00
	2.Tablet tambah darah	20.841	20.841	100,00	20,00
	3.Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	20.841	20.841	100,00	20,00
	4.Kartu ibu/rekam medis ibu	20.841	20.841	100,00	20,00
	5.Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	20.841	20.841	100,00	20,00
	6.Dokter/dokter spesialis kebidanan	5	5	100,00	20,00
	7.Bidan	721	721	100,00	20,00
	8.Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			100,00	20,00
	1.Formulir Partograf	18.635	18.635	100,00	20,00
	2.Kartu ibu (rekam medis)	18.635	18.635	100,00	20,00
	3.Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.635	18.635	100,00	20,00
	4.Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	5	5	100,00	20,00
	5.Bidan	721	721	100,00	20,00
	6.Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			100,00	20,00
	1.Vaksin Hepatitis B0	18.637	18.637	100,00	20,00
	2.Vitamin K1 injeksi	18.637	18.637	100,00	20,00
	3.Salep/tetes mata antibiotik	18.637	18.637	100,00	20,00
	4.Formulir bayi baru	18.637	18.637	100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	lahir				
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	18.637	18.637	100,00	20,00
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.637	18.637	100,00	20,00
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	7	7	100,00	20,00
	8. Bidan	721	721	100,00	20,00
	9. Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100,00			20,00
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	91.862	91.862	100,00	20,00
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	91.862	91.862	100,00	20,00
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	91.862	91.862	100,00	20,00
	4. Vitamin A Biru	91.862	91.862	100,00	20,00
	5. Vitamin A Merah	91.862	91.862	100,00	20,00
	6. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	91.862	91.862	100,00	20,00
	7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	91.862	91.862	100,00	20,00
	8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	91.862	91.862	100,00	20,00
	9. Peralatan Anafilaktik	91.862	91.862	100,00	20,00
	10. Bidan	721	721	100,00	20,00
	11. Dokter	321	321	100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	12. Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	13. Ahli Gizi	70	70	100,00	20,00
	14. Guru PAUD	1.036	1.036	100,00	20,00
	15. Kader Kesehatan	4.137	4.137	100,00	20,00
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			96,80	19,36
	1. Buku raport kesehatanku	40.610	37.488	92,31	18,46
	2. Buku pemantauan kesehatan	40.610	37.488	92,31	18,46
	3. Kuesioner skrining kesehatan	40.610	37.488	92,31	18,46
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	40.610	37.488	92,31	18,46
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	40.610	37.488	92,31	18,46
	6. Dokter/Dokter gigi	79	79	100,00	20,00
	7. Bidan	721	721	100,00	20,00
	8. Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	9. Ahli Gizi	70	70	100,00	20,00
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	90	90	100,00	20,00
	11. Guru	1.578	1.578	100,00	20,00
	12. Kader Kesehatan	4.137	4.137	100,00	20,00
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			97,60	19,52
	1. Pedoman dan media Komunikasi,	799.047	741.567	92,81	18,56

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Informasi, Edukasi (KIE)				
	2.Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	799.047	741.567	92,81	18,56
	3.Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	799.047	741.567	92,81	18,56
	4.Dokter	321	321	100,00	20,00
	5.Bidan	721	721	100,00	20,00
	6.Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	7.Ahli Gizi	70	70	100,00	20,00
	8.Tenaga Kesehatan Masyarakat	90	90	100,00	20,00
	9.Tenaga Non Kesehatan Terlatih	594	594	100,00	20,00
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	98,60			19,72
	1.Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	128.564	123.152	95,79	19,16
	2.Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	128.564	123.152	95,79	19,16
	3.Buku kesehatan	128.564	123.152	95,79	19,16

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	lansia				
	4.Dokter	321	321	100,00	20,00
	5.Bidan	721	721	100,00	20,00
	6.Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	7.Ahli Gizi	70	70	100,00	20,00
	8.Tenaga Kesehatan Masyarakat	90	90	100,00	20,00
	9.Tenaga Non Kesehatan Terlatih	594	594	100,00	20,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			96,43	19,29
	1.Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	361.282	331.204	91,67	18,33
	2.Tensimeter	361.282	331.204	91,67	18,33
	3.Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	361.282	331.204	91,67	18,33
	4.Dokter	321	321	100,00	20,00
	5.Bidan	721	721	100,00	20,00
	6.Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	7.Tenaga Kesehatan Masyarakat	90	90	100,00	20,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			100,00	20,00
	1.Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	30.570	30.570	100,00	20,00
	2.Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	30.570	30.570	100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	30.570	30.570	100,00	20,00
	4. Dokter	321	321	100,00	20,00
	5. Bidan	721	721	100,00	20,00
	6. Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	7. Ahli Gizi	70	70	100,00	20,00
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	90	90	100,00	20,00
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat			99,18	19,84
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	3.031	3.000	98,98	19,80
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	3.031	3.000	98,98	19,80
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	3.031	3.000	98,98	19,80
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	3.031	3.000	98,98	19,80
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	5	5	100,00	20,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis			100,00	20,00
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster,	5.030	5.030	100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Banner)				
	2. Reagen Zn TB	5.030	5.030	100,00	20,00
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	5.030	5.030	100,00	20,00
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	5.030	5.030	100,00	20,00
	5. Catridge tes cepat molekuler	5.030	5.030	100,00	20,00
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	5.030	5.030	100,00	20,00
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	5.030	5.030	100,00	20,00
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	11	11	100,00	20,00
	9. Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	10. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	159	159	100,00	20,00
	11. Penata Rontgen	43	43	100,00	20,00
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	90	90	100,00	20,00
	13. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	594	594	100,00	20,00
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	100,00			20,00
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	26.022	26.022	100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	26.022	26.022	100,00	20,00
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	26.022	26.022	100,00	20,00
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	26.022	26.022	100,00	20,00
	5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	11	11	100,00	20,00
	6. Perawat	1.463	1.463	100,00	20,00
	7. Bidan	721	721	100,00	20,00
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	159	159	100,00	20,00
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	90	90	100,00	20,00
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	594	594	100,00	20,00

Tabel 3.B.5

Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93,21	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	93,77	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	96,35	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	92,63	Tuntas Utama
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	99,02	Tuntas Utama
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	100,00	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	100,00	Tuntas Paripurna
	IP SPM Bidang Kesehatan	97,91%	Tuntas Utama

Dalam perhitungan indeks capaian SPM (IP SPM) terdapat kategori nilai indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

- a. Nilai 100 dikategorikan Tuntas Paripurna
- b. Nilai 90-99 dikategorikan Tuntas Utama
- c. Nilai 80-89 dikategorikan Tuntas Madya
- d. Nilai 70-79 dikategorikan Tuntas Pratama
- e. Nilai 60-69 dikategorikan Tuntas Muda
- f. Nilai < 60 dikategorikan BelumTuntas

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang kesehatan tahun 2022 rata-rata sebesar 97,91% dengan kategori Tuntas Utama. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Terdapat 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yang mencapai target 100% ada 7 (tujuh) indikator, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada penderita DM, pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB, dan

pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Adapun yang mempunyai capaian kurang dari 100% ada 5 (lima) indikator yaitu pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.

F. KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan adalah:

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
		1. Belum optimalnya kelengkapan data dan ketepatan waktu pelaporan 2. Terdapat perubahan beberapa data sasaran, dimana pada awalnya data sasaran menggunakan data estimasi, sedangkan pada akhir tahun diubah menjadi angka riil. 3. Sulitnya menghitung kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti.	1. Penguatan komitmen dalam pelaporan data SPM. 2. Adanya SK perubahan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun berjalan. 3. Adanya pelatihan perhitungan kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Pembagian tupoksi yang jelas dan pelatihan rutin pada sumber daya yang melaksanakan SPM.
II	Eksternal		
		1. Belum ada pilah anggaran spesifik untuk SPM dari anggaran BLUD 2. Belum ada monitoring dan evaluasi rutin penerapan	1. Integrasi anggaran BLUD spesifik untuk SPM 2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala penerapan SPM dari Tim

		SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten	Penerapan SPM Kabupaten

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Kemudian pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh masyarakatnya. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

B. TARGET CAPAIAN

Target pencapaian adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditentukan untuk dicapai. Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya termasuk perhitungan pembiayaannya.

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Pekerjaan Umum tahun 2022. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah Kartu Keluarga yang harus terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya sesuai dengan rencana target (jumlah orang yang akan terlayani).

Tabel 3.C.1
Target dan Indikator Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenis	Indikator Kinerja Pencapaian	Anggaran

	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Presentase rumah tangga yang terlayani air minum layak	402.129	Desember 2022	Presentase rumah tinggal yang dapat mengakses air bersih	402.129	Desember 2022	18.558.724.229
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Presentase rumah tangga yang terlayani sanitasi	402.129	Desember 2022	Presentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	402.129	Desember 2022	8.658.223.000

Target yang disampaikan pada data diatas merupakan target yang diharapkan dapat dicapai dengan akumulasi jumlah target disampaikan adalah jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 402.129 KK dan anggaran yang disampaikan merupakan anggaran perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu sebesar Rp. 18.558.724.229 dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp. 8.658.223.000.

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.C.2
Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Pengelolaam dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	592.193.229
2		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	370.116.000
3		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	17.659.415.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
4	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000
5		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	845.384.000
6		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	8.658.223.000

Alokasi anggaran yang disampaikan merupakan alokasi anggaran perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu sebesar Rp 18.558.724.229 dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp 8.658.223.000.

D. DUKUNGAN PERSONIL

Guna tercapainya pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya manusia, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Tenaga	Jumlah (Orang)
	Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Jepara	
1.	Kepala Bidang dan Sub Koordinator	3
2.	Staf Adminitrasi	16
3.	Staf Teknis	12
4.	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	21
	J U M L A H	52

Personil yang disampaikan pada tabel diatas merupakan karyawan ASN maupun Non ASN dan Tenaga Fasilitator Lapangang (TFL) di bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

E. HASIL CAPAIAN

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.C.3
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisa si	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	402.129	384.405	95,59	18.558.724. 229	17.166.582.297	92,49
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	402.129	299.371	74,45	8.658.223. 000	8.503.872.063	98,21

Capaian layanan dasar urusan Bidang Pekerjaan Umum dalam hal ini Air Minum dan Sanitasi merupakan data capain Air Minum dan Sanitasi

di Kabupaten Jepara hingga tahun 2022 dengan asumsi penerima layanan yaitu Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara yang di targetkan terlayani tuntas. Adapun perhitungan Capaian Indeks IP SPM sampai dengan tahun 2022 diuraikan pada berikut :

Tabel 3.C.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2022

1. Capaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yg harus dilayani (KK)	Jumlah yg terlayani (KK)		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	402.129	384.405	95,59	76,76
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	402.129	299.371	74,45	59,56

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	402.129	384.405	95,59	19,11
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	402.129	299.371	74,45	14,89

Tabel 3.C.5
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	95,59	Tuntas Utama
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	74,45	Tuntas Pratama
	IP SPM Bidang Pekerjaan Umum	85,02%	Tuntas Madya

Dalam perhitungan indeks capaian SPM (IP SPM) terdapat kategori nilai indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

1. Nilai 100 dikategorikan Tuntas Paripurna
2. Nilai 90-99 dikategorikan Tuntas Utama
3. Nilai 80-89 dikategorikan Tuntas Madya
4. Nilai 70-79 dikategorikan Tuntas Pratama
5. Nilai 60-69 dikategorikan Tuntas Muda
6. Nilai < 60 dikategorikan BelumTuntas

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2022 yaitu 100% dari yang di targetkan, dengan kategori Tuntas Paripurna.

F. KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Eksternal	Kurang koordinasi antar stakeholder dapat menimbulkan data yang kurang valid	Antara Stakeholder pelaksana SPM harus lebih intens dalam melaksanakan koordinasi hingga ke tingkat desa.
2	Internal	Perhitungan jumlah target yang disampaikan merupakan target pada tahun berjalan. Juga target berdasarkan jumlah KK diseluruh Kab. Jepara apabila ada penambahan	Target yang digunakan harus dipakati oleh semua pihak.

		KK maka target akan bertambah dan penambahan ini belum di update pada data	
3	Eksternal	dikarenakan keterbatasan anggaran maka belun bisa mencapai target Air Minum dan Sanitasi 100% dari total seluruh KK yang ditargetkan	Pemerintah Daerah maupun pusat harus bekerjasama guna pemerataan pembangunan khususnya yang terkait pelaksanaan SPM.
4	Internal	Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti sehingga dalam pengumpulan data juga ditemui kendala karena keterbatasan petugas SPM	
5	Eksternal	Dikarenakan belum adanya rapat koordinasi rutin terkait pengisian SPM, petugas SPM terkadang terkendala terkait teknis pengisian SPM di Website hingga pelaporan SPM	Perlu dilaksanakan pertemuan OPD pengampu SPM guna keberhasilan pelaksanaan hingga pelaporan SPM

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
- a. Pada saat masa pasca bencana;

- b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

B. TARGET PENCAPAIAN

Target capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara adalah 100%. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.D.1
Target dan Indikator Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN						ANGGAR AN (Rp.000)
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKA TOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAI AN	INDIKA TOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAI AN	
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Ko ta	Jumlah Warga Negara korban bencan a yang mempe roleh rumah layak huni	34 Orang (100%)	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan Jasa	34 Orang (100%) (sesuai dengan jumlah warga negara yang korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	627.000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang	Jumlah Warga Negara	77 Orang (100%)	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan	77 Orang (100%) (Sesuai	Setiap Tahun	100.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN						ANGGAR AN (Rp.000)
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKA TOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAI AN	INDIKA TOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAI AN	
	Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	yang terkena relokasi akibat progra m Pemerih ntah Daerah Kabupa ten yang mempe roleh fasilitas penyedi aan rumah yang layak huni			Jasa	dengan jumlah warga negara yang korban bencana yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitas rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

Adapun identifikasi pelaksanaan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 2022		
		URAIAN	PELAKSANAAN (SUDAH/BELUM)	BENTUK PELAKSANAAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 2022			
		URAIAN		PELAKSANAAN (SUDAH/BELUM)	BENTUK PELAKSANAAN
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Pengumpulan Data	SUDAH (100%)	
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengumpulan Data	SUDAH (100%)	Melalui jasa konsultan
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	–	
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	–	
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	–	

Pelaksanaan Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten sebanyak 34 unit (100%) yang pelaksanaannya ditahun 2022 (tahun berjalan) melalui Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di BPKAD Kab. Jepara.

Sedangkan untuk pelaksanaan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Daerah Kabupaten sebanyak 77 unit/orang dengan tahapan pengumpulan data mencapai 100 %.

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM perumahan rakyat pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 727.000.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.D.2
Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO.	KEGIATAN LAYANAN	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
					TAHUN 2022		
					APBD	DAK	LAINNYA
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rehabilitasi	34	627.000.000	627.000.000		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan rumah layak huni	77	100.000.000	100.000.000		
Jumlah *)			111	727.000.000	727.000.000		

Catatan terkait untuk pelaksanaan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Daerah Kabupaten sebanyak 77 unit/orang baru pada tahapan pengumpulan data dengan capaian 100 %.

D. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pelaksanaan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2022 sebanyak 14 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini:

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister	2 Orang
2	Sarjana	9 Orang
3	Sekolah Menengah	3 Orang

E. HASIL CAPAIAN

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Urusan Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.D.3
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp. 000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (100%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (100%)
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34	34	100	627.000	627.000	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp. 000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (100%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (100%)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	77	77	100	100	100	100

Tabel 3.D.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34	34	100	80

NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34	34	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	77	77	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		

1	2	3	4	5	6
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	77	77	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	KATEGORI INDEKS SPM
1	2	3	4
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Program Pemerintah Daerah	100	Pencatatan Saja

Tabel 3.D.5
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34	34	-	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	77	77		100

F. KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	INTERNAL	
1	Bencana yang terjadi pada skala kecil misalnya kebakaran, rumah roboh karena angin puting beliung	dilakukan penanganan dengan menggunakan dana BTT dan bisa tuntas ditahun terjadinya bencana

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
II	EKSTERNAL	
1.	Belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, Kabupaten	Perlu adanya mekanisme dan tata cara penetapan status bencana untuk tingkat Kabupaten
2.	Perlu penyamaan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Rakor bersama stakeholder terkait untuk merumuskan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten
3.	Belum adanya data landbanking yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi	Melaksanakan pendataan atau pencarian lahan yang sesuai dengan peruntukannya

5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis Pelayanan Dasarnya adalah Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator pencapaian :

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum, meliputi :
 - Standar Operasional Satpol PP;
 - Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
 - Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

- b. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebencanaan meliputi :
- Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana;
 - Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
 - Peningkatan kapasitas Personil/ Sumber Daya Manusia
 - Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- c. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebakaran meliputi :
- Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan;
 - Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
 - Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
 - Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran
 - Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang berdampak kebakaran

B. TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

adalah 100%. Sedangkan target capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.E.1
Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2022
1	2	3	4					5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan perkara	2 orang	Setiap Tahun	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	1 orang	Januari-Desember	3.925.000
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1 orang	setahun	
					Standar Operasional Prosedur (SOP)	6 jenis	setahun	
					Standar Sarana Prasarana Satpol PP	28 unit	setahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2022
1	2	3	4					5
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Linmas	37 orang	setahun	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Orang	Setiap Tahun	Pemetaan terhadap lokasi/d daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana	1	setahun	29.980.000
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana	1	setahun	
					Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan	80	setahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2022
1	2	3	4					5
					bencana			
					Peengad aan dan pemasa ngan rambu evakuasi dan papan informas i public per jenis bencana	28 buah	setahun	
					Identifik asi warga yang berpote nsi menjadi korban bencana	1	setahun	
3.	Pelayana n pencega han dan kesiapsia gan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegah an dan kesiapsia gan terhadap bencana	320 orang	Setiap Tahun	Sarana prasara na penangg ulangan bencana	53 unit	setahun	342.415.000
					Peningk atan kapasita s personil / Sumber Daya Manusia	1 orang	setahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2022
1	2	3	4					5
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.130 orang	Setiap Tahun	Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	1	setahun	115.500.000
					Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	3.130 orang	setahun	
					Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	setahun	
					Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit, KLB Wabah zoonosis prioritas	1	setahun	
					Pelaksanaan, Pencarian, pertolongan	3.130	setahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2022
1	2	3	4					5
					evakuasi korban bencana			
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80 orang	Setiap Tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15 menit	setahun	217.000.000
					Prosedur Operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2 jenis	setahun	
					Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	41 unit	setahun	
					Kapasitas aparatur pemadam	31 orang	setahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2022
1	2	3	4					5
					kebakaran dan penyelamatan/SDM			

Target 100% dari seluruh jumlah warga masyarakat Kabupaten Jepara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Mindset indikator penerapan SPM pelayanan trantibumlinmas dalam Permendagri 100 Tahun 2018 adalah terbalik, yaitu apabila tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada maka SOP penegakan produk hukum daerah telah sesuai, dan apabila ada warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan produk hukum daerah bisa diartikan dua: 1) penegakan Perda dan Perkada menyimpang dari SOP, dan 2) ketika penegakan Perda dan Perkada sudah sesuai SOP namun ada warga Negara yang terkena dampak bisa disebabkan musibah yang tidak dapat dikendalikan atau diluar kemampuan manusia.

Untuk target capaian SPM pelayanan yang terkait dengan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga masyarakat diperuntukan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana. Sedangkan warga masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah untuk penyelamatan dan evakuasi yang tertangani dalam waktu tanggap daerah layanan WMK.

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 708.820.000,- dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.E.2
Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum		615.000.000	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		29.980.000	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiaposiagaan terhadap Bencana		342.415.000	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana		115.500.000	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran		217.000.000	

D. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. Sedangkan personil yang mendukung urusan sub kebencanaan daerah sebanyak 25 orang, dan untuk personil yang mendukung sub urusan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 31orang.

Rincian personil pendukung penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Pendidikan	Jumlah
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	S2	2 orang
2.	S1/D4	17 orang

3.	SMA	20 orang
Urusan penyelamatan dan evakuasi kebakaran		
1.	S2	1 orang
2.	S1/D4	8 orang
3.	SMA	21 orang
Urusan penyelamatan dan evakuasi bencana		
1.	S2	1 orang
2.	S1/D4	22 orang
3.	D3	14 orang
4.	SMA	2 orang
	JUMLAH	108 orang

E. HASIL CAPAIAN

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan. Realisasi tersebut meliputi realisasi capaian dan realisasi mutu pelayanan SPM.

Untuk realisasi capaian penerapan SPM dan realisasi mutu pelayanan SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 3.E.3
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan
Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	2 orang	2 orang	100	3.925.000	-	0
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.235.018 orang	1.235.018 orang	100	29.980.000	29.970.000	99,63

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	320 orang	320 orang	100	394.415.000	377.482.365	95,71
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	3.130 orang	3.130 orang	100	115.500.000	108.471.814	93.91
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80 orang	80 orang	100	217.000.000	214.475.221	98.83

Tabel 3.E.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2022

1. Capaian Layanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	2 orang	2 orang	100	80
2.	Pelayanan informasi rawan bencana.	1,235,018 orang	1,235,018 orang	100	80
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	320 orang	320 orang	100	80
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	3.130 orang	3.130 orang	100	80

	bencana				
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80 orang	80 orang	100	80

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No.	Mutu minimal pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1.	2	3	4	5	6
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	1	1	100	20
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	100	20
3.	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	6	6	100	20
4.	Standar Sarana prasarana Satpol PP	28	28	100	20
5.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota linmas	37	37	100	20
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	2	100	20
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)				100
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian resiko bencana	1	1	100	20
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di	1	1	100	20

No.	Mutu minimal pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1.	2	3	4	5	6
	Kawasan rawan bencana				
3.	Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	80	80	100	20
4.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public per jenis bencana	28	28	100	20
5.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1	1	1	20
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kebencanaan)				100
1	Sarana Prasarana penanggulangan bencana	53	53	100	20
2..	Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia (SDM)	25	25	100	20
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana (Kebencanaan)				
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100	20
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3130	3130	100	20
3.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100	20
4.	Respon cepat kejadian luar biasa (KLB), penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100	20
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3130	3130	100	20

No.	Mutu minimal pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1.	2	3	4	5	6
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran (Kebencanaan)				100
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15 menit	15 menit	100	20
2.	Prosedur Operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100	20
3.	Sarana prasarana pemadam kebakareran, penyelamatan dan evakuasi	41	41	100	20
4.	Kapasitas aparatur pemadann kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	31	31	100	20

Tabel 3.E.5
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM
Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan dasar	Indeks SPM (Ip layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan informasi rawan bencana.	100	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Tuntas Paripurna

Dalam perhitungan indeks capaian SPM (IP SPM) terdapat kategori nilai indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

- a. Nilai 100 dikategorikan Tuntas Paripurna
- b. Nilai 90-99 dikategorikan Tuntas Utama
- c. Nilai 80-89 dikategorikan Tuntas Madya
- d. Nilai 70-79 dikategorikan Tuntas Pratama
- e. Nilai 60-69 dikategorikan Tuntas Muda
- f. Nilai < 60 dikategorikan BelumTuntas

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2022 mencapai sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Untuk 5 (lima) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat semuanya mencapai target 100%

F. KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, antara lain :

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1.	Internal	Cakupan wilayah manajemen kebakaran tidak sebanding dengan sarana prasarana yang tersedia	Memanfaatkan sarana prasarana penunjang pemadam kebakaran yang tersedia
2.	Internal	Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai	Perlunya penyusunan kajian rrisiko bencana lengkap dengan regulasinya
3.	Internal	Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi keahlian teknis maupun dari segi jumlah	Optimalisasi sumber daya manusia yang ada dan peningkatan SDM dengan mengikuti bintek/diklat

4.	Internal	Belum memadainya / masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Memanfaatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang tersedia

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana

B. TARGET CAPAIAN

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial harus 100% (seratus persen).

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM sosial tahun 2022. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya sesuai dengan rencana target target (jumlah orang yang akan terlayani).

Tabel 3.F.1
Target dan Indikator Pencapaian SPM
Bidang Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	492	Desember 2022	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	492	Desember 2022	572.202.644
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.038	Desember 2022	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	1.038	Desember 2022	282.132.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	102	Desember 2022	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	102	Desember 2022	37.448.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelanda	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh	27	Desember 2022	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	27	Desember 2022	19.779.700

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	ngan dan pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti						
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	500	Desember 2022	Penyediaan Permakanaan	500	Desember 2022	245.000.000

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Sosial pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.F.2
Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
1. Program Rehabilitasi Sosial			
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti			
	Penyediaan Alat Bantu		450.000.000
	Penyediaan Permakanaan		48.177.644
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan		74.025.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
		Pengemis dan Masyarakat	
	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti		
		Penyediaan Permakanan	215.040.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	67.092.000
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
		Penyediaan Permakanan	20.600.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	16.848.000
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
		Penyediaan Permakanan	5.327.700
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	14.452.000
	2. Program Penanganan Bencana		
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana		
		Penyediaan Makanan	245.000.000

D. DUKUNGAN PERSONIL

Guna tercapainya pelayanan sosial dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya sosial, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	
		L	P
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial	8	7

2.	TKSK	10	6
3.	PKH	64	82
4.	Tagana	25	7
J U M L A H		209	

E. HASIL CAPAIAN

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Sosial tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.F.3
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Targ et	Realis asi	Capai an (%)	Alokasi	Realisasi	Capa ian (%)
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	492	492	100,00	572.202.644	559.328.000	97.75
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	1.038	1.038	100,00	282.132.000	276.489.300	98.00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	102	102	100,00	37.448.000	36.571.700	97.66
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandanga n dan pengemis di luar panti	27	27	100,00	19.779.700	19.285.200	97.50

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Targ et	Realis asi	Capai an (%)	Alokasi	Realisasi	Capa ian (%)
5	Perlindunga n dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	500	450	90,00	245.000.000	236.499.777	96.53

Pencapaian SPM dihitung dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian penerima pelayanan dasar diperoleh dari target dan indikator kinerja, sedangkan capaian mutu pelayanan dasar diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Adapun perhitungan Capaian Indeks IP SPM diuraikan pada Tabel 3.4 dan 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.F.4
Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2022

1. Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yg harus dilayani (Orang)	Jumlah yg terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	492	492	100,00	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	1.038	1.038	100,00	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	102	102	100,00	

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	27	27	100,00	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	500	450	90,00	

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti			100,00	20,00
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas				
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	100	100	100,00	20,00
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Sandang				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas				
	Penyediaan Asrama				

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Alat bantu	150	150	100,00	20,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	10	10	100,00	20,00
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk				
	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga				
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
2	Rehabilitasi Sosial			100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Dasar anak terlantar di luar panti				
	Pengasuhan				
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak				
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	650	650	100,00	20,00
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Sandang				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Perbekalan				

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Kesehatan didalam Panti				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	15	15	100,00	20,00
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				
	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak				
	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga				
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100,00			20,00
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia				
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	50	50	100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Sandang				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	160	160	100,00	20,00
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Alat bantu				
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial				
	Pemberian				

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk				
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				
	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga				
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
	Pemulasaraan				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			100,00	20,00
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis				
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis				
	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk	50	50	100,00	20,00

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Sandang				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis				
	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	20	20	100,00	20,00
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari				
	Pemberian				

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	Bimbingan Keterampilan Dasar				
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
	Pemulangan ke Daerah Asal				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi			100,00	20,00
	Penyediaan Permakanan	500	500	100,00	20,00
	Penyediaan Sandang				
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi				
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi				
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah				

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
	tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi				

Tabel 3.F.5
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM
Bidang SosialTahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100,00	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	100,00	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100,00	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100,00	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	90,00	Tuntas Utama
	IP SPM Bidang Sosial	98,00%	Tuntas Utama

Dalam perhitungan indeks capaian SPM (IP SPM) terdapat kategori nilai indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

- a. Nilai 100 dikategorikan Tuntas Paripurna
- b. Nilai 90-99 dikategorikan Tuntas Utama
- c. Nilai 80-89 dikategorikan Tuntas Madya

- d. Nilai 70-79 dikategorikan Tuntas Pratama
- e. Nilai 60-69 dikategorikan Tuntas Muda
- f. Nilai < 60 dikategorikan BelumTuntas

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang sosial tahun 2022 rata-rata sebesar 98.00% dengan kategori Tuntas Utama. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Terdapat 5 (lima) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, yang mencapai target 100% ada 4 (empat) indikator, yaitu pelayanan sosial pada disabilitas, pelayanan sosial pada anak terlantar, pelayanan sosial pada lansia, pelayanan sosial pada pengemis/gelandangan. Adapun yang mempunyai capaian kurang dari 100% ada 1 (satu) indikator yaitu pelayanan sosial pada Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

F. KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Sosial, antara lain :

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Internal	Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS dapat tertangani dikarenakan jumlahnya yang sangat besar serta beragamnya jenis PMKS.	1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk penanganan PMKS lebih lanjut 2. Peningkatan kualitas PSKS yang ada agar pelayanan dan penanganan terhadap PMKS lebih optimal
2		Keterbatasan anggaran/pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu	Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3		Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat	Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan

		juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS
1	Eksternal	1. Bantuan alat bantu untuk disabilitas yang belum bisa mencukupi semua kategori disabilitas 2. Bantuan pelatihan ketrampilan untuk menunjang usaha disabilitas yang masih kurang	Dilakukannya proses pendataan, identifikasi dan pembuatan database penyandang disabilitas untuk perencanaan mencukupi bantuan alat bantu dan menunjang pemberian bantuan pelatihan sesuai kebutuhan kategori disabilitas
2		Data anak terlantar dalam bantuan sosial (kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut	Dilakukannya proses verifikasi dan validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan
3		1. Data lanjut usia dalam bantuan sosial (kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut 2. Masih terdapat lanjut usia terlantar yang membutuhkan bantuan pelayanan Panti atau Balai Rehabilitasi yang belum terjangkau	1. Dilakukannya proses verifikasi dan validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan 2. Melakukan koordsinasi dengan PSM dan Panti atau Balai Rehabilitasi untuk dapat melakukan proses penjangkauan tersebut

4		1. Masih adanya permasalahan dalam akses Panti atau Balai Rehabilitasi yang dapat menerima PM (gelandangan dan pengemis) setiap waktu tanpa pengecualian 2. Belum tersedianya bantuan sosial atau fisik yang dapat menunjang pengentasan tuna sosial tersebut, hanya tersedia fasilitas untuk membantu proses reunifikasi.	1. Adanya keterbukaan dan kemudahan untuk menerima PM (gelandangan dan pengemis) 2. Dilakukannya proses pendampingan assessment secara berkala dan tepat sasaran yang kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pemberian bantuan sosial yang mampu untuk pengentasan tuna sosial tersebut
5		1. Terbatasnya ketrampilan kesiap siagaan bencana bagi SDM kebencanaan/relawan. 2. Keterbatasan sarpras pendukung kebencanaan.	1. Perlu adanya peningkatan pelatihan SDM kebencanaan. 2. Perlu adanya perawatan dalam pendukung kebencanaan

BAB V

PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yaitu kewajiban melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa penyampaian tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/9136/OTDA Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022. Buku ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahan yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jepara adalah tanggungjawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Buku yang disusun ini memuat tentang Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, LPPD juga memuat tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan tugas pembantuan kepada desa.

Selain itu, buku LPPD ini juga memuat tentang Capaian Kinerja Makro, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang memuat antara lain ; target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan daerah , analisis efisien penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Harapan kami, LPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Jepara, Maret 2023

Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA., ATD., S.H., M.M

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
LPPD TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD. ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	34.133 ----- x 100 % 39.198	87,08
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar. ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	123.238 ----- x 100 % 123.956	99.42
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan	%	52.873 ----- x 100 % 60.401	87,54
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	%	2.225 ----- x 100 % 4.671	47,63

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			pendidikan kesetaraan.	menengah pada kabupaten/Kota yang bersangkutann			
2.	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten ----- x 100 % Jumlah Penduduk kabupaten/Kota.	%	1.114 ----- x 100 1.236.674	0,09
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS kabupaten/Kota	%	5 ----- x 100 6	83,33
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/Kota	%	19.820 ----- x 100 20.841	95,1
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/Kota	%	18.635 ----- x 100 18.635	100
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/Kota.	%	18.519 ----- x 100 18.637	99,37
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/Kota	%	91.862 ----- x 100 91.862	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/Kota	%	37.488 ----- x 100 40.610	92,31
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/Kota	%	741.567 ----- x 100 799.047	92,81
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/Kota	%	123.152 ----- x 100 128.564	95,79
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/Kota	%	331.204 ----- x 100 361.282	91,67
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/Kota	%	30.570 ----- x 100 30.570	100
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/Kota	%	3.000 ----- x 100 3.031	98,98

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{5.030}{5.030} \times 100$	100
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	$\frac{26.022}{26.022} \times 100$	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten /Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten /Kota (ha)}} \times 100 \%$	%	$\frac{97}{97} \times 100$	100
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten (WS)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten / Kota (ha)}} \times 100 \%$	%	$\frac{1}{1} \times 100$	Tdi
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	Luas irigasi kewenangan kabupaten / Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun	%	11.267	39,89

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			yang dilayani oleh jaringan irigasi	(ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/Kota		----- x 100 % 28.247	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100 % Jumlah Proyeksi total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.	%	384.405 ----- x 100 % 402.129	95,59
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten	%	299.671 ----- x 100 % 402.129	74,52
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota.	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	%	918 ----- x 100 % 1.333	68,87
		25	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	%	772.223	88,54

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		----- x 100 % 872.142	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	%	73 ----- x 100 % 650	11,23
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.	jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100 % jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.	%	1.154 ----- x 100 1.154	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022	%	34 ----- x 100% 25	136
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi	%	1 ----- x 100% 1	Tdi

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				kriteria penerima pelayanan			
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani.	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100 \%$	%	$\frac{71,18}{138,91} \times 100\%$	51,24
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{46.547}{305.625} \times 100\%$	15,23
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{1.178}{305.625} \times 100\%$	0,38
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang di tangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	%	$\frac{10}{10} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi.}} \times 100\%$	%	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	$\frac{1.235.018}{1.235.018} \times 100$	100
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.}} \times 100\%$	%	$\frac{320}{71.473} \times 100$	0,45
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.}} \times 100\%$	%	$\frac{3.130}{3.130} \times 100$	100
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	$\frac{80}{101} \times 100$	79,21

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/Kota			
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah total waktutanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah seluruh kejadian kebakaran .	Menit	$\frac{1.226}{101} \times 100$	12,13
6.	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	$\frac{1.659}{2.483} \times 100\%$	66,81
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten /Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota.	%	$\frac{450}{450} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
7.	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	%	11 ----- x 100% 334	3,29
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	907 ----- x 100% 128.510	0,71
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja	%	23.249.852,94 ----- x 100% 128.510	18091,86
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100 % Jumlah Perusahaan	%	226 -----x 100% 399	56,64
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---- ----- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	%	9.174 X 100% 17.094	53,67

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional APBD}} \times 100 \%$	%	$\frac{37.116.120.000}{895.054.639.966} \times 100 \%$	4,147
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100 \%$	%	$\frac{15}{340.615} \times 100\%$	0,004
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan.}} \times 100 \%$	%	$\frac{13}{614.449} \times 100\%$	2,116
9.	Pangan.	50	Persentase ketersediaan cadangan pangan.	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten / Kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota.}} \times 100 \%$	%	$\frac{52 \text{ ton}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$	52
10.	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100 \%$	%	$\frac{1.304.257 \text{ M}^2}{1.304.257 \text{ M}^2} \times 100\%$	100
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{}} \times 100 \%$	%	$\frac{1.673 \text{ m}^2}{1.673 \text{ m}^2} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			umum	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.			
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{1.304.257 \text{ M2}}{1.304.257 \text{ M2}} \times 100\%$	100
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente.	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform.}} \times 100 \%$	%	$\frac{1}{1} \times 100\%$	tdi
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah}}{\text{Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{1}{1} \times 100\%$	tdi
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	%	$\frac{1}{1} \times 100\%$	Tdi
11.	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)	%	IKLH = 63,70 IKA = 45,45 IKU = 87,80	IKLH = 63,70 IKA = 45,45 IKU = 87,80

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%).		IKTL = 50,48	IKTL = 50,48
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{60.798,05}{150.516,42} \times 100\%$	40,39
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan Pemeriksaan.}} \times 100 \%$	%	$\frac{17}{17} \times 100\%$	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	%	$\frac{916.313}{935.924} \times 100\%$	97,90
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun.}} \times 100 \%$	%	$\frac{109.649}{330.720} \times 100\%$	33,15
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran.	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran	%	$\frac{321.418}{\text{-----}} \times 100\%$	94,36

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100 % Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		340.615	
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100 % Jumlah OPD.	%	12 ----- x 100% 25	48 (Kecamatan tidak termasuk)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal.	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	%	Surat Keterangan	0
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri.	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n).	%	65 ----- x 100% 181	35,91
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total).	$5\sum ASFR$.		(Nilai Kelahiran Per Kelompok Umur)	2,05
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur.		134.294 -----x100 201.620	66,607

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$		$\frac{36.083}{201.620} \times 100\%$	17,897
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten/kota.	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).	Trayek / Lintas	$\frac{0,948 + 0,64}{2}$	0.794 trayek/ lintas
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota.	V/C ratio di jalan kabupaten/Kota	LoS	0,21	0,21
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{28}{42} \times 100\%$	66,67
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	%	$\frac{15}{23} \times 100\%$	66,22

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100% Jumlah penduduk	%	856.549 ----- x 100% 1.236.674	69,26
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi.	%	170 ----- x 100% 673	25,26
		75	Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	3.219 ----- x 100% 76.800	4,19
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2022 - jumlah investasi tahun 2021) di kabupaten. ----- x 100% Jumlah investasi tahun 2021 di kabupaten).	%	9.585.327.105.644 – 7.304.118.903.839 ----- x 100% 7.304.118.903.839	31,23
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ----- x 100.000 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten.	%	60.743 ----- X 100% 283.244	21,45

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	%	16.675 ----- x 100% 283.244	5,89
		79	Peningkatan prestasi olahraga.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		44	44 medali
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	26 ----- x 100% 26	100
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	26 ----- x 100% 26	100
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota.	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	%	475 ----- x 100% 645	73,64
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata.	%	37 ----- x 100% 40	92,5
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat.		TGM = (FM + DM + JBB+FAI+DAI)/5	62,19 Sedang

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						FM : Frekuensi Membaca DM : Durasi Membaca JBB : Jumlah Bahan Bacaan FAI : Frekuensi Akses Internet DAI : Durasi Akses Internet TGM = $\frac{62,97 + 52,07 + 50,35 + 72 + 74}{5}$ = 62.19	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) .		$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) + Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)+ Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) + Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)+ Perpustakaan Ber-SNP	77,12 Baik

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						(UPLM5)+ Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) + Jumlah Pemustaka (UPLM7) x 100 / 7 5.398 x 100 / 7	
24	Kearsipan.	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.	$T = (a + i + s + j)/4.$	%	$T = \frac{62\% + 77\% + 100\% + 0,13198\%}{4}$ $= 60\%$	60
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	%	$T = \frac{100\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\% + 0\%}{6}$ $= 66,67\%$	66,67
Urusan Pilihan.							

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).	$\frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100$	%	$\frac{58.197.453}{36.189,85} \times 100\%$	160,81 %
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2022} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2021})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2021}} \times 100\%$	%	$\frac{5.260}{50} \times 100\%$	10.520
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2022} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2021})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2021}} \times 100\%$	%	$\frac{1.497.799}{289.409} \times 100\%$	517,54
		91	Tingkat hunian akomodasi.	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	%	$\frac{149.102}{399.310} \times 100\%$	37,34
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)}}{\text{Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)}} \times 100\%$	%	$\frac{1.502.773}{35.001.075} \times 100\%$	4,29

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	$\frac{\text{Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2022}}{\text{Realisasi PAD Tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{2.547.896.250}{427.512.120.021} \times 100\%$	0,60
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun.	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)}}{\text{Luas Panen (ha)}} \times 100\%$	Ton/ha	$\frac{626.027,8 \text{ ton}}{66.801,3 \text{ Ha}} \times 100\%$	9,37 ton/ha
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (2022) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2021)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2021)}} \times 100\%$	%	$\frac{27.166-26.411}{26.411} \times 100\%$	2,86
28	Kehutanan						Tidak Ada
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kota.	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin.}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi.}} \times 100\%$		$\frac{1}{1} \times 100\%$	Tdi
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan.}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten.}} \times 100\%$	%	$\frac{91}{91} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			Swalayan).				
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk.	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)}} \times 100\%$	%	$\frac{30.055.871}{31.157.485} \times 100\%$	96,46
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku)	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{3.891}{3.891} \times 100\%$	100
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2022} - \text{Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2021})}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021}} \times 100\%$	%	$\frac{13.136 - 8.449}{13.136} \times 100\%$	55,474
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten).	$\frac{\text{Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan.}}{\text{Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten.}} \times 100 \%$	%	a. Tersusunnya naskah akademik b. Tersusunnya draft raperda RPIK (20%) = (100/2)%	50
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan.}} \times 100\%$	%	$\frac{2.804}{2.804} \times 100$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			(IUI) bagi industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan.}} \times 100\%$	%	0	0
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	0	0
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Keterkinian informasi industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0 – 6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7 – 12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	$(1 + 2) = (50 + (10\% + 10\% + 10\% + 10 + 10))$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				2. Kelengkapan informasi industri meliputi - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 +2)			
32	Transmigrasi				kk	Calon transmigrasi sudah diberangkatkan ke lokasi penempatan di salulisu prov. Sulawesi barat	1
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi) ----- x 100% Jumlah APBD (realisasi)	%	247.265.568.906 ----- x 100% 2.596.127.848.489	9,52
		2	Rasio PAD.	Jumlah PAD ----- x 100% Jumlah PDRB Non Migas	%	427.583.098.963 ----- x 100% 2.326.937.014.364	18,38
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	level 3	level 3

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	Level 3	Level 3
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi) ----- x 100% Jumlah belanja APBD (realisasi)	%	1.987.613.850.834 ----- x 100% 2.429.312.277.230	81,82%
		6	Opini Laporan Keuangan.	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir).	10 kali.	Bukti piagam WTP (tahun 2012 – 2021)	WTP.
34	PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	%	0/148 x 100%	0
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif ----- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode Kompetitif	%	5.401 ----- x 100% 3.217	167,889
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ----- x 100% total belanja operasi dan modal	%	542.751.133.979,10 ----- X 100% 765.031.551.823,00.	70,95

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Jumlah PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKM dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKM dan Koperasi tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri umkm dan koperasi.	%	60.632.000.000 ----- X 100% 337.613.000.000,00.	17,96
35	KEPEGAWAIAN	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan PT Keatas ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah .	%	1.771 ----- x 100% 970	182,58
		12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	Jumlah PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100% Jumlah seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	372 ----- 100% 2.741	13,57
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	%	132 ----- x 100% 372	35,48
36	MANAJEMEN KEUANGAN	14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan).	%	2.429.312.277.230 ----- x 100% 2.605.545.682.020.	93,24

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ----- X 100% Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	%	427.583.098.963 ----- x 100% 490.005.622.000	87,26
		16	Assets management.	Jumlah Asset Manajemen. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).		7.596.590.347.177 Ya Ya Ya Ya Ya	
		17	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ----- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	%	141.815.571.259 ----- x 100% 2.309.409.464.300	6,14
37	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK).	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. ----- X 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	2.621.977.599.331 ----- x 100% 2.429.836.102.058	92,67
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda. ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci.	%	7 ----- x 100% 7	100

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT
LPPD TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan						
			Pendidikan PAUD				
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta).		Unit	$\frac{524.}{982} \times 100\%$	53,31
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.		Orang	$\frac{45.113}{45.113} \times 100\%$	100
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa).		Orang	$\frac{332}{45.113} \times 100\%$	0,74
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta).		Orang	2.949	2.949
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta).		Orang	3.179	3.179

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.		Orang	$\frac{1.830}{3.179} \times 100\%$	57,57
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	$\frac{679}{873} \times 100\%$	77,78
		Pendidikan Dasar					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	$\frac{689}{698} \times 100\%$	98,71
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah.		Orang	$\frac{77.099}{77.099} \times 100\%$	100
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		orang	$\frac{26.868}{26.868} \times 100\%$	100
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.		Orang	$\frac{30.692}{77.099} \times 100\%$	39,81

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.		Orang.	$\frac{13.181}{26.868} \times 100$	49,06
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).		Orang	5.169	5.169
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.643	2.643
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	4.835	4.835
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.303	2.303
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	2.396	2.396
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	594	594
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	781	781
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	431	431
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat		Orang	4.576	4.576

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1.533	1.533
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	$\frac{373}{409} \times 100$	91,20
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	$\frac{55}{91} \times 100\%$	50,05
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	$\frac{607}{801} \times 100\%$	75,78
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	$\frac{227}{313} \times 100\%$	72,52
		Pendidikan Kesetaraan					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PKBM terakreditasi Dibagi Jumlah PKBM pada kabupaten yang bersangkutan x 100 %	%	$\frac{10}{16} \times 100\%$	62,50

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	Jumlah siswa Paket A+B yg mendapatkan Perlengkapan Dasar Dibagi Jumlah Siswa Paket pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	%	$\frac{1.621}{1.621} \times 100\%$	100
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa paket A+B yg bebas biaya pendidikan Dibagi Jumlah Siswa paket pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	%	$\frac{1.295}{1.621} \times 100\%$	79,89
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	151	151
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	82	82
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	34	34
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	1	1
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	1	1

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
2	Kesehatan						
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai Standar.		Unit	6	6 unit RS
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	6	6 unit RS
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			4986 PAKET: 1.500 Leaflet Gizi Ibu Hamil 136 Form OVM 3.350 Susu Ibu Hamil KEK buku KIA	4986 PAKET: 1.500 Leaflet Gizi Ibu Hamil 136 Form OVM 3.350 Susu Ibu Hamil KEK buku KIA
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Antenatal		Orang	763 ORANG: 204 dokter 559 bidan	763 ORANG: 204 dokter 559 bidan
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (rekap sarana operasional dan contoh			1620 PAKET:	1620 PAKET:

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			foto)			1.500 Leaflet Ibu Menyusui 120 paket PMT Ibu Nifas	1.500 Leaflet Ibu Menyusui 120 paket PMT Ibu Nifas
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat)		Orang	763 ORANG: 204 dokter 559 bidan	763 ORANG: 204 dokter 559 bidan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			114 Form OVP	114 Form OVP
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	763 ORANG: 204 dokter 559 bidan	763 ORANG: 204 dokter 559 bidan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			10.863 PAKET: 1.133 Posyandu 9.730 sachet formula 100	10.863 PAKET: 1.133 Posyandu 9.730 sachet formula 100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	6515 PAKET: 204 dokter 559 bidan 5.752 kader posyandu	6515 PAKET: 204 dokter 559 bidan 5.752 kader posyandu
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.			22 Paket Alat Pemeriksaan Hb Remaja Putri	22 Paket Alat Pemeriksaan Hb Remaja Putri
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	1.101 ORANG: 755 Guru UKS SD/MI, 210 Guru UKS SMP/MTs, 136 Guru UKS SMA/SMK/MA	1.101 ORANG: 755 Guru UKS SD/MI, 210 Guru UKS SMP/MTs, 136 Guru UKS SMA/SMK/MA
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			174 Posbindu Kit	174 Posbindu Kit
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	1.022 ORANG: 22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader	1.022 ORANG: 22 Programmer PTM

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Posbindu	Puskesmas, 1000 kader Posbindu
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			549 PAKET: 313 Posyandu Lansia 74 Lansia Kit 22 Puskesmas Santun Lansia 140 Buku Panduan Caregiver bagi Lansia	549 PAKET: 313 Posyandu Lansia 74 Lansia Kit 22 Puskesmas Santun Lansia 140 Buku Panduan Caregiver bagi Lansia
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	44 ORANG 22 Dokter Puskesmas 22 Programmer Lansia (Perawat/Bidan)	44 ORANG 22 Dokter Puskesmas 22 Programmer Lansia (Perawat/Bidan)
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			174 Posbindu Kit	174 Posbindu Kit

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	1.022 ORANG: 22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader Posbindu	1.022 ORANG: 22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader Posbindu
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			10.254 PAKET 174 Posbindu Kit 10.080 dus tes Gula Darah	10.254 PAKET 174 Posbindu Kit 10.080 dus tes Gula Darah
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	1.022 ORANG: 22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader Posbindu	1.022 ORANG: 22 Programmer PTM Puskesmas, 1000 kader Posbindu
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			29 Buku Pedoman	29 Buku Pedoman
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	3 tenaga kesehatan (2 perawat terlatih, 1	3 tenaga kesehatan

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						dokter terlatih)	(2 perawat terlatih, 1 dokter terlatih)
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			14.057 PAKET FDC Kat I = 350 paket Kombipak = 24 paket FDC Anak = 150 paket Pot sputum = 8.000 buah Kaca slide = 54 buah Reagen Zn = 135 paket Catridge TCM = 5.344 tes.	14.057 PAKET FDC Kat I = 350 paket Kombipak = 24 paket FDC Anak = 150 paket Pot sputum = 8.000 buah Kaca slide = 54 buah Reagen Zn = 135 paket Catridge TCM = 5.344 tes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	70 ORANG 25 dokter TB terlatih 20 perawat TB terlatih 25 laborat TB terlatih	70 ORANG 25 dokter TB terlatih 20 perawat TB terlatih 25 laborat TB terlatih

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			25.475 PAKET 24.325 rapid combo HIV sipilis 1.150 rapid 2 HIV	25.475 PAKET 24.325 rapid combo HIV sipilis 1.150 rapid 2 HIV
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	11 ORANG: 2 Dokter 2 Perawat 2 Rekam Medis 2 Apoteker 2 ATLM 1 Bidan .	11 ORANG: 2 Dokter 2 Perawat 2 Rekam Medis 2 Apoteker 2 ATLM 1 Bidan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.						
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab (ha).		Ha	97 Ha	97
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m).		M	13.050 M	13.050
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)		Ha	700 Ha	700

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab (m)		M	2.040 M	2.040
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab		Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab		Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab		Jumlah	1. Bangunan perkuatan tebing : 7.400 meter 2. Tanggul	4

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						sungai : 5040 meter 3. Pintu air : 9 Unit 4. Pompa air : 3 unit	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	%	$\frac{4.238,4}{10.596} \times 100\%$	40
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi Sekunder dlm kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)}} \times 100\%$	%	$\frac{568.992,12}{1.249.933} \times 100\%$	45,52
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik.	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi Tersier dlm kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi Tersier (m)}} \times 100\%$	%	$\frac{4.143}{13.810} \times 100\%$	30
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten					
		1	Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab		Ada/Tidak	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun	ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040	
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten		Ada/Tidak	Dokumen Jakstrada berlaku Tahun 2020 – 2024	ada
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaraan SPAM		Ada/tidak	1 PDAM	ada
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	8 Desa	8
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	{Embung Kalimati (Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040)}	1
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	299.371 Rumah	299.371
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	300 Rumah	300
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T.		Rumah	299.671 Rumah	299.671
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	193 Rumah	193
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	193 Rumah	193
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic.		Rumah	193 Rumah	193
		7	Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----- x 100 % Jumlah Rumah di wil pengembang SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	%	299.371 ----- x 100 % 402.129 ,	74,45

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\text{Jumlah lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100$	%	193 ----- x 100 % 402.129	0,048
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T}}{\text{rumah di wilayah pengembangan SPALD T}} \times 100\%$	%	300 ----- x 100 % 402.129	0,075
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	%	299.371 ----- x 100 % 402.129	74,45
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	%	193 ----- x 100 % 402.129	0,048

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	14,25 -----X100 85,792	16,61
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sambuungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\text{jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	%	300 -----X100 (6x50)	100
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	%	193 -----X100 299.371	0,064
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten					
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah	%	11 ----- x 100 %	25,58

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku -----X100 Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)		43	
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	918 Izin	918
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011	ada
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 640/320 Tahun 2021	ada
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Jumlah	Keputusan Bupati Jepara Nomor 430/410 Tahun 2018	36
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten		Jumlah	Bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Jepara	163

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Perda 14/2016 Perangkat Daerah dan Perbup 1/2018 UPTD	
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten		Jumlah	Bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Jepara Perda 14/2016 Perangkat Daerah dan Perbup 1/2018 UPTD	163
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/dirawat		Jumlah	Bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Jepara Perda 14/2016 Perangkat Daerah dan Perbup 1/2018 UPTD	163
		Tingkat kemantapan jalan					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten		Km	Keputusan Bupati Jepara No 620/405 Tahun 2016 tentang penetapan nomor dan nama ruas jalan Kab. Jepara	872.142
		2	Panjang jalan yang dibangun		M	15.818,3	15.818,3

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	16,0	16,0
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		M	31.310,4	31.310,4
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	16,0	16,0
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi		M	15.492,1	15.492,1
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	23,6	23,6
		8	Panjang jalan yang dipelihara		M	31.172,3	31.172,3
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	19,8	19,8
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kab		Kali	Tidak ada	0
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab		Orang	73	73
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten		Orang	27	27
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir.		Ada/Tidak	SK Kepala Dinas DPUPR Nomor 061 Tahun 2022	ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBD kabupaten		Ada/Tidak	1154 paket	ada
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	13 paket	ada
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	23 paket	ada
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	1190 paket	ada
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten		Ada/Tidak	0	Tidak ada
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	0	Tidak ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	0	Tidak ada
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/Tidak	46	ada
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Ada/Tidak	0	Tidak ada
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	0	Tidak ada
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	0	Tidak ada
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	0	ada
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Ada/Tidak	0	Tidak ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten		Jumlah	570	570
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		Jumlah	0	0
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten		Jumlah	277	277
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Jumlah	0	0
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Jumlah	0	0
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya.		Jumlah	0	0
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Jumlah	0	0
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya.		Jumlah	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.						
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		unit	178	178
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	34	34
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.		Orang	34	34
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	34	34
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		unit	34	34
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		unit	0	0
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban Bencana		Unit	0	0
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang Terfasilitasi		orang	34	34
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		ha	0	0
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	0	0
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	0	0
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	0	0
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	0	0
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	0	0
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	SK Kumuh Bupati Jepara No 055/362 Tahun 2021	67,73
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	Dok. Data Unit RTLH Tahun 2022	14.646
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	SK Kumuh Bupati Jepara No 055/362 Tahun 2021	84,07
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	305.625	305.625
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	14.646	14.646
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	46.547	46.547
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun)		Rumah	0	0
		5	Rasio rumah dan KK.	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	%	$\frac{410.013}{305.625} \times 100\%$	134
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			71	71
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	12	12
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	1.178	1.178
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan		Rumah	1.178	1.178
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	1.178	1.178
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	12	12
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	0	0
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	12	12
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi		Pengembang	12	12

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.		Pengembang	12	12
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.						
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		Jumlah	10	10
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	2.170	2.170
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/Perkada	8	8
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	3	3
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		SOP	5	5
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Sarpras	Ada	Ada
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen KRB	%	Tidak Melaksanakan	Tdi

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				yang lengkap dan sudah disahkan			
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	1,235,018 ----- x 100% 1,235,018	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen RPB yg lengkap dan sudah disahkan	%	Tidak melaksanakan	Tdi
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah	%	Tidak melaksanakan	Tdi
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah aparatur dengan warga	%	320 ----- x 100% 71.473	0,45

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				negara di kawasan rawan			
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	320 ----- x 100% 71.473	0,45
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	1.235.018 ----- x 100% 1.235.018	100
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	1.235.018 ----- x 100% 1.235.018	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x 100%	%	Tidak Ada Penetapan status KLB	Tdi

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah seluruh penetapan status KLB			
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{869}{869} \times 100\%$	100
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{3.160}{3.160} \times 100\%$	100
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di		Layanan	484	484

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			kabupaten				
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	3	3
		3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan		orang	26	26
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	0	0
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	28	28
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		orang	28	28
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.		Orang	0	0
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam Kebakaran.		kegiatan	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
6	SOSIAL.						
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		jenis	2	2 jenis (offline & online)
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Anak	2.483	2.483
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk		Unit	1	1
		4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau		orang	621	621
		5	Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Unit	2	2
		6	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	343	343
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		shelter	1	1
		8	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang		Orang	28	28

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	266	266
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		paket	12	12
		11	jumlah paket perbekalan yang tersedia		paket	0	0
		12	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		orang	28	28
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter.		orang	0	0
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan		Orang	50	50
		15	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/ pusat kesejahteraan sosial		Orang	45	45
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.		paket	5	5

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		orang	0	0
		18	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		Orang	0	0
		19	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	7	7
		20	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	7	7
		21	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk		Orang	20	20
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan		Orang	450	450
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang		Orang	57	57
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki			0	0
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan		Paket	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	0	0
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang Tersedia		Orang	32	32
7	TENAGA KERJA						
		Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab		Ada/Tidak	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Tahun 2021-2026	Ada
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	Data satkernas dan proyeksi RTKD	97,33
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Jumlah	2	2
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun 2022 ----- x 100% keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster	%	14 ----- x 100% 9	155,56

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pada tahun 2022			
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2022 ----- x 100% jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2022	%	5 ----- x 100% 9	56
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	Jumlah instruktur tahun 2022 ----- x 100% jumlah peserta pelatihan pada tahun 2022	%	9 ----- x 100% 211	4,27
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2022 ----- x 100% jumlah seluruh LPK pd th 2022	%	8 ----- x 100% 31	25,81
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022 ----- x 100% jumlah LPK yang terdata pada tahun 2022	%	0 ----- x 100% 31	0
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	731 orang	731
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih	%	211 ----- x 100% 211	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pada tahun 2022			
		8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022}}{\text{jumlah lulusan pada tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{45}{79} \times 100\%$	56,96
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{34}{34} \times 100\%$	100
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	%	$\frac{290}{290} \times 100\%$	100
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		orang	80 orang	80
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2022}}{\text{-----}} \times 100\%$	%	$\frac{226}{399} \times 100\%$	56,64

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				jumlah perusahaan pada th 2022			
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan Modal + pertumbuhan tenaga kerja).	%	4,63	4,63
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	%	156 ----- X 100% 399	39,10
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 ----- x 100% Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh	%	10 ----- X 100% 15	66,67
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan		SP/SB	39	39
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan	%	69 ----- x 100%	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				skala Upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		69	
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	%	2.058 ----- x 100% 2.078	99
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun 2022	%	83 ----- x 100% 399	20,80
		7	Jumlah mogok kerja		jumlah	0	0
		8	Jumlah penutupan perusahaan		jumlah	0	0
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		jumlah	66	66
		10	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		jumlah	0	0
		11	Jumlah perselisihan PHK		jumlah	58	58
		12	Jumlah Pekerja yang ter-PHK		Orang	238	238

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		jumlah	88	88
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang Diberdayakan		Ada/tidak	ada	ada
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	%	$\frac{121}{124} \times 100\%$	97,58
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten					
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab		jumlah	9.476	9.476
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		orang	17.094	17.094
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		jumlah	43	43
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam Kab		orang	0	0
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	2	2
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		jumlah	0	0
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota.		jumlah	3.153	3.153

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).		Orang	9.174	9.174
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$	%	$\frac{80}{80} \times 100\%$	100
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.		Orang	290	290
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan.	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	%	$\frac{290}{290} \times 100\%$	100
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	%	$\frac{20}{20} \times 100\%$	100
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong}} \times 100\%$	%	Suket	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				PMI/TKI.			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.						
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG		Lembaga	35 OPD	35 OPD
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten		Program/kegiatan	25 opd / 34 program / 41 kegiatan	25 opd / 34 program / 41 kegiatan
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	3 media massa	3 media massa
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.		lembaga	64 Lembaga	64 Lembaga
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani.	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten		15 ----- x 100% 15	100%
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat Pelatihan		lembaga	6 (2 Puskesmas, 2 Sekolah, 2 Kecamatan)	6 (2 Puskesmas, 2 Sekolah, 2 Kecamatan)

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD kab)		Lembaga	P2TP2A, Forum Anak Jepara, LGNOTA	P2TP2A, Forum Anak Jepara, LGNOTA
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab yang mendapatkan pelatihan		organisasi	0	Tidak ada kegiatan
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kab yang sudah dilatih		Orang	0	Tidak ada kegiatan
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		lembaga	0	Tidak ada kegiatan
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten		Lembaga	0	Tidak ada kegiatan
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/ program	1 perda (No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda no. 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak) Dan Perbup Nomor 42 Tahun 2017 tentang	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						SOP Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan (PPAP)	
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah Terstandardisasi		Lembaga	1 Lembaga (P2TP2A)	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	%	$\frac{13}{13} \times 100\%$	100
9	Pangan.						
			Persentase Ketersediaan Pangan				
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada	Foto gudang dan cadangan pangan pemerintah	Ada
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Foto penyerahan simbolis beras cadangan pangan pemerintah (CPP) pada daerah rawan pangan	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	Surat keterangan	Tidak ada
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	DPA Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	ada
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Foto cover buku Peta FSVA 2022	ada
		6	Tertanganinya kerawanan pangan.	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	Foto BAST dan simbolis penyerahan bantuan daerah rawan pangan	ada
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Foto BAST dan penyerahan simbolis beras cadangan pangan pada daerah rawan pangan	ada
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Foto kegiatan/ hasil pengawasan keamanan pangan segar	Ada
10	Pertanahan.						

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati / walikota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya). ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun.	%	109+0 ----- x 100% 109	100
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek.	Jumlah penerbitan sk penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absente ----- x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	%	Suket Bag. Pemerintahan Dan BPN Kab. Jepara.	0
		3	SK Bupati /Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absente.	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 100%	%	Suket Bag. Pemerintahan Dan BPN Kab. Jepara	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek.			
		4	Dokumen Izin membuka tanah.	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui} + \text{dokumen izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 Tahun}} \times 100\%$	%	Suket BPN Kab. Jepara	0
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 th}} \times 100\%$	%	$\frac{426}{432} \times 100\%$	98,61
11	Lingkungan Hidup						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten					
		1	Hasil Perhitungan kabupaten terhadap : a) Indeks Kualitas Air,(IKA)			a) IKA = 45,,45 b) IKU = 87,80	a) IKA = 45,,45 b) IKU = 87,80

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			c) IKTL = 50,48	c)IKTL = 50,48
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab.	- Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah thd volume timbunan sampah - Tersedianya iformasi terkait kapasitas TPA thd volume timbunan sampah - Tersedianya informasi terkait TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R.	Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten					
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ jumlah usulan permohonan yang teregestrasi.	%	27 ----- 100% 27	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab.	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	%	2 ----- x 100% 487	0,41
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kab.	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda ----- x 100% Jumlah usulan MHA	%	0 ----- x 100% 0	0
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada.	%	0 ----- x 100% 0	0
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	%	0 ----- x 100% 0	0
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di	Pengaduan masyarakat yang ditangani	%	20 ----- x 100%	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang Ditangani	----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi		20	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
			Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	%	8.836 ----- x 100% 8.844	99,91
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	%	2.153 ----- x 100% 2.252	95,60
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	%	9.233 ----- x 100% 9.233	100
		4	Penyajian data kependudukan.	Jumlah Penyajian data kependudukan skala kab dalam 1 tahun. ----- x 100%	%	2 ----- x 100% 2	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				2 semester			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		desa	8	8
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun Sebelumnya		desa	0	0
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		lembaga	5	5
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan Pemberdayaan		desa	184	184
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		TFR					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zvvXaxiqHIF-	1

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						6T1p_A6MmDIYxScjOgRd (Laporan akhir grand desain pembangunan kependudukan Kabupaten Jepara)	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	%	22,89	22,89
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	%	6,27	6,27
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE $\frac{\text{Jumlah sasaran masyarakat}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat}} \times 100\%$	%	$\frac{408.940}{1.236.674} \times 100\%$	33,07

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				program KKBPK advokasi dan KIE			
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	19 Stakeholder	19 Stakeholder
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	%	$\frac{48}{60} \times 100\%$	80
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	%	$\frac{134.294}{201.620} \times 100\%$	66,61
		3	Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		kelompok	69	kelompok
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	%	$\frac{9.876}{18.635} \times 100\%$	53

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	Jumlah desa yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kab ----- x 100% Jumlah desa dalam kab	%	1 -----x100% 195	0,0051
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI ----- x 100% Jumlah Keluarga PBI	%	82.494 -----x100% 452.978	18,21
15	Perhubungan.						
		Rasio konektivitas					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal	%	94 ----- x 100% 170	55,30

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				angkutan jalan			
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala.	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- x 100 % Jumlah kendaraan wajib uji	%	13.477 ----- x 100% 23.952	56,27
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	Jumlah penetapan tariff lintas penyeberangan ----- x 100% Juml lintas penyebgndlm kab	%	5 ---- x 100% 5	100
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kota.	%	31.592,24 ----- x 100% 43.420	73
16	Komunikasi dan Informatika.						
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100%		28 ----- x 100% 42	66.67

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah Perangkat Daerah.			
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$		$\frac{28}{42} \times 100\%$	66.67
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah		Ada/tidak	42	Ada
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi						

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Koinfo No.5/2015) ----- x 100% Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pd Pemda	%	$\frac{137}{137} \times 100\%$	100
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase perangkat daerah yang pengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah	%	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{313}{313} \times 100\%$	100
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{10}{313} \times 100\%$	3,19

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	%	$\frac{313}{313} \times 100\%$	100
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	%	$\frac{250}{250} \times 100\%$	100
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Jumlah perangkat daerah			
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	%	19 ----- x 100% 51	37,25
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	33 ----- x 100% 26	126,92 (Kecamatan Tidak Termasuk)
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo ----- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK	100%	3 ----- x 100% 62	4,84
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.		Ada/tidak	Ada	1. Perbup 50 tahun 2019 tentang master plan smart

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							city 2. Perbup no 42 th 2020 ttg tata kelola di lingkung an pembkab . 3. Perbup no 62 2020 ttg penyele nggaraan sistem pemerin tahan berbasi d elektron ik
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	$\frac{125}{140} \times 100\%$	89.29

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemda			
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- x 100% Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemkab	%	27.048 ----- x 100% 27.093	99.83
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP ----- x 100% Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik	%	76 ----- x 100% 76	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
17	Koperasi dan UKM						
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	%	77 ---- x 100% 528	14,58

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	1 ----- x 100% 9	11,11
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	311 ----- x 100% 673	46,21
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	%	102 ----- x 100% 277	36,82
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100%	%	100 ----- x 100% 673	14,86

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah koperasi yang ada			
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{215}{164.210} \times 100\%$	0,13
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{16}{673} \times 100\%$	2,38
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan.				Tidak diisi
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{673}{673} \times 100\%$	100
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{673} \times 100\%$	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	3 ----- x 100% 673	0,45
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	170 ----- x 100% 673	25,26
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab dalam 1 (satu) daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	3 ----- x 100% 673	0,45
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha					
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	%	3.219 ----- x 100% 76.800	4,19
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data	%	Suket	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				online (ODS) ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada			
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra.	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	193 ----- x 100% 76.800	0,25
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	%	192 ----- x 100% 76.608	0,25
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	%	605 ----- x 100% 76.195	0,79
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	3.590 ----- x 100% 76.800	4,67

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	684 ----- x 100% 76.800	0,89
18	Penanaman Modal						
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten		Ada/Tidak	1	Ada
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Ada/Tidak	11	Ada
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Jumlah laporan	18	18
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Jumlah kegiatan	2	2
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah kegiatan	0	0
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Jumlah kegiatan	12	12
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah konsultasi	752	752

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah perizinan dan non perizinan	14.658	14.658
		9	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah realisasi	9.585.327.105.644	9.585.327.105.644.603
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kab.		Jumlah aparatur	25	25
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN.		Jumlah perusahaan	1.071	1.071 perusahaan
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kab.		Ada	15	15
19	Pemuda dan Olahraga						
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	150	150
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	150	150
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan ----- X 100% Jumlah Penduduk Usia 16-30 Th	orang	625 ----- X 100% 283.244	0,22

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah Pengelola Organisasi ----- X 100% Jumlah Penduduk Usia 16-30 Th	orang	190 ----- X 100% 283.244	0,06
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih yang memiliki kompetensi ----- X 100% Jumlah Pelatih	orang	125 ----- X 100% 175	71,43
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		kali	10	10
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	1. Jepara Dalam Angka 2. PDRD 3. Statistik Sektor Kab Jepara	ada
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Ada/tidak	Tidak ada	0
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Ada/tidak	233	233
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Ada/tidak	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Ada/tidak	233	233
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	%	$\frac{115}{233} \times 100\%$	49,36
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	%	$\frac{19}{40} \times 100\%$	47,50
21	Persandian.						
		Tingkat keamanan informasi pemerintah					
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan .	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{8}{10} \times 100\%$	80
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	%	$\frac{292}{292} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	----- x 100% Jumlah SE yang ada.			
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- x 100% Jumlah SE yang ada	%	$\frac{292}{292} \times 100\%$	100
		4	Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan.	Jumlah titik diamankan ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS	%	$\frac{51}{51} \times 100\%$	100
22	Kebudayaan						
			Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	obyek	40	40
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	obyek	2	2
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan	Jumlah objek dimanfaatkan	Obyek	40	40

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			peningkatkan kesejahteraan masyarakat)				
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Tim	18	18
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	Obyek	5	5
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	obyek	3	3
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Cagar Budaya	0	0
		8	Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Cagar Budaya	0	0
		9	Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Cagar Budaya	1	1
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan +	koleksi	612	612

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				dikembangkan + dimanfaatkan)			
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	Orang	15.312	15.312
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		13	13
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Tim	1	1
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupatwn	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Tim	1	1
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Tim	5	5
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	orang	10	10
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Orang	11	11
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB +Museum)	Unit	38	38
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	13	13
23	Perpustakaan						
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai	%	317.855 ----- x 100%	25,70

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.236.674	
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	%	37.437 ----- x 100% 1.236.674	3,03
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di Wilayahnya ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	915 ----- x 100% 1.236.674	0,07
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	%	17 ----- x 100% 915	1,86
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	Perpustakaan Keliling : 527 kali	533

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Lomba dalam rangka Minat Baca dan Lomba Perpustakaan : 3 kali Sosialisasi Gemar Membaca : 3 kali Jumlah Total : 533 kali	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya.		Jumlah	Tidak ada	0
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Jumlah Naskah kuno	Tidak ada	0
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Jumlah Budaya etnis	214 eksemplar	214
24	Kearsipan						
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi jumlah seluruh arsip x 100%	%	$\frac{68.603}{110.809} \times 100$	61,91
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan	Jumlah arsip inaktif yang telah	%	138.133	76,71

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			daftar arsip	dibuatkan daftar arsip dibagi Jumlah seluruh arsip inaktif kali 100%		----- x 100 180.065	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu Balik dibagi Jumlah seluruh arsip Statis kali 100%	%	91.235 ----- x 100 91.235	100
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kota kali 100%	%	500 ----- x 100 382.109	0,13
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah	2.039	2.039
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten		Jumlah	64	64
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK.		jumlah	4.000	4.000
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian.		Jumlah	4	4
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.		Jumlah	0	0
URUSAN PILIHAN							
25	Kelautan dan Perikanan.						
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		RT	276	276 RT
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional.	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3	%	7 ---- x 100%	70%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				(tiga) standar operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten		10	
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan		Jumlah.	14 izin	5 izin
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan).		orang	540 orang	177 orang
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi.		ekor	1.578.213.000	1.578.213.000 ekor
26	Pariwisata						
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		24	24
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		158	158
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha	TUDP	625	625

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				di Kabupaten/Kota			
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang	5.310	5.310
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	16	16
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten.	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Orang	0	0
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industi	8	8
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	%	$\frac{19}{1.445} \times 100 \%$	1,31
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor Kepariwisata.	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	%	$\frac{440}{440} \times 100\%$	100
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	26	26

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
27	Pertanian						
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan.		Unit.	Cultivator : 32 Traktor roda 2 : 32 Traktor roda 4 : 3 Pompa air : 10 Appo : 1 Combine harvester : 2 Tower thresher: 2 RMU : 1 COMSEALER: 4 Dryer : 1 Kendaraan Roda 3 : 19 Dam parit : 6 paket Irigasi perpompaan: 2 paket (OPLAH) RJIT: 36 paket Irigasi air tanah dalam: 12 paket Irigasi air tanah dangkal: 1 paket (OPLAH) Longe Storage: 1 paket (OPLAH)	165

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Prasaran pertanian yang digunakan		Unit	58	58
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		dokumen	1	1
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun.}} \times 100\%$	%	$\frac{58}{58} \times 100\%$	100
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	%	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yg ditanggulangi}}{\text{Luas area yg terkena bencana}} \times 100$ Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular.	%	$\frac{45 \text{ ha}}{48 \text{ ha.}} \times 100\%$	93,8
28	Kehutanan (tidak menyelenggarakan urusan kehutanan)						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan. Tahura			Surat keterangan	Tdi

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			Surat keterangan	Tdi
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura.			Surat keterangan	Tdi
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			Surat keterangan	Tdi
29	ESDM (Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten)						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab./kota		Surat keterangan	Tdi
30	Perdagangan						
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan.	Jumlah izin took swalayan yang di terbitkan < 5 hari kerja Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	%	91 ----- x 100% 91	100
		2	Persentase penerbitan TDG.	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan	%	24 ----- x 100% 24	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				penerbitan TDG			
		3	persentase gudang yang tidak memiliki TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{24}{34} \times 100\%$	70,59
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			-	-
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	%	0	0
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri	%	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri			
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	%	0	0
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan	%	0 ----- x 100% 0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			tingkat daerah Kab.	distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah $\frac{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}}{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}} \times 100\%$			
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu.	Jumlah SPKA yang terbit ≤ 1 hari kerja 1 x 24 jam $\frac{\text{Jumlah permohonan penerbitan SPKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SPKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	%	SPKA sudah menjadi kewenangan pusat	0
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ $K = \text{Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya}$ $a = \text{Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target}$	%	$K = (a+b) \times 100$ $= (0,5 + 0) \times 100$ $= 50 \%$	50

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)			
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah prosentase komoditi ----- x 100% Jumlah komoditi	%	328,47 ----- x 100% 64	5,13
		9.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a / (b \times c) \times 100\%$ X = persentase jumlah pupuk yang disalurkan A= jumlah pupuk yang disalurkan B= target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (kp3) di tingkat kota sebesar (90% dari RDKK) C= rdkk (rencana definitive kebutuhan pokok)	%	a =30.055.871 b = 90% *31.157.485 =28.041.736 c = 31.157.485 $x=a/(bxc) \times 100\%$ = 30.055.871/(28.041.736 x31.157.485) x 100% = 3,4%	3,4
		10.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di	%	3.891 ----- x 100% 3.891	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				wilayah Kab kota			
		11.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	%	266 ----- x 100% 908	29
31	Perindustrian						
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab.	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	0 ----- x 100 % 0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda.	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan: a. Tersusunnya naskah akademik (30%) b. Tersusunnya draft Ranperda RPIK (20%) c. Draft Ranperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi Dinas yang membidangi Perindustrian di Provinsi (25%) d. Persetujuan draft Ranperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e. Penetapan Perda RPIK (10%) Ket: Penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	%	a+b =30 + 20 =50	50
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	%	$\frac{2.804}{2.804} \times 100\%$	100
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan.	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten.	Jumlah data perusahaan industri kecil & perusahaan kawasan industri di kab di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri besar & perusahaan kawasan industri di kab.	%	2.851 ----- x 100% 2.851.	100
31	Transmigrasi.						
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi. Penetapannya.	Kawasan.	jumlah	SK Bupati Jepara Nomor 560/405 Tahun 2022 tentang Calon Transmigran Kabupaten Jepara ke Unit Permukiman Transmigrasi Salulisu Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	1
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya.	pemukiman	jumlah	SK Bupati Jepara Nomor 560/405 Tahun 2022 tentang Calon Transmigran Kabupaten Jepara	1

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						ke Unit Permukiman Transmigrasi Salulisu Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	Pemukiman	jumlah	SK Bupati Jepara Nomor 560/405 Tahun 2022 tentang Calon Transmigran Kabupaten Jepara ke Unit Permukiman Transmigrasi Salulisu Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	1